

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

RELASI MILITER DAN NEGARA DALAM ISLAM

Pujian Tertinggi
bagi Penolong
Agama Allah

Amerika
Mengeluarkan
Peringatan Tentang
Kemunculan
Kembali
Khilafah

Budi Mulyana, S.I.P., M.Si:

**TUGAS UTAMA MILITER
DALAM ISLAM ADALAH
PERTAHANAN DAN JIHAD**

Rp. 10.000,- (Luar Jawa Rp. 14.000,-)
Edisi Mei, 1-31 Mei 2025/ هـ 1446

Ilmuwan Muslim dan Penemuan yang Mereka Berikan Kepada Dunia (Bagian 2)

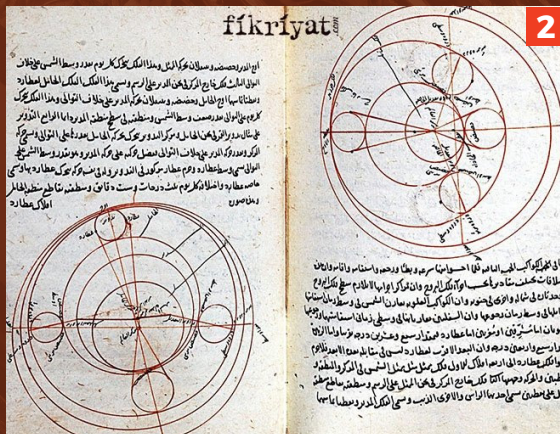
Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/musluman-bilim-insanlari-ve-dunyaya-armagan-ettikleri-buluslar>

ABUL WAFI-TRIGONOMETRI (MATEMATİK)

Abul Wafa, pendiri ilmu trigonometri, juga dikenal dengan julukan "insinyur" dan "hasib". Lahir pada tanggal 10 Juni 940. Beliau adalah sarjana Muslim ini memperoleh pengetahuan dasar matematika dari pamannya Abu Amr al-Mughāzilī dan paman dari pihak ibu, Abu Abdullah Muhammad. Dia belajar dari Anbese.

Abul Wafa -lah yang mengubah trigonometri menjadi cabang ilmu pengetahuan yang sistematis. Vefa yang memberikan bukti pertama teorema trigonometri, mendefinisikan garis singgung dengan nama "zil", garis sekant dengan nama "kutr-i zil" dan membuat tabel fungsi trigonometri yang tepat dalam langkah-langkah 15 menit sebagai fungsi busur.

Ilmuwan Muslim merintis jalan baru di banyak bidang seperti astronomi, fisika, kedokteran, teknik, dan kimia. Karya-karya yang ditulis oleh para sarjana diajarkan sebagai buku pelajaran di sekolah-sekolah Eropa selama berabad-abad. Mereka telah menjadi sumber daya bagi dunia ilmiah selama ratusan tahun dengan banyak penemuan, dari pemisahan atom hingga jam bandul, dari deteksi cacar hingga sistem kendali otomatis. Berikut ini adalah para ilmuwan muslim yang membentuk peradaban melalui penemuan-penemuan mereka dan ciptaan-ciptaan yang mereka hadiahkan kepada dunia.



Abul Wafa menemukan pertidaksamaan $\sin(\alpha + \beta) - \sin \alpha < \sin \alpha - \sin(\alpha - \beta)$ untuk dua busur yang jumlah dan selisihnya kurang dari 90 derajat, α dan β , dan $\alpha > \beta$, dan menggunakan teorema ini, yang kemudian dinamai menurut namanya, ia menghitung $\sin 30'$ menit secara akurat hingga delapan tempat desimal sebagai $\sin 30' = 0,00872653672$. Selain itu, karena $\sin \alpha$ dan $\sin \beta$ diketahui, ia menemukan rumus $2\sin^2 \alpha = 1 - \cos \alpha$, $\sin \alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$ dimulai dari $\sin(\alpha \pm \beta)$, sehingga memberikan perhitungan sinus dan kosinus dari setengah sudut.

Abul Wafa merupakan orang pertama yang menggambar persegi di dalam lingkaran dengan satu lubang kompas dan menggambar segitiga sama sisi di dalam persegi tertentu.



ABU FIRNAS - PESAWAT PERTAMA (TEKNISI)

Abu Firas adalah seorang ulama Muslim Andalusia yang hidup antara tahun 810-887. Firas, yang belajar di Cordoba, mengembangkan dirinya di banyak bidang seperti kebanyakan cendekiawan saat itu. Dia juga seorang penyair, astrolog, musisi, astronom dan insinyur. Usaha yang membuatnya paling terkenal adalah penemuan pesawat terbang pertama yang dapat membawa seseorang di udara.

1-31 Mei 2025/

1446 هـ

Daftar Isi

Nafsiyah:

Pujian Tertinggi bagi Penolong Agama Allah

25

Allah SWT telah memuji orang-orang Mukmin yang bersedia serta selalu siap dan sigap dalam menolong agama-Nya. Memang, Allah SWT tidak memerlukan pertolongan manusia, termasuk untuk menolong agama-Nya. Namun, adanya perintah Allah SWT untuk menolong agama-Nya menunjukkan betapa agung dan mulianya aktivitas tersebut. Karena itu aktivitas menolong agama Allah SWT harusnya dilakukan oleh setiap Muslim. Apalagi mereka yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, seperti penguasa dan *ahlul quwwah*.

Hiwar:

Tugas Utama Militer dalam Islam adalah Pertahanan dan Jihad

46

Tugas dan fungsi utama militer di negeri manapun adalah pertahanan negara. Khususnya dari berbagai ancaman yang datang dari luar (eksternal). Namun, dalam konteks Negara Islam (Khilafah Islam), tugas dan fungsi militer tak hanya itu. Ada tugas dan fungsi lain yang tak kalah pentingnya. Tidak lain adalah jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ini diperlukan terutama untuk mendukung penyebarluasan dakwah Islam sekaligus *futūḥât* ke luar negeri.

Dunia Islam:

Amerika Menge-luarkan Peringatan Tentang Kemunculan Kembali Khilafah

75

Sebagai pengusung utama ideologi Kapitalisme dan negara adidaya saat ini, Amerika Serikat tentu tidak menghendaki ada satu pun negara yang menjadi pesaingnya. Apalagi jika negara pesaing itu adalah Negara Islam global, yakni Khilafah. Amerika, juga Barat secara umum, jelas lebih memahami daripada kaum Muslim sendiri tentang potensi kekuatan dan kehebatan Khilafah Islam. Karena itu tidak aneh jika Amerika dan Barat secara umum terus memperingatkan dunia akan potensi bangkitnya kembali Khilafah Islam, yang bisa mengancam eksistensi Kapitalisme global yang diusung Barat, khususnya Amerika, saat ini.

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi</i> : Dunia di Persimpangan, Krisis Ideologis & Jalan ke Depan	3
<i>Opini Pembaca</i>	5
<i>Muhasabah</i> : Memimpin Masa Depan	7
<i>Fokus</i> : Pro Kontra Revisi UU TNI	9
<i>Analisis</i> : Militer di Negara Khilafah	14
<i>Catatan Dakwah</i> : <i>Furqân</i>	19
<i>Iqtishadiyah</i> : Dampak Trump 2.0: Indonesia di Persimpangan Ekonomi Dunia	21
<i>Nafsiyah</i> : Pujian Tertinggi Bagi Penolong Agama Allah	25
<i>Afkar</i> : Peran Penting <i>Ahlul Quwwah</i> di Dunia Islam	28
<i>Fikih</i> : Islam dan Agama Para Nabi	33
<i>Lintas Dunia</i>	37
<i>Atsar</i> : Abul Wafa al-Buzjani Pendiri Ilmu Trigonometri	40

<i>Baiti Jannati</i> : Membangun Mental Pejuang Pada Anak Sejak Dini	42
<i>Hiwar</i> : Tugas Utama Militer dalam Islam adalah Pertahanan dan Jihad	46
<i>Nisa'</i> : Kekerasan Mengintai Perempuan	51
<i>Hadis Pilihan</i> : Haram Menelantarkan Harta	54
<i>Ibrah</i> : Perisai Umat	56
<i>Soal Jawab</i> : Bolehkah Negara Mengadopsi Hukum Ibadah?	58
<i>Tafsir</i> : Setan Berlepas Diri dari Orang Kafir (I)	60
<i>Takrifat</i> : <i>Bayân al-Mujmal</i>	64
<i>Telaah</i> : Syariah Islam	68
<i>Siyasah Dakwah</i> : Militer Kuat, Bebas dari Oligarki dan Pengaruh Barat	71
<i>Dunia Islam</i> : Amerika Mengeluarkan Peringatan Tentang Kemunculan Kembali Khilafah	75
<i>Tarikh</i> : Islamisasi Karawang Raya (Dari Syaikh Qura Hingga Kesultanan Islam) (Selesai)	78

Pengantar

Assalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam | Alamat:

Gedung Graha

Mampang Lt-1 - Suite

101. Jl. Mampang

Prapatan Raya

Kav. 100, Jakarta

Selatan. | e-mail:

redaksialwaie@gmail.

com | Pemimpin

Umum: M. Anwari. |

Pemimpin Perusahaan

dan Keuangan: M.

Anwari. | Pemimpin

Redaksi: Ibnu Faruq.

| Redaktur Pelaksana:

M. Arief Billah. |

Redaktur: Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

| Layout: ishaq.

Pemasaran: Tedi |

Harga: Rp. 10.000,-

(P. Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar

P. Jawa).

Pembaca yang budiman, beberapa waktu lalu DPR dan Pemerintah mengesahkan UU TNI. Namun, tak lama berselang, pengesahan UU TNI tersebut mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. Sejumlah demonstrasi pun terjadi di berbagai daerah. Tuntutannya sama: pembatalan UU TNI tersebut. Mengapa UU TNI ditolak? Alasannya, mereka khawatir, dengan UU TNI tersebut, dwifungsi TNI—yang pernah menimbulkan trauma selama Orde Baru—kembali terjadi. Apalagi penghapusan dwifungsi militer—dengan mengembalikan tentara ke barak—merupakan amanat reformasi.

Bagaimana seharusnya kita menyikapi UU TNI tersebut? Apakah UU TNI tersebut memang layak ditolak? Jika demikian, lalu bagaimana seharusnya negara memposisikan militer menurut pandangan Islam? Adakah contohnya pada masa Rasulullah saw. dan para khalifah setelah beliau (Khulafaur Rasyidin)?

Yang pasti, dalam pandangan Islam, institusi militer atau ketentaraan bukanlah sekadar alat kekuasaan atau penjaga status quo penguasa. Lebih dari itu, keberadaan tentara dalam Islam memiliki visi dan misi yang mulia. Tugas utama militer dalam sistem Islam adalah menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman eksternal, serta menjadi garda terdepan dalam melaksanakan jihad fî sabilillah—membela agama, melindungi kaum Muslim dan menegakkan kalimatullah di muka bumi.

Dengan demikian, orientasi militer Islam bukanlah penjajahan, melainkan pembebasan umat manusia dari kezaliman dan dominasi sistem kufur. Mereka adalah pasukan ideologis yang tunduk pada syariah dan bertugas menyebarkan rahmat Islam ke seluruh penjuru dunia.

Al-Waie edisi kali ini menghadirkan sejumlah tulisan yang membahas peran strategis militer dalam Islam. Tentu berdasarkan sumber-sumber otoritatif dari al-Quran, as-Sunnah dan sejarah Khilafah Islamiyah.

Itulah antara lain yang dibahas dalam tema utama *al-waie* edisi kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Semoga semua informasi yang disajikan dalam *Al-Waie* edisi kali ini menjadi bahan renungan dan inspirasi bagi kaum Muslim, khususnya untuk memahami kembali urgensi umat ini untuk membangun kekuatan militer Islam yang sejati. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.



DUNIA DI PERSIMPANGAN, KRISIS IDEOLOGIS & JALAN KE DEPAN

 i tengah tekanan yang luar biasa dari rezim Trump terhadap umat Islam di Amerika, Hizbut Tahrir Amerika, pada 5 April 2025, menyelenggarakan konferensi internasional di Chicago. Konferensi Khilafah 2025 ini mengambil tema yang sangat penting sekaligus menarik, yaitu: “Dunia di Persimpangan: Krisis Ideologis dan Jalan ke Depan”. Seperti yang diberitakan oleh Hizbut Tahrir Amerika, konferensi tahunan ini bertujuan untuk membangkitkan dan menginspirasi komunitas Muslim di Amerika untuk menghadapi tantangan global yang mendesak.

Dalam diskusi yang menarik dan cerita langsung dari saksi mata yang menggugah, konferensi ini mengungkap dunia yang berada di persimpangan jalan. Bertahan dengan ideologi Kapitalisme yang rapuh atau mencari jalan baru yang mencerahkan. Dalam konferensi ini diungkap bagaimana ideologi Kapitalisme mengalami krisis yang akut. Hal yang paling menonjol diungkap adalah kontradiksi dalam klaim-klaim Barat tentang demokrasi dan kebebasan, terutama setelah peristiwa 7 Oktober, Sensor dan penindasan terhadap suara-suara pro-Palestina memperlihatkan hipokrisi yang jelas.

Meskipun mengklaim sebagai negara penjaga demokrasi terbesar di dunia, Trump menampilkan kegagalan ideologi Kapitalisme untuk membendung suara kebenaran dan ke-

manusiaan. Kejahatan entitas penjajah Yahudi yang terjadi di depan mata tidak bisa lagi disembunyikan oleh Barat melalui tirani hegemoni media *mainstream*. Keberadaan media sosial, jurnalis independen dan saksi langsung menyulitkan untuk menutupi kejahatan parah entitas penjajah Yahudi.

Hal ini menggerakkan sebagian masyarakat Amerika untuk mulai bersikap kritis terhadap dukungan Amerika kepada Israel. Propaganda buruk untuk menutupi kekejaman entitas Yahudi juga gagal. Sebagaimana layaknya pemerintahan diktator, Trump menggunakan alasan yang tidak masuk akal, bahkan nyaris tanpa alasan, untuk bersikap represif terhadap siapa pun yang memihak Palestina. Trump menangkap dan mengusir aktivis pro-Palestina dengan tangan besi. Tentu ini bertentangan 180 derajat dengan prinsip demokrasi Amerika. Ini sesungguhnya bukan hanya terjadi di Amerika, tetapi di negara-negara Barat pengusung Kapitalisme lainnya. Mereka membungkam suara kebenaran dengan tangan besi, seolah mereka negara diktator yang kejam di Afrika.

Kondisi ini jelas menunjukkan kegagalan sistem Kapitalisme secara global. Jelas dunia membutuhkan jalan baru yang membawa dunia menuju cahaya dari kegelapan. Dalam konferensi ini, Islam diperkenalkan sebagai alternatif yang adil dan dipandu oleh wahyu Ilahi. Kebenaran yang bersumber dari Allah SWT

Yang Mahabesar. Kebenaran yang dibangun atas dasar keimanan yang rasional dan sesuai dengan fitrah. Dari keimanan ini dibangun ideologi Islam yang sesuai dengan fitrah manusia, yang melahirkan sistem kehidupan yang komprehensif dalam segala aspek. Itulah syaria Islam yang mengatur segala aspek kehidupan. Dengan penerapan syaria Islam ini, manusia akan merasakan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Dengan fokus pada krisis kesehatan di Gaza, konferensi ini menyoroti dampak menghancurkan dari perang dan blokade, yang diperburuk oleh pembatasan bantuan medis yang disengaja. Seorang dokter yang berbagi pengalaman pribadinya tentang kondisi mengerikan yang ia saksikan di Gaza menyatakan bagaimana para pekerja medis menunjukkan ketahanan dalam merawat pasien di tengah kekurangan yang parah. Kondisi ini jelas menunjukkan kejahatan entitas penjajah Yahudi, sementara entitas Yahudi ini didukung penuh oleh Amerika Serikat.

AS jelas bukan sekadar mitra kejahatan entitas Yahudi ini. AS merupakan pangkal kejahatan. Amerikalah yang selama ini memberikan dukungan politik, ekonomi dan militer terhadap entitas penjajah Yahudi. Bahkan pada saat bulan Ramadhan dan Lebaran kemarin, serangan telah membunuh lebih dari 400 orang yang menjadi syuhada. Semua itu, seperti pengakuan Netanyahu, di bawah persetujuan Trump.

Sejak awal hingga sekarang kebiadaban entitas penjajah Yahudi karena didukung oleh bantuan-bantuan negara-negara imperialis, termasuk AS. Inggris membidani kelahiran negara ilegal Israel melalui Deklarasi Balfour. Lalu setelah Perang Dunia II, AS-lah yang paling utama menjaga keberadaan entitas Yahudi Zionis. Dengan memberikan legitimasi melalui PBB dan hampir setiap Presiden Amerika, siapa pun mereka, dari Demokrat ataupun

Republik, akan menganggap bahwa membela entitas penjajah Yahudi ini sebagai harga mati. Amerika pula yang mendudukkan para penguasa Muslim pengkhianat di tengah-tengah kaum Muslim, terutama di tengah-tengah negeri-negeri Arab.

Pertemuan ini juga akan menghubungkan tanggung jawab lokal dan global, mendorong umat Muslim di Amerika untuk memperkuat persatuan dan terlibat dalam aktivisme serta mengambil inspirasi dari perjuangan seperti yang terjadi di Gaza, sambil mengadvokasi model pemerintahan yang berakar pada prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas Islam. Konferensi ini juga mendorong peserta untuk berperan aktif dalam mengungkap ketidakadilan dan mendorong perubahan yang bermakna.

Jelas ini bukan hanya tanggung jawab Muslim Amerika, tetapi juga tanggung jawab kita semua, termasuk di Indonesia. Sangat penting umat Islam mengambil peran penting dalam kondisi krisis dunia saat ini. Tentu saja dengan memperjuangkan Islam agar terwujud dalam kehidupan sehari-hari, dalam segenap aspek kehidupan. Bukan sekadar Islam dalam aspek ritual dan moralitas, tetapi juga ekonomi, politik, pendidikan hingga negara.

Di sinilah relevansi perjuangan umat Islam di seluruh dunia untuk menegakkan kembali Khilafah '*alâ Minhâj an-Nubuwwah*. Inilah negara yang mutlak dibutuhkan untuk menyatukan umat Islam secara global dan menerapkan syaria Islam secara *kâffah*. Negara Khilafah '*alâ Minhâj an-Nubuwwah* akan membungkam keangkuhan Amerika, sekaligus membawa perubahan nyata di dunia. Sedemikian sebagaimana sebelumnya Rasulullah saw. dan para Sahabat mengusung Islam ke seluruh penjuru dunia. Islam membawa kebaikan bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga seluruh umat manusia. Sekali lagi, ini adalah tanggung jawab kita bersama! *Allâhu Akbar!* [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

The Rise

**Endah
Sulistiowati**

(Dir. Muslimah
Voice)

Saat ini umat Islam, baik di Indonesia maupun di dunia, menghadapi berbagai tantangan besar yang berakar pada penerapan sistem Kapitalisme-sekuler. Di Indonesia, krisis ekonomi yang berkelanjutan—termasuk pengangguran, PHK massal, dan beban utang negara yang membengkak—menambah beban rakyat. Di sisi lain, ketidakadilan hukum yang merajalela, dengan kasus-kasus korupsi yang terus meningkat, memperburuk keadaan. Masyarakat

semakin merasakan kesenjangan sosial yang semakin melebar, sementara penguasa tampak lebih sibuk mempertahankan sistem yang tidak memberikan solusi nyata. Oleh karena itu, banyak yang merasakan “kegelapan” yang menyelimuti kehidupan sehari-hari.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh Dunia Islam. Salah satu contoh nyata adalah penderitaan yang dialami rakyat Palestina yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade. Penindasan yang terus-menerus dilakukan oleh entitas Zionis, dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat, menunjukkan betapa Dunia Islam terperangkap dalam kegelapan peradaban yang lebih luas. Sementara itu, sebagian besar penguasa Muslim malah memilih berdamai dengan pihak yang menindas sesama umat Islam.

Pada tingkat global, sistem kapitalisme sekuler telah menciptakan berbagai krisis yang semakin memperburuk kehidupan umat manusia. Krisis ekonomi yang tajam, ketimpangan sosial yang meluas, kerusakan lingkungan dan krisis kepemimpinan global adalah beberapa dampak nyata dari penerapan ideologi ini. Kapitalisme yang hanya berfokus pada keuntungan segelintir orang telah menyebabkan kesenjangan yang semakin tajam antara kaya dan miskin. Dalam sistem ini, nilai-nilai moral terabaikan, dan gaya hidup hedonis serta konsumerisme mendominasi kehidupan.

Sistem kapitalisme sekuler tidak hanya merusak kehidupan umat Islam, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang mengatur segala aspek kehidupan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran. Allah SWT melalui wahyu-Nya telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa hanya dengan menjalankan syariah Islam secara total, umat ini bisa keluar dari kegelapan dan menuju cahaya yang membawa keberkahan. Dalam al-Quran, Allah SWT berfirman (yang artinya): *Allah adalah Pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya* (TQS al-Baqarah [2]: 257).

Untuk keluar dari kegelapan ini, umat Islam harus kembali pada Islam sebagai ideologi dan sistem kehidupan yang menyeluruh. Penerapan sistem Islam secara *kāffah*. Bukan hanya dalam aspek ibadah pribadi; tetapi juga dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan hukum. Ini adalah kunci untuk mencapai keadilan dan kemakmuran yang sejati. Dalam sejarah, ketika Islam diterapkan secara total, peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya. []

Tentara Masuk Sipil?

**Pompy
Syaiful**
(Geopolitical
Institute)



revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir-akhir ini memang menyisakan banyak pertanyaan dan polemik. Bukan hanya soal substansi undang-undang yang ingin diloloskan, tetapi juga mengenai motif,

modus dan siapa sebenarnya aktor di balik perubahan besar ini. Ketika Prabowo Subianto, saat menjadi Menteri Pertahanan era Jokowi, menyuarakan hasratnya untuk merombak Undang-Undang TNI, banyak pihak menganggap ini adalah agenda yang berpotensi menumbuhkan kembali iklim dwifungsi ABRI yang sempat terkubur dalam Reformasi 1998.

Motif utama dari revisi undang-undang ini jelas terlihat: Prabowo ingin memperluas peran TNI di dalam struktur pemerintahan sipil. Ia berpendapat bahwa penguatan sistem pertahanan negara harus melibatkan lebih banyak unsur militer, bahkan dalam sektor-sektor yang selama ini tidak berhubungan langsung dengan masalah pertahanan. Dalam *draft* yang disusun oleh timnya, tentara akan dapat menduduki posisi-posisi penting di lebih banyak lembaga negara dan ada perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi TNI. Tentara aktif, yang sebelumnya terikat pada peran pertahanan murni, kini bisa menjadi bagian dari birokrasi sipil tanpa harus mengundurkan diri dari tugas ketentaraan mereka.

Bagi mereka yang memandang reformasi pasca-Orde Baru sebagai jalan menuju demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, langkah ini jelas memunculkan kekhawatiran akan potensi munculnya militerisme dalam ranah sipil. Apalagi, jika kita menilik sejarah, banyak yang merasa bahwa dwifungsi ABRI yang pernah ada pada masa Orde Baru adalah sebuah pembelajaran pahit yang harusnya tidak terulang.

Menariknya, dalam proses ini, tak hanya oposisi politik yang menentang, tetapi masyarakat sipil pun aktif melakukan perlawanan. Mereka takut bahwa RUU TNI yang baru ini bukan hanya mengembalikan militerisme, tetapi juga menambah penumpukan kekuasaan pada segelintir orang yang terhubung dengan militer, dikhawatirkan akan semakin jauh dari prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan rakyat. Apa yang lebih menggelikan adalah bagaimana DPR, yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat, malah tergoda untuk mendukung RUU yang terkesan dipaksakan ini.

Selain itu, munculnya posisi-posisi baru di instansi sipil yang bisa ditempati oleh tentara aktif seakan mematahkan konsep pemisahan antara tentara dan politik. Bahkan, peran yang lebih besar bagi TNI dalam ruang siber dan sektor narkoba telah mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak. Tentara, yang seharusnya fokus pada strategi pertahanan, kini akan memiliki lebih banyak ruang untuk mengatur hal-hal yang lebih bersifat sipil. Ironisnya, dalam RUU yang disahkan, Prabowo tetap memasukkan sektor-sektor ini meski ada penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat.

Di sisi lain, dukungan dari partai politik besar seperti PDI Perjuangan yang menganggap revisi ini sebagai kebutuhan strategis, menggarisbawahi bahwa politik di Indonesia seringkali tidak lebih dari sekedar kalkulasi kekuasaan. PDIP, meskipun bukan bagian dari koalisi pemerintah, tetap memilih untuk mendukung revisi ini. Ini menunjukkan bagaimana politik pragmatis yang lebih mengedepankan kekuasaan di atas kepentingan rakyat lebih sering mendominasi di level legislatif. []



MEMIMPIN MASA DEPAN

Muhammad Rahmat Kurnia

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Maret 2025 mengalami *Trading Halt* (penghentian sementara). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 7% lebih menjadi posisi 6018,39. “Pangan adalah yang paling utama, ya. Harga saham boleh naik-turun. Pangan aman negara aman,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan merespon kondisi IHSG (21 Maret 2025).

Apa yang disampaikan Presiden ada benarnya. “Kata Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan sebanyak 43,3%. Nah, mereka ini tidak ada hubungannya dengan harga saham. Saham itu apa, belum tentu paham. Yang mereka paham adalah harga telur, cabai dan ongkos pada naik,” kata Mas Nur.

Saya sampaikan bahwa memang IHSG ini lebih merupakan permainan sentimen atau permainan persepsi. “IHSG naik biasanya mencerminkan sentimen positif dari para investor (pemain saham) terhadap stabilitas politik dan mereka yakin akan masa depan ekonomi. Para pemegang saham saat merasa lebih kaya, mereka membeli saham untuk investasi. Gejolak harga saham menggambarkan adanya gejolak politik,” saya berkomentar.

“Lho, kalau begitu IHSG anjlok tidak selalu bermasalah, dong?” tanya Mas Nur.

Saya sampaikan, “Itu indikator utama kondisi ekonomi makro suatu negara. Ini se-

benarnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi real. Namanya juga saham. Itu non-real.”

Jangan heran, misalnya, ketika Presiden terpilih tidak disukai investor, harga saham anjlok. Sebaliknya, jika Presiden terpilih disukai investor maka harga saham naik. Ketika program makan bergizi gratis dianggap berbiaya mahal, harga saham turun. Saat UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) disahkan dan investor khawatir, IHSG pun turun. Penentunya lebih pada sentimen politik, bukan ekonomi sebenarnya.

“Iya ya, permainan sentimen. Mirip judi ya. Judi raksasa,” ujar Mas Nur lagi.

“Persoalannya adalah mengapa *kok* yang kayak *gitu* dijadikan indikator utama,” Mas Darma nimbung.

“Karena tolok ukurnya bukan Islam, Islam melarang ekonomi non-real seperti riba dan bursa saham. Yang sekarang diterapkan adalah Kapitalisme-sekularisme, Bro,” sanggah Mas Nur serius.

“Jadi, penentunya adalah sistemnya,” ujar Mas Darma.

Bicara sistem sekularisme, berarti Islam dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan negara. Dalam sistem sekuler, para pejabat dipilih untuk menerapkan aturan/hukum yang dibuat oleh manusia. Aturan itu namanya undang-undang. Ketika bicara tentang undang-undang yang sumbernya adalah otak manusia, maka yang dominan di situ adalah kepentingan. Jelas, sistem penting sekali.

Bukan hanya dalam masalah IHSG, kelelahan TNI aktif menjabat jabatan sipil yang sekarang sedang heboh menjadi perbincangan publik, juga dipengaruhi oleh sistem.

“Saya berpikir begini, Ustadz. Katakan saja, Menteri Kelautan dan Perikanan berasal dari TNI aktif. Pada satu sisi, Pak Menteri terikat kementeriannya. Namun, pada sisi lain tidak dapat lepas dari sistem komando yang ada di TNI. Pasti ada kepentingan di sini. Ada *conflict of interest*. Bukan begitu?” Mas Nur berpendapat.

“Hal yang sama terjadi juga jika yang menjadi menteri dari polisi aktif, dong” sambung Mas Darma.

“Tapi, dulu para Sahabat Rasulullah saw. adalah mujahid, mereka turut berperang. Dengan kata lain, mereka tentara,” sahut Pak Ahmad berpartisipasi. Beliau melanjutkan, “Tidak sedikit di antara mereka menjadi pejabat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali malah menjadi khalifah. Amru bin ‘Ash menjadi wali (gubernur) di Mesir. Muadz bin Jabal menjadi *qâdhi* di Yaman. Semua tidak ada masalah. Bagaimana itu?”

Mas Nur mendahului menjawab, “Itulah Om Ahmad. Sistemnya yang beda. Para Sahabat Rasulullah saw. itu ketika menjabat tidak terikat dengan institusi ketentaraan atau kepolisian. Mereka hanya satu kedudukan: pejabat publik. Mereka fokus mengurus rakyat dengan syariah Islam. Tidak ada sistem komando tentara atau polisi yang mengintervensi jabatannya.”

Mas Darma menyahut pendek, “Memang beda. Tidak ada *conflict of interest*.”

Dari situ, terlihat pentingnya perubahan. Bukan sekadar perubahan aktor, melainkan juga perubahan sistem.

Berbicara perubahan dalam konteks aktor atau pelaku, diperlukan aktor yang dapat memimpin diri sendiri, di samping memimpin orang lain. Memimpin diri sendiri dan orang

lain, keduanya merupakan hal biasa. Ada *skill* lain yang diperlukan oleh seorang aktor/pelaku, yakni memimpin perubahan itu sendiri. Bahkan bukan sekadar memimpin perubahan melainkan juga memimpin masa depan. Langkah paling logis untuk memimpin masa depan adalah dengan cara menciptakan atau merancang masa depan. Bicara masa depan adalah kehidupan Islam. Sayyid Quthub menjelaskan hal ini dalam bukunya yang populer, *Al-Mustaqbal li Hâdzâ ad-Dîn (Masa Depan Milik Islam)*. Kata kuncinya adalah perjuangan.

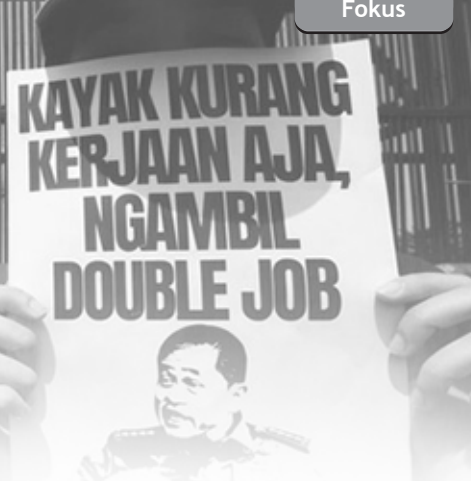
Dalam konteks sistem, perubahan ke arah Islam merupakan suatu keniscayaan. “Karena itu, jangan sekuler. Aturannya harus hukum syariah Islam,” ungkap Mas Nur. “Kalau kita beli motor merek tertentu, maka *manual book*-nya harus dari motor merek tersebut. Tidak akan jalan apabila *manual book* yang digunakan adalah *manual book* untuk kulkas,” tambahnya. “Kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Pastilah, pengaturan hidup manusia haruslah didasarkan pada *manual book* yang berasal dari Allah SWT. Itulah wahyu: Al-Quran dan Sunnah,” tambahnya.

Perubahan tidak datang secara instan dibawa oleh malaikat dari langit. Perubahan harus diperjuangkan. Allah SWT berfirman dalam al-Quran Surat Ar-Ra’du ayat 11 yang maknanya: *Bagi dia (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertai dirinya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaga dia atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia* (TQS ar-Ra’du [13]: 11).

Wallâhu a’lam. []



**TOLAK
RUUTNI**
KEMBALIKAN TNI KE BARAK



**KAYAK KURANG
KERJAAN AJA,
NGAMBIL
DOUBLE JOB**

PRO KONTRA REVISI UU TNI

Dr. Riyan M.Ag (Pengamat Politik Islam)

Di tengah penolakan berbagai kalangan masyarakat,¹ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikeras mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pengesahan RUU TNI dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025. Rapat ini dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani (*Detik*, 21 Maret 2025).

Secara proses, mencuatnya kembali gagasan revisi UU TNI telah dimulai dari sejak Mei 2024. Pada 11 Juli 2024, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro mengusulkan pencabutan larangan TNI berbisnis dalam rapat revisi UU TNI di Hotel Borobudur. Pada 19 November 2024, Revisi UU TNI tidak masuk program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) DPR 2025.

Namun, pada 13 Februari 2025, melalui suratnya, Presiden Prabowo meminta agar Revisi UU TNI menjadi program legislasi nasional prioritas DPR pada 2025.² Ini direspon oleh DPR, yang pada 18 Februari 2025 menyepakati bahwa Revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas DPR.

Setelah itu, pada 17 Maret 2025 beredar *draft* revisi UU TNI. Wakil Pimpinan DPR

Sufmi Dasco dari Partai Gerindra mengatakan *draft* tersebut berbeda dengan yang dibahas di Komisi I. Pada 18 Maret 2025 Pemerintah dan DPR menyepakati poin-poin perubahan dalam Revisi UU TNI hingga 20 Maret 2025 disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR.

Ada apa sebenarnya di balik proses *ngebut* yang dilakukan Pemerintah dan DPR dalam revisi UU TNI ini?

Daftar Pasal yang Direvisi DPR dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004

(a) Perubahan Pasal 7 tentang Tugas TNI

Bersumber dari dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas pokok TNI dibedakan menjadi 2 dalam Pasal 7 ayat (2), yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (OMSP).

Untuk operasi militer selain perang, tugas TNI dirinci sebanyak 14 poin sebagaimana tertera dalam huruf b ayat (2) pasal 7. Keempat belas tugas tersebut adalah: (1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata; (2) Mengatasi pemberontakan bersenjata; (3) Mengatasi aksi terorisme; (4) Mengamankan wilayah perbatasan; (5) Mengamankan objek vital nasio-

nal yang bersifat strategis; (6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; (7) Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; (8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; (9) Membantu tugas pemerintahan di daerah; (10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; (11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; (12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan; (13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); (14) Membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Pada revisi UU TNI yang kemarin disahkan, terdapat dua tugas tambahan, yakni: (15) Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; (16) Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

Di samping itu, terdapat satu ayat tambahan untuk pasal 7 yang bunyinya: *"Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10."*

(b) Perubahan Pasal 47 tentang Kementerian/Lembaga yang Bisa Dimasuki TNI

Perubahan selanjutnya terdapat pada Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004. Pasal ini mengatur tentang kementerian atau lembaga yang dapat diisi TNI. Dalam ayat (2) pasal tersebut, tertulis: *"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordi-*

nator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung."

Setelah direvisi, terdapat total 14 K/L yang bisa diisi TNI aktif, yakni: (1) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; (2) Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional; (3) Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden; (4) Badan Intelijen Negara; (5) *Badan Siber* dan/atau Sandi Negara; (6) Lembaga Ketahanan Nasional; (7) Badan Search And Rescue (SAR) Nasional; (8) Badan Narkotika Nasional (BNN); (9) *Badan Nasional Pengelola Perbatasan* (BNPP); (10) Badan Penanggulangan Bencana; (11) Badan Penanggulangan Terorisme; (12) *Badan Keamanan Laut*; (13) *Kejaksaan Republik Indonesia* (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer); (14) Mahkamah Agung.

(c) Perubahan Pasal 53 tentang Usia Pensiun TNI

Sebelum direvisi, anggota TNI bertugas paling lama hingga usia 58 tahun untuk tingkat perwira. Adapun untuk pangkat bintang dan tamtama, hingga usia maksimal 53 tahun. *"Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintang dan tamtama."*

Usai diubah, batas usia pensiun prajurit menjadi: (1) Bintang dan tamtama maksimal 55 tahun; (2) Perwira sampai pangkat kolonel maksimal 58 tahun; (3) Perwira tinggi bintang 1 maksimal 60 tahun; (4) Perwira tinggi bintang 2 maksimal 61 tahun; (5) Perwira tinggi bintang 3 maksimal 62 tahun; (6) Perwira tinggi bintang 4 maksimal 63 tahun (dapat diperpanjang maksimal 2 kali dua tahun sesuai kebutuhan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden).

Kritik Terhadap Revisi UU TNI

Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi oleh negeri ini dan secara khusus persoalan utama TNI sebagai garis terdepan pertahanan negara,³ apakah Revisi UU TNI dapat menjawabnya?

(I) Aspek Fundamental.

Pertama: Secara strategis, urgensi dari revisi yang *ngebut* ini dan mendapatkan penolakan massif dari berbagai kalangan, diyakini tidak menjawab problematika mendasar pertahanan negara yang multidimensi. Seharusnya revisi UU TNI menjawab bagaimana memperkuat karakter dan kelengkapan tentara yang profesional. Apalagi dinamika dunia global dan jenis peperangan yang akan dihadapi semakin canggih dan kompleks. Hal ini setidaknya untuk menjawab tiga pertanyaan besar, yakni: apa tingkat perang yang akan dihadapi; bagaimana lingkungan yang akan dioperasikan; dan masalah apa yang ingin bangsa selesaikan. Jawaban atas pertanyaan itu akan mendorong Indonesia bangkit dan berfokus pada ketiga tingkat perangnya yang taktis, operasional dan strategis.

Selain itu, fokus terpenting dari tentara profesional adalah memikirkan konflik bersenjata pada masa depan. Karena itu visi poros maritim dan dirgantara dunia selayaknya mampu mendorong perubahan untuk memastikan bahwa kekuatan TNI yang dibangun siap mencegah konflik, membentuk lingkungan keamanan dan memenangkan perang.

Kedua: Secara politis, banyak kalangan meyakini bahwa revisi yang *ngebut* ini diduga kuat, di satu sisi adalah bagian upaya pemerintahan Prabowo memperoleh “dukungan” dari TNI. Di sisi lain, sekaligus sebagai “hadiah” bagi TNI dalam rangka konsolidasi politik. Setelah mendapat legitimasi politik sebesar 58% dari rakyat di Pilpres 2024, rezim Prabowo tentu membutuhkan dukungan politik untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan. Lalu dikebutlah sejumlah kebijakan, seperti saat me-

revisi UU Kementerian Negara yang sayangnya, malah menghasilkan “kabinet gemoy” dengan menarik sebanyak-banyaknya berbagai elemen politik dan masyarakat. Ini tentu semakin membebani APBN dan masyarakat.

Ketiga: Secara sosiologis, langkah revisi UU TNI ini diyakini makin memperkuat pola kepemimpinan yang bercitra *populisme-otoriter* (atau *legalisme otoritarian*). Yang dimaksud adalah penciptaan citra rezim yang “merakyat” melalui berbagai program populer, seperti MBG (makan bergizi gratis). Ini sebagaimana juga bantuan sosial (*bansos*) pada masa sebelumnya. Namun, karena mengan tongi akumulasi kekuasaan yang makin besar, rezim akan cenderung makin otoriter dalam memaksakan agenda kekuasaan melalui berbagai bentuk kebijakan.

Kebijakan revisi UU TNI yang dikebut kurang dari 3 bulan oleh DPR dan Pemerintah jelas menimbulkan pertanyaan, terutama terkait dengan peran dan partisipasi publik. Apalagi muncul banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Namun, dengan dukungan kekuatan suara politik di DPR, Pemerintah tetap ngotot untuk memaksakan pengesahan UU TNI ini.

Pola ini diyakini akan membuat, ke depan, TNI berpotensi besar menjadi “alat kekuasaan” oleh rezim, bukan menjadi alat negara yang tunduk pada konstitusi dan keputusan sipil. Hal ini tentu berbahaya dalam konteks pelayanan publik. Ini karena hal serupa telah terjadi pada polisi pada rezim sebelumnya yang diyakini menjadi alat kekuasaan rezim. Bukan alat negara.

Jika rezim sekarang terindikasi menggunakan tentara sebagai alat kekuasaan maka apa yang dikhawatirkan publik akan terjadi karena trauma historis tentang kembalinya dwifungsi ABRI/TNI pada masa ORBA, saat Soeharto berkuasa yang terkenal militeristik-represif. Bahkan Panglima TNI, beberapa waktu sebelumnya, juga mendapatkan kritik ketika

menyampaikan bahwa TNI tidak hanya dwifungsi, tetapi *multifungsi*.⁴

(2) Aspek Substansial-Material.

Secara substansi material, dari tiga poin revisi UU diyakini akan makin memperluas pengaruh posisi tentara di ranah sipil. Alasannya karena:

- (a) Dalam konteks penambahan peran dan kewenangan TNI dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Hal ini dikhawatirkan akan berpotensi tumpang-tindih dengan fungsi lembaga sipil. Sebelumnya, fungsi OMSP ada 14 poin, akan semakin mengambil peran sipil dengan ditambahkan 2 hal lagi.
- (b) Terkait penambahan 4 instansi baru yang dapat diduduki *tentara aktif* pasti makin meluaskan pengaruh politik tentara, yang seharusnya fokus ke pertahanan negara. Data Laboratorium Indonesia Emas 2045 (LAB 45) menemukan sudah ada 2.569 perwira TNI menduduki jabatan sipil di sejumlah kementerian dan lembaga negara pada era pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2024). Jika perluasan ini terus dilakukan, akan semakin mengancam otoritas negara dan memperkuat otoriterisme militer di lembaga negara. Selain itu, militer aktif di lembaga sipil, kalau terjadi pelanggaran hukum, tidak diadili di pengadilan sipil, tetapi akan diadili di mahkamah militer. Hal ini tentu dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan hukum dalam praktiknya karena memperkuat impunitas militer karena mahkamah militer tetap ada.
- (c) Terkait perpanjangan usia pensiun, akan berpotensi menghambat khususnya regenerasi kepemimpinan TNI yang notabene banyak perwira tinggi yang saat ini *non-job*. Pada 2018, Imparsial pernah mendata sebanyak 1.069 kolonel dan 156 jenderal berstatus *non-job*. Data lain dari BBC, per 2019, ada 150 perwira tinggi berpangkat

jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel yang tidak memiliki jabatan struktural. Hal ini juga akan menambah jumlah perwira yang *non-job* dan otomatis menambah inefisiensi biaya karena beban pengeluaran anggaran negara.

Sejarah Kelam Militer dalam Konteks Politik Indonesia

Belajar dari pengalaman yang sudah pernah terjadi, Pemerintah mestinya memahami bahwa konsep dwifungsi ABRI yang memberi militer peran ganda di pertahanan dan politik, dominan di era Orde Baru memberikan rasa trauma kepada masyarakat. Pasalnya, dominasi militer dalam ranah sipil menimbulkan berbagai kritik. Terutama terkait dengan praktik otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Puncak kejayaan dwifungsi ABRI pada tahun 1990-an adalah saat memegang peranan kunci di sektor pemerintahan. Mulai dari bupati, wali kota, pemerintahan provinsi, duta besar, pimpinan perusahaan milik negara, peradilan, hingga menteri di kabinet rezim pemerintahan Soeharto. Keterlibatan militer dalam kehidupan sosial politik yang semakin mendalam mengakibatkan militer berubah menjadi alat kekuasaan rezim untuk melakukan pembenaran atas kebijakan Pemerintah.⁵

Gagasan penghapusan dwifungsi ABRI bermula dari seminar Angkatan Darat pada 22-24 September 1998 bertema *Peran ABRI di Abad XXI*. Dalam seminar itu, dihasilkan pemikiran untuk melakukan reformasi dalam tubuh TNI. Kalangan pimpinan TNI pada saat itu memiliki determinasi supaya TNI kembali menjadi tentara profesional sebagai lembaga pertahanan negara.

Akhirnya, dwifungsi ABRI dihapuskan sebagai upaya untuk menegakkan supremasi sipil di Indonesia. Penghapusan dwifungsi ABRI terjadi pada masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada masa kepemimpinannya yang sangat pendek (1999-2001), ia juga telah memisahkan Polisi

Republik Indonesia (Polri) dengan TNI.

Penutup

Dari seluruh uraian di atas terkait pro-kontra revisi UU TNI, maka jelaslah perlu ada keseriusan dari para pengambil keputusan publik, dalam menempatkan militer dalam pertahanan negara sebagaimana mestinya. Dengan demikian secara fundamental dan substansial tidak akan mengundang kembali praktik *dwi-fungsi* apalagi *multi-fungsi* militer dalam politik.

Kita dapat belajar dari sejarah panjang peradaban Islam, bagaimana militer senantiasa ditempatkan dalam kerangka mendukung politik luar negeri, yakni dakwah dan jihad. Pemimpin Muslim memberikan dukungan profesional kepada tentara, baik aspek personil, anggaran dan teknologi. Dengan begitu militer tidak akan mendominasi pemerintahan, dan penguasa tidak akan menjadi rezim yang militeristik-represif-otoriter yang justru menjauhkan dari pelayanan kepada publik sebagaimana esensi politik itu sendiri dalam Islam, mengatur urusan publik, di dalam dan luar negeri dengan hukum Islam.

Wallâhu a'lam. []

Catatan kaki:

- 1 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat terjadi kekerasan saat aksi penolakan RUU TNI di 10 wilayah Indonesia. Total, unjuk rasa penolakan pengesahan revisi UU TNI terjadi di 51 wilayah. Di 10 wilayah terjadi kekerasan terhadap aksi massa. Kekerasan ini terjadi perkembangan. Dulu kekerasan dilakukan aparat kepolisian, hari ini melibatkan militer," kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Zainal Arifin saat dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 26 Maret 2025.
- 2 Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, politisi Gerindra, menegaskan bahwa revisi UU (RUU) TNI bukanlah permintaan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Supratman menyatakan RUU TNI ini berawal dari usul inisiatif DPR, bukan pemerintah. "Ini bukan soal Pak Prabowo atau Presiden yang minta, ini usul inisiatif DPR dari periode yang lalu ya, bukan inisiatif pemerintah," ujar Supratman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (Kompas, 18/3/2025). Tetapi dalam laporan Tempo,

disebutkan aktor utama Revisi UU TNI tentu saja Presiden Prabowo Subianto. Ia menginginkan ada perubahan Undang-Undang TNI jauh sebelum menjadi presiden. Ia mengajak berdiskusi beberapa ahli pertahanan sejak 2023. *Karena itu, begitu terpilih menjadi presiden pada Februari 2024, ia menargetkan revisi Undang-Undang TNI disahkan dalam tiga bulan pertamanya berkuasa.* Rupanya, keinginan Prabowo tidak mulus. Draf RUU TNI yang disusun Sjafrie Sjamsoeddin, waktu itu Asisten Khusus Menteri Pertahanan, ditolak DPR. PDI Perjuangan terbelah antara menerima draf tersebut tapi dibahas di Komisi bidang Pertahanan atau Badan Legislasi. Mereka yang setuju membawa draf ke Badan Legislasi beralasan pembahasan bisa lebih cepat karena konsolidasi partai lebih mudah.

- 3 Persoalan utama tentang hubungan militer dan sipil diuraikan oleh Huntington (1985) dalam *The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil Military Relations*. yang mengupas tentang supremasi sipil (*civilian supremacy*) atau kontrol sipil yang obyektif (*objective civilian control*) yang menyatakan bahwa supremasi sipil artinya meminimalkan intervensi militer dalam kegiatan politik atau dengan kata lain mengakui otoritas sipil dalam merumuskan dan mengawasi implementasi kebijakan di bidang pertahanan. Mengurangi intervensi militer dalam politik dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mengembalikan militer ke barak yang dalam arti luas kembali dan menuju ke profesionalisme militer.
- 4 Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menuai kritik usai mengumbar pernyataan mengenai multifungsi ABRI. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Arya menyebut pernyataan Agus tersebut merupakan pandangan yang salah dan keliru. "*Mengingat, Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi, harus ada pemisahan antara domain sipil dan domain militer,*" ujar Dimas, dikutip dari siaran pers, Jumat (Kompas, 7/6/2024). Dimas menjelaskan, militer sesuai dengan hakikat keberadaannya dididik, dibiayai dan dipersiapkan untuk menghadapi peperangan, bukan untuk mengurus urusan sipil yang orientasinya pelayanan publik.
- 5 Harold Crouch (1999) menulis bahwa di tahun 1968, terdapat 17 Gubernur (71%) yang merupakan anggota militer. Pasca-Pemilihan Umum (Pemilu) 1971, hanya ada empat dari total 26 provinsi (15%) yang memiliki gubernur berlatar belakang sipil (David Setiawan dkk. *Global & Policy* Vol.1, No.1, Januari - Juni 2013)



MILITER DI NEGARA KHILAFAH

Yuana Ryan Tresna

Militer merupakan elemen penting dalam sebuah negara. Militer berperan dalam menjaga keamanan negara dari ancaman luar negeri. Namun, keterlibatan militer secara langsung dalam pemerintahan akan menimbulkan bahaya tersendiri, terutama jika dominasi militer menggeser penguasa (khalifah dan para *hukkâm* lainnya) dalam peran pemerintahan yang seharusnya mengedepankan pelayanan (*ri'âyah*) kepada umat dalam konteks politik dalam negeri dan visi jihad dalam konteks politik luar negeri. Dalam Negara Khilafah, Islam telah mengatur dengan jelas relasi antara militer dalam pemerintahan.

Bahaya Jika Militer Memiliki Kendali dalam Pemerintahan

Politik dalam Islam diartikan sebagai “pengurusan (*ri'âyah*) urusan umat, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pengurusan itu dilakukan oleh negara dan umat. Negara melaksanakan pengurusan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi negara dalam melakukan pengurusan tersebut.”¹

Definisi ini menegaskan bahwa politik dalam pandangan Islam bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah untuk mengurus urusan umat (*ri'âyah syu'ûn al-ummah*). Negara

(Khilafah) mengurus secara langsung, sedangkan umat memiliki peran dalam melakukan kontrol dan pengawasan atas penguasa.

Secara teknis, pengurusan tersebut dilakukan oleh para *hukkâm*, yakni penguasa yang berhak mengadopsi hukum dan mengurus umat secara praktis. Termasuk kategori *hukkâm* adalah *Khalifah* (kepala negara), *mu'aawin tafwîdh* (pembantu khalifah dalam urusan pemerintahan), *wali* (penguasa di level provinsi) dan *'âmil* (penguasa di level kota). Adapun militer tidak masuk dalam kategori *hukkâm*.

Beberapa bahaya jika militer memiliki kendali dalam pemerintahan antara lain sebagai berikut:

Pertama, pendekatan militer tidak relevan dalam melakukan *ri'âyah* kepada umat. Pemerintah dalam menjalankan politik dalam negeri membutuhkan pendekatan politik yang penuh kebijaksanaan dan pengurusan kemaslahatan umat. Militer memiliki pola pikir yang khas, yaitu orientasi pada kekuatan, komando, ketaatan mutlak serta orientasi pada peperangan dan pertahanan. Pola pikir ini sangat efektif di medan perang. Akan tetapi, pola ini akan berbahaya jika diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan yang bertugas

mengatur urusan dalam dan luar negeri. Hal itu karena militer cenderung melihat segala sesuatu dari perspektif ancaman dan kekuatan, yang dapat mengarah pada pendekatan represif dalam mengelola negara.

Kedua, sejarah telah membuktikan bahwa negara yang berubah menjadi militeristik karena oleh dominasi militer dalam pemerintahan. Hal ini menyebabkan negara dijalankan dengan cara-cara represif, penuh hegemoni, tirani; serta mengabaikan kesejahteraan, proses politik dan partisipasi publik. Jika hal itu terjadi, berarti hakikat pemerintahan dan kekuasaan yang melayani akan lenyap. Oleh karena itu, para militer dan perangkat kemiliteran tidak boleh memiliki peran apa pun di dalamnya. Mereka harus berada di bawah kendali penguasa (Khalifah).²

Dalam Negara Khilafah, karena militer bukan penguasa, maka militer harus tegak lurus di bawah kendali Khalifah sebagai penguasa. Para khalifah sejak masa *Khulafaur Rasyidin* menegaskan posisi militer sebatas pelaksana kebijakan peperangan, bukan pengambil keputusan pemerintahan di dalam negeri dan arah politik luar negeri. Sebagai contoh, Khalifah Umar bin al-Khatthab ra. dikenal sangat hati-hati dalam menjaga keseimbangan peran militer dalam pemerintahan. Ia menunjuk para panglima militer seperti Khalid bin Walid, namun tetap menempatkan mereka di bawah kendali Khalifah.

Ketiga, membiarkan pertimbangan kemiliteran mendominasi keputusan politik luar negeri, sebagaimana dilakukan sebagian khalifah pada masa lalu, mengakibatkan terhentinya aktivitas mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Hal itu pernah terjadi pada fase kedua masa Abbasiyah dan akhir masa Utsmaniyah. Pembebasan (*futūhāt*) Islam di negeri Romawi berhenti pada perbatasan Turki dari sisi Syam, dan di Eropa Barat mundur dari Prancis, dan berhenti pada perbatasan

Spanyol. Pada masa Utsmaniyah, pada awalnya ada opini umum di Eropa bahwa tentara Islam tidak terkalahkan. Namun, ketika pertimbangan-pertimbangan kemiliteran menguasai politik luar negeri, sebagai akibat dari revolusi industri yang terjadi di Eropa pada abad 18 M, ekspansi Islam berhenti, menyusut dan berakibat pada penghancuran menyeluruh terhadap kekuasaan Islam.³

Keempat, dapat memberikan jalan kepada militer untuk melakukan kudeta pada penguasa yang sah. Hal itu karena mereka merasa sebagai pihak satu-satunya yang memiliki kekuasaan. Lalu mereka menyerang penguasa dan merampas kekuasaan dari tangannya. Karena itu bahaya besar bagi penguasa yang memberikan peran kepada perangkat kemiliteran dan para militer dalam pemerintahan. Hal ini telah terjadi pada masa Abbasiyah dan pada masa Utsmaniyah. Sebagian khalifah lemah di hadapan militer. Lalu dengan mudah mereka mengubah atau menjadikan para khalifah tersebut sebagai alat kepentingan mereka. Akibat dari semua itu adalah kemunduran yang terjadi dalam pemerintahan Negara Islam pada era tersebut.⁴

Kelima, mengakibatkan lenyapnya eksistensi umat dan negara. Eksistensi umat adalah kumpulan manusia, dengan konsep-konsep (*mafāhīm*), standar-standar (*maqāyis*) dan keyakinan-keyakinan (*qanā'ât*). Adapun eksistensi negara adalah kumpulan manusia yang memiliki otoritas kekuasaan yang disertai kumpulan *mafāhīm*, *maqāyis*, *qanā'ât*. Oleh karena itu, jika militer mengambil-alih kekuasaan karena bujukan negara asing, maka mereka akan tersusupi oleh *mafāhīm*, *maqāyis*, dan *qanā'ât* yang bukan milik negara Islam. Dengan semua itu, kerusakan akan menyusup ke dalam institusi negara, dan selanjutnya ke dalam eksistensi umat.⁵

Bukti nyata akan bahaya kelima ini adalah apa yang terjadi pada akhir masa Utsmaniyah,



dalam bentuk menyusupnya kerusakan ke dalam institusi negara dan umat, yang berakhir pada hilangnya eksistensi Negara Islam dan umat Islam. Pada akhir masa Utsmaniyah, kedutaan-kedutaan negara-negara kafir di Istanbul mempengaruhi militer sehingga mulailah *mafâhîm*, *maqâyis*, *qanâ'ât* selain Islam menyusup ke dalam perangkat negara.

Pandangan Islam tentang Relasi Sipil dan Militer

Islam memisahkan dengan jelas antara pemerintahan sipil (para penguasa/*hukkam*) dan militer. Sistem militer ditetapkan untuk pertahanan negara, perlindungan dari ancaman musuh, jihad di jalan Allah, serta menyebarkan dakwah Islam. Beberapa prinsip dasar dalam pengaturan militer adalah sebagai berikut:

Pertama, khalifah memiliki kepemimpinan atas militer. Makna kepemimpinan khalifah terhadap militer adalah bahwa Khalifah sendiri yang merancang politik (kebijakan) yang berkaitan dengan pembentukan militer, persiapannya dan pelaksanaan tugasnya, yaitu berperang. Khalifah pula yang melakukan pengawasan langsung atas penerapan politik tersebut. Karena itu Khalifah sendirilah yang merancang seluruh politik kemiliteran dan politik perang yang sifatnya internal dan eksternal.⁶

Kedua, politik luar negeri Khilafah tidak mengacu hanya pada pertimbangan militer. Khilafah jelas harus membangun kekuatan militer. Namun, ini tidak berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan kemiliteran mendominasi politik luar negeri negara. Perangkat kemiliteran tidak memiliki pengaruh dalam politik luar negeri Khilafah. Hal itu karena pendapat militer adalah pendapat kalangan profesional dalam bidang tertentu. Pendapat yang muncul dari mereka yang tugasnya adalah menjamin keunggulan-keunggulan kemiliteran bagi negara jika terjadi perang dengan negara lain. Pertimbangan militer dalam hal

ini dikategorikan sebagai nasihat atau masukan dalam perkara teknis saja.⁷

Merupakan sebuah bahaya jika pertimbangan kemiliteran menguasai politik luar negeri. Pertimbangan kemiliteran harus tetap diletakkan di bagian akhir politik luar negeri negara. Bahkan pertimbangan kemiliteran harus dijauhkan agar tidak mempengaruhi Khalifah saat dia menggariskan politik luar negerinya.

Ketiga, politik luar negeri negara Khilafah didasarkan pada kekuatan spiritual (*rûhiyyah*), maknawi (*ma'nawiyah*), manuver politik dan pembangunan opini umum, bukan didasarkan pada aspek kemiliteran yang bersifat materi. Karena itu pertimbangan kemiliteran harus tetap diletakkan di bagian belakang politik luar negeri dan menjadi subordinat di dalam politik luar negeri. Kekuatan spiritual harus tetap dipertimbangkan terlebih dulu, lalu kekuatan maknawi. Manuver-manuver politik dan kecerdikan politik juga hendaklah memiliki kedudukan penting dalam pertimbangan politik luar negeri.⁸

Keempat, militer dalam Khilafah bertugas menjaga pertahanan luar negeri, melaksanakan jihad dalam rangka *futûhât*, dan menyebarkan dakwah Islam. Adapun keamanan dalam negeri menjadi tugas polisi (*syurthah*) yang berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (*Dâ'irah al-Amn ad-Dâkhili*). Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari dituturkan, "*Qais bin Saad, ketika itu berada di sisi Nabi saw., layaknya kepala polisi dengan amir (kepala negara).*"

Qais bin Saad di sini adalah Qais bin Saad bin 'Ubadah al-Anshari al-Khazraji.

Polisi dan tentara memiliki fokus yang berbeda. Sebagai alat kekuasaan untuk menjaga keamanan dalam negeri, keberadaan polisi fokus pada tindakan yang dianggap bisa mengancam keamanan dalam negeri.⁹ Dalam kondisi genting, polisi bisa meminta bantuan militer, namun tetap di bawah komando

Khalifah. Misal dalam menghadapi kelompok separatis bersenjata yang menguasai tempat strategis, atau merupakan milisi yang tidak bisa diatasi oleh polisi, maka Departemen Keamanan Dalam Negeri bisa meminta kepada Khalifah untuk menerjunkan satuan militer.

Kelima, militer dalam Negara Khilafah ada dalam departemen tersendiri, yaitu Departemen Peperangan (*Dâ'irah al-Harbiyyah*) yang dipimpin oleh *Amîr al-Jihâd*. Amirul Jihâd ini diangkat oleh Khalifah dan langsung bertanggung jawab kepada Khalifah. Dengan demikian, posisi militer tetap di bawah kendali kepala negara, bukan sebagai pengambil kebijakan dalam pemerintahan.¹⁰

Disebut amirul jihad karena ia memimpin sebuah departemen yang terkait erat dengan semua urusan jihad.¹¹ Selain itu, karena Rasulullah saw. menyebut komandan pasukan dengan sebutan amir. Ibn Saad telah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«أَمِيرُ التَّائِسِ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَإِنْ قُتِلَ فَلْيَرْتَضِ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ رَجُلًا فَلْيُجْعَلُوهُ عَلَيْهِمْ»

Pemimpin (amir) Pasukan (Mu'tah) adalah Zaid bin Haritsah. Jika Zaid gugur maka (digantikan oleh) Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur maka (digantikan oleh) Abdullah bin Rawahah. Jika Abdullah gugur maka hendaklah kaum Muslim memilih salah seorang laki-laki di antara mereka, lalu ia dijadikan sebagai pemimpin (amir) mereka.¹²

Dengan demikian, departemen ini merupakan instansi Negara Khilafah Islam yang menangani semua urusan terkait dengan angkatan bersenjata, seperti pasukan, logistik, persenjataan, peralatan, amunisi dan sebagainya; menangani akademi-akademi militer, misi-misi militer, pemikiran Islam (tsaqâfah Islamiyah) dan pe-

ngetahuan umum yang diperlukan bagi tentara; serta menangani segala hal yang berhubungan dengan peperangan dan persiapannya. Termasuk dalam wewenang departemen ini adalah menyebarkan mata-mata (intelijen) untuk mata-mata kaum *kafir harbi*; juga membentuk lembaga yang melaksanakan misi intelijen ini di bawah wewangnya.¹³

Peran Strategis Militer di Dalam Islam

Militer dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Di antara peran strategis tersebut adalah:

Pertama, penjaga utama negara dan perbatasan. Militer dalam Khilafah bertugas menjaga perbatasan negara dari serangan musuh. Inilah yang disebut dengan konsep *ribâth*. Keutamaan *ribâth* sangat agung dan pahalanya sangat besar. Karena *ribâth* adalah perlindungan terhadap kaum Muslim dan kehormatan mereka, serta kekuatan bagi penduduk tapal batas dan para pejuangnya. *Ribâth* adalah pokok jihad sekaligus cabangnya¹⁴

Terdapat beberapa nas yang menyebutkan keutamaan *ribâth*. Rasulullah saw. bersabda:

«رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ»

Ribâth (penjagaan perbatasan) sehari semalam lebih baik dari puasa dan shalat malam selama sebulan (HR Muslim dan an-Nasa'i).

Hadis ini menunjukkan keutamaan *ribâth* (penjagaan perbatasan) dalam Islam. Sepanjang sejarah Khilafah, militer ditempatkan di pos-pos perbatasan strategis untuk mencegah serangan musuh dan menjaga stabilitas wilayah.

Kedua, ujung tombak dalam *futûhât*. *Futûhât* (pembebasan atau penaklukan) adalah bagian dari politik luar negeri Negara Khilafah. Militer menjadi alat utama dalam pembebasan negeri-negeri lain yang terkategori



dâr al-kufr dan penyebaran dakwah. Misalnya, pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid pada masa Abu Bakar berhasil membebaskan wilayah Syam dan Irak. Fakta ini berlangsung dalam sejarah keemasan Khilafah Islam.

Memulai jihad dalam rangka *futûhât* adalah *fardhu kifâyah*. Jika musuh menyerang maka menjadi *fardhu 'ayn* bagi orang yang diserang dan *fardhu kifâyah* bagi yang lainnya. Fardhu tersebut tidak akan gugur sampai musuh dapat diusir dan tanah Islam dapat dibersihkan dari kekejian musuh. Makna keberadaan jihad sebagai *fardhu kifâyah* untuk memulai jihad adalah bahwa kita harus memulai menyerang musuh, meskipun musuh tidak memulainya. Jika tidak seorang pun di antara kaum Muslim yang memulai *futûhât* pada masa tertentu, maka semuanya berdosa karena meninggalkan jihad itu.¹⁵

Jihad yang bersifat ofensif ini adalah langkah terakhir setelah sebelumnya mereka diseru untuk masuk Islam atau tunduk pada kekuasaan Islam.

Ketiga, membebaskan negeri-negeri Islam yang dijajah. Sejak awal, Khilafah bertanggung jawab atas pembebasan negeri-negeri Islam yang terjajah. Contoh sejarah yang monumental adalah pembebasan Baitul Maqdis oleh Shalahuddin al-Ayyubi. Begitu pula upaya Khilafah Utsmaniyah dalam melawan kolonialisme Eropa di berbagai front. Dalam kasus kontemporer, ketika Palestina dalam pendudukan Israel, maka sebenarnya ini tanggung jawab penguasa negeri Islam untuk menggerakkan pasukan militernya untuk mengusir penjajah Israel dari tanah Palestina yang diberkahi.

Penutup

Militer dalam sistem Khilafah memiliki posisi strategis, namun terbatas pada fungsi jihad, pertahanan luar negeri dan penjagaan perbatasan. Islam menolak militerisme dalam pemerintahan Khilafah. Ini menegaskan bah-

wa kepemimpinan politik harus tetap berada di tangan khalifah dan para penguasa pembantu khalifah. Realitas sejarah memang sempat terjadi pasang-surut. Namun, dalam masa keemasannya, telah membuktikan bahwa Khilafah sukses menjaga keseimbangan ini, menghindari dominasi militer dalam pemerintahan, sekaligus menorehkan kemenangan gemilang di berbagai medan jihad.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

Penulis adalah Direktur Pusat Pendidikan Hadits Ma'had Khadimus Sunnah Bandung.

Catatan kaki:

- 1 Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *Muqaddimah al-Dustur*, (Libanon: Dar al-Ummah, 2010), Juz II, hlm. 177.
- 2 Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, (Libanon: Dar al-Ummah, 2003), Juz II, hlm. 163.
- 3 Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, Juz II, hlm. 161.
- 4 Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, Juz II, hlm. 163.
- 5 Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, Juz II, hlm. 164.
- 6 Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, Juz II, hlm. 155.
- 7 Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, Juz II, hlm. 157.
- 8 Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, Juz II, hlm. 161.
- 9 Lihat Atha' bin Khalil, *Ajhizah Daulah al-Khilafah fî al-Hukm wa al-Idarah*, (Libanon: Dar al-Ummah, 2005), hlm. 95-104.
- 10 Lihat Atha' bin Khalil, *Ajhizah Daulah al-Khilafah fî al-Hukm wa al-Idarah*, hlm. 86.
- 11 Lihat Abdul Qadim Zallum, *Nizham al-Hukm fî al-Islam*, (Libanon: Dar al-Ummah, 2002), hlm. 141.
- 12 Lihat Ibnu Sa'ad, *al-Thabaqat al-Kubra'*, Juz II, hlm. 128.
- 13 Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *Muqaddimah al-Dustur*, hlm. 203; Atha' bin Khalil, *Ajhizah Daulah al-Khilafah*, hlm. 86; Abdul Qadim Zallum, *Nizham al-Hukm fî al-Islam*, hlm. 144.
- 14 Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, Juz II, hlm. 174.
- 15 Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, Juz II, hlm. 150.

FURQÂN



Catatan Dakwah
H.M. Ismail Yusanto

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾

Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya al-Quran diturunkan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu, juga sebagai pembeda.

(QS al-Baqarah [2]: 185).

++++

Imam al-Qurtubi menafsirkan *al-furqân* dalam ayat 185 di atas sebagai segala sesuatu yang membedakan antara perkara *haq* dan perkara batil (*maa faraqa bayna al-haq wa al-bâthil*). Imam ath-Thabari dalam *Jâmi' al-Bayân* menafsirkan kata tersebut sebagai memisahkan antara yang *haq* dan yang batil (*al-fashl bayna al-haq wa al-bâthil*).

Jelaslah, sebagai *al-furqan* (pembeda), al-Quran memberikan petunjuk untuk memisahkan yang *haq* dan yang batil, halal dan haram; baik dan buruk; benar dan salah. Keduanya memang harus dipisahkan karena yang *haq* tidak dapat dicampuri dengan yang batil. Begitu pula, yang halal tidak dapat bercampur dengan yang haram.

Makna *al-furqân* juga mengisyaratkan betapa sempurnanya al-Quran sebagai *hud[an]* (petunjuk). Ibarat lampu lalu lintas, al-Quran memberikan petunjuk dengan sangat jelas, kapan manusia harus waspada (lampu kuning), kapan harus melaksanakan syariah (lampu hijau) dan kapan pula harus berhenti (lampu merah). Dengan cara inilah manusia dijamin akan selamat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Seperti disebut dalam al-Quran Surah Thaha ayat 123, bahwa siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Inilah jalan kehidupan (*way of life*) yang benar, yang meski diturunkan 1400 tahun lalu, terbukti ke-

mampuan membedakan tetap sangat relevan dan diperlukan, sesuatu yang hari ini justru menjadi masalah besar pada sebagian manusia di muka bumi ini.

Lihatlah, ketika manusia mengabaikan al-Quran, sekadar membedakan gender yang semestinya tak terlalu sulit pun kini menjadi perkara rumit. Di Barat hari ini, gender bukan hanya ada dua: laki-laki (*he*) dan perempuan (*she*), tetapi empat. Selain lelaki dan perempuan, ada dua lagi, yaitu laki – perempuan (*he-she*) dan perempuan lelaki (*she – he*). Di Thailand lebih kacau lagi. Gender di sana ada 18!

Tak berhenti di situ, kekacauan dalam memandang gender membawa manusia pada kekacauan dalam melihat perkawinan. Menurut mereka, perkawinan tak harus dilakukan dengan lawan jenis (heteroseks), tetapi juga bisa dengan sejenis (homoseks), baik antar lelaki maupun antar perempuan.

Ketika Allah menyatakan bahwa siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya tidak akan sesat dan tak akan celaka seperti yang disebut dalam QS Thaha ayat 123, maka bisa dipastikan siapa saja yang tak mengikuti petunjuk Allah itu pasti akan sesat, dan karenanya pasti akan celaka. Fakta membuktikan hal itu. Misalnya, bagaimana hari ini telah terjadi kekacauan luar biasa dalam soal pernikahan. Apalagi ketika makin deras tuntutan bagi legalisasi pernikahan sejenis. Ketika dikatakan bahwa pernikahan mestinya harus dilakukan dengan lawan jenis agar bisa dilahirkan anak keturunan, mereka dengan ringan menyanggah, siapa yang mengharuskan pernikahan dengan lawan jenis, dan siapa pula yang mewajibkan pernikahan harus menghasilkan anak?

Hubungan homoseksualitas juga terbukti berdampak sangat buruk, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik, banyak penyakit yang muncul pada mereka yang acap melakukan seks

anal (Sexually Transmitted Disease/STD). Di antaranya HIV, herpes simplex, hepatitis B dan hepatitis C. Selain itu, juga memunculkan penyakit karena infeksi bakteri seperti gonorea (kencing nanah), khlamidia, syphilis, dan shigelosis. Pasien dengan infeksi bakteri itu bisa mengalami diare berdarah dan berlendir, luka-luka terinfeksi, bahkan timbul bisul dan radang di seputar dubur dan rektum. Akibat paling berbahaya dari seks anal adalah terjadinya kanker anus. Juga fisura anal atau anus robek, wasir, kutil dubur, iritasi usus besar, nyeri perut dan nyeri panggul kronis, gangguan otot anus, seperti buang kotoran di celana (*encopresis*) atau nyeri saat buang air besar.

Dokter Dewi Inong, spesialis kulit dan kelamin, Ketua Yayasan Peduli Sahabat, yang sangat berpengalaman puluhan tahun menangani pasien dari kalangan LGBT menjelaskan, anus atau dubur memang tidak dipersiapkan untuk menerima masuknya benda asing dari luar, termasuk penis. Masuknya benda asing secara paksa melalui dubur dan tanpa pelumas akan menyebabkan dinding anus dan bagian poros usus (rektum) rentan mengalami luka. Ketika luka sudah timbul, maka area tersebut rentan mengalami infeksi. Feses sebelum dikeluarkan memang ditampung di situ. Ini menjadi sumber infeksi, kuman, jamur dan bakteri.

Penggunaan pelumas memang membuat dubur menjadi lebih lunak untuk penetrasi, namun bukan berarti risiko kesehatan berkurang. Begitu pula jika pelaku menggunakan kondom, tetap saja ada risiko karena kondom hanya melindungi 26% saja, dan anus tidak siap untuk menerima benda asing selain kotoran keluar. Tidak hanya itu, luka di anus bisa mengakibatkan peradangan kronis. Jika klep di anus terus-menerus rusak, maka akan terjadi inkontinensia, di mana air besar akan keluar begitu saja tanpa kendali, dan baunya busuknya akan tercium dari jarak 1 – 2 meter. Segitu rusaknya, ada satu pasien dokter Inong yang merupakan penaja seks pria di kawasan Ancol, Jakarta mengaku ketika melakukan sodomi itu, pasangannya malah mengeluarkan kangkung dari dalam anusnya.

Ini baru dari satu aspek saja sudah terlihat begitu kacaunya. Belum aspek lainnya. Di bidang ekonomi keuangan, misalnya, orang saat ini tak lagi bisa membedakan antara riba dan jual beli (*al-bai'*). Uang yang semestinya ha-

nya diperlakukan sebagai alat tukar (*medium of exchange*), ini hari diperlakukan juga sebagai komoditas, dengan menarik bunga dalam peminjaman dan penukaran. Akibatnya, meski ekonomi bisa terus tumbuh, tetapi tidak pernah stabil. Menurut Dr. Abdul Muhsin Thahir Sulaiman dalam *'Ilâj al-Musykilah al-Iqtishâdiyyah bi al-Islâm*, akibat pengaruh riba, pertumbuhan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis itu bersifat siklik. Jikapun tampak tumbuh, sesungguhnya ia sedang menuju puncak untuk kemudian jatuh lagi.

Selain tidak stabil, sistem ekonomi ribawi juga sangat tidak adil. Mereka yang kaya, yang punya dana besar, hanya dengan membungakan uangnya, kekayaannya dengan mudahnya terus bertambah. Sebaliknya, yang miskin, karena tak mempunyai, untuk bisa berusaha, harus meminjam dana dengan bunga yang berlipat ganda.

++++

Maka dari itu, salah satu buah terpenting dari puasa Ramadhan, selain pengampunan dosa, peningkatan takwa, mestinya adalah juga peningkatan kelekatan kita pada al-Quran. Caranya tak lain dengan memfungsikan al-Quran sebagaimana mestinya, sebagai *hud[an]* (petunjuk) dan *furqân* (pembeda). Bukan hanya dalam kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di tengah situasi negeri terus didera berbagai persoalan, seperti soal korupsi dan kriminalitas yang makin menjadi-jadi, kemiskinan yang makin menyayat hati, ketidakadilan hukum, ekonomi dan politik serta kezaliman terjadi di mana-mana yang membawa negeri ini kepada kegelapan, mestinya al-Quran dijadikan jawabannya. Inilah satu-satunya penawar lara yang memang diturunkan Allah. Dialah Tuhan Yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan; untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya (*liyukhrija an-nâs min adz-dzulûmât ilâ an-nûr*), seperti tersebut dalam QS Ibrahim ayat 1. Tanpa itu, kita akan terus berjalan berputar-putar tak tentu arah; melakukan yang mestinya ditinggalkan dan sebaliknya, meninggalkan apa yang mestinya dilakukan. Inilah yang membuat kehidupan makin gelap. Inilah akibat dari abainya terhadap *hud[an]* dan *furqân* itu.

Allâhu a'lam bi ash-shawâb. []

DAMPAK TRUMP 2.0: INDONESIA DI PERSIMPANGAN EKONOMI DUNIA

Kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2025 telah menciptakan gelombang ketidakpastian di panggung ekonomi global. Dengan mengusung kembali slogan “*Make America Great Again*” (MAGA), Trump menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang berfokus pada kepentingan domestik AS. Di antara kebijakannya adalah penerapan kembali kebijakan proteksionisme yang ditandai dengan kebijakan tarif tinggi, pemotongan pajak, pengusiran tenaga kerja ilegal dan efisiensi anggaran. Kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi perekonomian AS, tetapi juga memiliki efek domino terhadap ekonomi dunia, termasuk Indonesia, negara berkembang yang bergantung pada perdagangan internasional.

Salah satu pilar utama kebijakan ekonomi Trump adalah proteksionisme yang bertujuan melindungi industri dalam negeri AS yang merosot cukup tajam dalam persaingan global. Selama kampanye Pemilu 2024, Trump berjanji akan menerapkan tarif sebesar 10-20% untuk semua barang impor yang masuk ke AS. Cina bahkan diancam dengan dengan tarif lebih yang lebih ekstrem hingga 60%, bahkan hingga 200% untuk barang tertentu seperti kendaraan yang diproduksi di luar ne-

geri oleh perusahaan AS. Kebijakan ini merupakan kelanjutan pendekatan yang ia terapkan pada masa jabatan pertamanya (2017-2021), yang menyebabkan perang dagang AS-Cina.

Kebijakan tarif tersebut dirancang untuk mengurangi defisit perdagangan AS, mendorong produksi domestik dan menciptakan lapangan kerja dalam negeri. Meski demikian, langkah tersebut juga memicu reaksi berantai di pasar global. Negara-negara mitra dagang utama AS, seperti Cina, Uni Eropa, Kanada dan Meksiko, telah mulai melakukan kebijakan tarif balasan. Ketegangan perdagangan ini berpotensi mengulang dampak kebijakan pemerintah Trump periode pertama yang mengganggu rantai pasok global, meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi di berbagai belahan dunia.

Secara tersirat kebijakan Trump tersebut merupakan strategi yang digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan keuntungan bagi AS. Karena itu, hasilnya akan bergantung pada respon negara lain, terutama dari blok perdagangan utama seperti Cina dan Uni Eropa, yang kemungkinan akan melakukan pembalasan yang terarah sambil berupaya bernegosiasi.

Di bidang anggaran, pemerintahan Trump telah mencanangkan program pemangkasan

dengan membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk. Target ambisius mereka adalah memangkas hingga \$2 triliun dari total anggaran federal sebesar \$6,8 triliun.

Namun, efisiensi ini menghadapi tantangan. Pasalnya, lebih dari 80% pengeluaran federal terdiri dari program wajib atau secara politik sulit dipangkas, seperti Jaminan Sosial, Medicare, pertahanan, bunga utang, dan transfer ke negara bagian. Praktis hanya sekitar \$1,1 triliun pengeluaran diskresioner yang dapat menjadi target pemangkasan.

Kebijakan efisiensi Trump juga tampak pada kebijakannya yang mengurangi keterlibatan AS pada lembaga-lembaga internasional. Trump memulai penarikan AS dari WHO pada masa jabatan keduanya sejak Januari 2025. Dia menganggap WHO tidak efektif dalam menangani krisis kesehatan global, seperti pandemi. Dia pun menilai organisasi ini terlalu didominasi oleh pengaruh negara tertentu, khususnya Cina, yang dianggap merugikan kepentingan AS. Selain itu, Trump telah menarik AS dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) dan menghentikan pendanaan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang dia anggap cenderung berpihak ke Palestina ketimbang Israel, selain tidak efisien. Ia juga telah menghentikan kontribusi keuangan untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang secara signifikan memangkas bantuan luar negeri dari negara itu.

Berbagai kebijakan itu antara lain untuk memangkas defisit yang menjadi sebab pembengkakan utang Pemerintah AS, yang saat ini melebihi \$34 triliun. Pada tahun fiskal 2025, Kantor Anggaran Kongres memproyeksikan total utang sebesar \$36,4 triliun dengan pembayaran bunga bersih sekitar \$952 miliar. Biaya yang meningkat ini—mencapai sekitar 3,2% dari PDB—diperkirakan akan melampaui anggaran utama lainnya seperti Medicare (\$944 miliar) dan pertahanan (\$870 miliar).

Keadaan tersebut telah membatasi fleksibilitas ekonomi AS dan membebani generasi mendatang.

Trump juga berupaya mengamankan sumber daya strategis, meningkatkan kontrol atas jalur perdagangan global dan menekan negara-negara mitra untuk memberikan keuntungan lebih besar bagi AS. Beberapa di antaranya adalah usulan akuisisi Greenland (Denmark) yang kaya sumber daya mineral, tekanan tarif terhadap Kanada dan Meksiko, hingga tuntutan peningkatan kontribusi pertahanan NATO.

Selain itu, Trump juga berambisi mengurangi ketergantungan pada komoditas mineral kritis seperti litium, nikel dan kobalt yang vital untuk teknologi canggih, energi terbarukan dan kendaraan listrik. Karena itu Trump mendesak Presiden Ukraina, Zelensky, untuk memberikan akses kepada AS untuk menguasai mineral kritis di negara tersebut sebagai syarat dukungan untuk menyelesaikan konflik dengan Rusia.

Langkah itu sejalan dengan Laporan Komite Terpilih Pemerintah AS pada Desember 2023 yang menyoroti kelemahan posisi AS dalam hal mineral tanah jarang dan mineral kritis karena ketergantungan pada Cina. Menurut laporan itu, kegagalan mengatasi masalah ini dapat menyebabkan “produksi pertahanan AS akan terhenti dan memutus rantai manufaktur teknologi canggih lainnya.” Karena itu laporan itu menegaskan perlunya diversifikasi sumber pasokan untuk menjaga keamanan nasional dan daya saing teknologi.¹

Implikasi

Dampak kebijakan Trump tersebut terhadap ekonomi dunia cukup signifikan. *Pertama*: Rantai pasok barang secara global berpotensi terganggu. AS sebagai salah satu pasar terbesar di dunia, kebijakan protektif Trump dapat mengubah dinamika perdagangan internasional. Ketika tarif diterapkan, negara-negara eksportir seperti Cina menghadapi penurunan permintaan dari AS, memaksa perusahaan

multinasional mencari alternatif lokasi produksi. Hal ini menjadi peluang bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, meskipun juga berarti potensi harga yang lebih mahal bagi konsumen global akibat meningkatnya biaya pengadaan bahan baku yang bersumber dari Cina.

Kedua: Volatilitas atau ketidakstabilan pasar keuangan berpotensi meningkat akibat ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan Trump. Dalam kondisi itu, dolar AS akan cenderung menguat karena investor mencari aset aman di tengah gejolak global, sementara mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, mengalami tekanan. Selain itu, kebijakan pemotongan pajak besar-besaran yang diusulkan Trump dapat memperlebar defisit fiskal AS. Penarikan utang besar-besaran akan mendorong kenaikan suku bunga obligasi AS sehingga menarik aliran modal kembali ke AS dari negara-negara berkembang.

Ketiga: Ketidakstabilan pasar keuangan ditambah dengan balasan negara-negara mitra AS berpotensi menimbulkan resesi alias penurunan pertumbuhan ekonomi global. Organisasi Perdagangan Dunia telah mengingatkan bahwa eskalasi konflik perdagangan dapat memangkas pertumbuhan PDB global hingga lebih dari 0,25% dan AS mencapai 0,75%². Negara-negara yang bergantung pada ekspor, seperti Jerman, Korea Selatan dan Jepang akan merasakan dampak signifikan. Ini pada gilirannya dapat memengaruhi permintaan komoditas dari negara-negara produsen seperti Indonesia.

Keempat: Potensi pergeseran kekuatan ekonomi akibat kebijakan isolasionis Trump. Pengurangan keterlibatan AS dalam forum multilateral dapat memperkuat pengaruh negara-negara lain, termasuk memperkuat berbagai aliansi ekonomi alternatif seperti kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan), yang kini juga melibatkan Indonesia sebagai anggota. Kebijakan Trump tersebut juga berpotensi mengurangi *soft power* AS. Ini akan mendorong sekutu tradisional seperti

negara-negara Eropa mencari mitra lain. Hal ini pun membuka celah bagi negara-negara pesaing seperti meningkatnya pengaruh Cina dan Rusia untuk mengisi kekosongan pengaruh AS.

Cina, misalnya, dapat memperluas dominasinya di organisasi seperti WTO atau meningkatkan inisiatif seperti Belt and Road. Rusia berpeluang memperkuat aliansi di kawasan Eurasia untuk menandingi NATO yang berpotensi melemah setelah dukungan dari AS menyusut.

Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tidak luput dari dampak kebijakan Trump. Dengan struktur ekonomi yang terbuka dan ketergantungan pada ekspor komoditas serta perdagangan dengan mitra utama seperti AS dan Cina, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang. Kebijakan proteksionisme Trump, misalnya, dapat menekan ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia ke AS senilai \$27,8 miliar pada 2023 meliputi tekstil (17% dari total), elektronik, alas kaki dan karet yang menyumbang surplus \$14,3 miliar. Jika Indonesia ikut terkena dampak kenaikan tarif maka biaya barang-barang ini di pasar AS akan ikut naik sehingga mengurangi daya saing harga dibandingkan produsen domestik atau yang bebas tarif.

Berbagai kebijakan Trump yang mengenakan tarif tinggi berpotensi menggerek inflasi di Amerika Serikat dan secara global. Peningkatan biaya impor akibat tarif tersebut akan mendorong kenaikan harga barang-barang konsumsi di pasar domestik AS, menciptakan tekanan inflasi yang signifikan. Dalam menghadapi tren inflasi yang meningkat, Federal Reserve kemungkinan akan merespon dengan menunda penurunan suku bunga yang telah diantisipasi, atau bahkan kembali menaikkan suku bunga acuan perbankan di negara tersebut.

Seperti pola yang telah berlangsung sebelumnya, suku bunga tinggi di AS akan menarik dana-dana investasi global masuk ke pasar Amerika Serikat. Investor akan tertarik pada

imbang hasil yang lebih tinggi dari instrumen keuangan AS sehingga meningkatkan arus modal masuk yang substansial. Konsekuensinya, nilai tukar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akan terdepresiasi secara signifikan. Dengan demikian, nilai tukar rupiah yang sudah berada di kisaran Rp 16.500 per USD akan semakin sulit untuk diperkuat kembali ke level yang lebih rendah.

Melemahnya rupiah tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap stabilitas harga dalam negeri. Biaya impor Indonesia, khususnya untuk kebutuhan strategis seperti minyak dan bahan baku industri, akan meningkat secara proporsional dengan depresiasi nilai tukar. Hal ini pada akhirnya akan mendorong inflasi domestik. Menghadapi tekanan inflasi dan depresiasi rupiah yang berlanjut, BI hampir dapat dipastikan akan merespon dengan menaikkan suku bunga acuan, yang akan berdampak pada peningkatan biaya pinjaman bagi pelaku usaha dan masyarakat. Kenaikan biaya modal ini berpotensi memperlambat aktivitas investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sektor energi dan komoditas Indonesia juga berpotensi terpengaruh dengan kebijakan Trump. Agenda pro-bahan bakar fosil Trump bisa meningkatkan ekspor batubara Indonesia. Namun, pencabutan subsidi kendaraan listrik dan kebijakan iklim di AS dapat mengurangi permintaan industri nikel Indonesia yang memasok 40% permintaan global (2024). Penurunan penjualan mobil listrik AS bisa menekan harga nikel yang tahun 2024 telah mengalami penurunan sebesar 30% akibat over produksi nikel dari Indonesia dan penurunan penjualan global.

Adopsi Islam sebagai Ideologi

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dengan berbagai potensinya perlu berbenah agar mampu menjadi negara kuat dan mampu menghadapi berbagai dinamika ekonomi global termasuk perubahan kebijakan ekonomi negara-negara besar seperti AS. Indonesia

harus merombak tatanan ekonomi kapitalisme yang rentan mengalami guncangan. Salah satunya adalah meninggalkan sistem Kapitalisme secara total. Bentuknya antara lain, menghapus sektor keuangan Kapitalisme baik perbankan, pasar modal dan pasar uang yang berbasis ribawi dan spekulasi dan mengadopsi sistem keuangan dan bisnis berbasis syariah seperti *syirkah mudhârabah* dan optimalisasi peran Baitul Mal dalam pembiayaan bisnis.

Indonesia juga perlu merombak sistem moneter yang diadopsi saat ini yang menganalkan sistem mata uang kertas (*fiat currency*) dengan beralih menggunakan standar emas dan perak. Indonesia juga harus mengelola sumber daya alamnya yang strategis seperti migas, batubara dan nikel, yang langsung dikelola oleh negara sehingga pendapatan negara menjadi lebih optimal dan tidak lagi diserahkan kepada investor swasta apalagi asing.

Sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia perlu melakukan aliansi dengan negara-negara Muslim lainnya untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di bawah satu payung politik Negara Khilafah Islam. Negara-negara Muslim memiliki berbagai sumber daya potensial baik SDM yang sangat besar, sumber daya alam yang dibutuhkan ekonomi dunia, serta posisi geografis yang strategis bagi jalur perdagangan dan investasi. Dengan kepemimpinan ideologi Islam yang kuat, Indonesia berpeluang besar menjadi kekuatan politik dan ekonomi global bersaing dan bahkan mengungguli negara-negara kapitalisme saat ini, termasuk AS.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [Muis].

Catatan kaki:

- 1 U.S. House of Representatives Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party, Critical Minerals and Materials: U.S. Supply Chain Vulnerabilities and Solutions (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, December 2023)
- 2 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Economic Outlook, Interim Report March 2025: Steering through Uncertainty (Paris: OECD Publishing, 2025), 17.

PUJIAN TERTINGGI BAGI PENOLONG AGAMA ALLAH

Tidaklah Allah swt menurunkan risalah *Dîn*-Nya melainkan untuk dimenangkan atas seluruh agama dan keyakinan. Allah SWT berfirman menegaskan:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

Dialah Tuhan Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkan agama itu atas semua agama meskipun kaum musyrik benci (QS *ash-Shaff* [61]: 9).

Visi agung ini tidaklah terealisasi melainkan dengan dakwah dan jihad yang ditegakkan oleh para pejuang Islam, dari kalangan da'i dan *ahl al-quwwah* (pasukan militer), yang mengibarkan panji-panji perjuangan Islam dalam dakwah dan jihad fi sabilillah. Merekalah golongan yang layak meraih *nashrul-Lâh* (pertolongan Allah) dalam firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong (agama) Allah, Dia pasti akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian (QS *Muhammad* [47]: 7).

Allah SWT mengawali seruan (*khithâb*) dalam ayat agung ini dengan seruan keimanan

kepada orang-orang beriman dengan cakupan luas; mencakup kalangan *ahl al-quwwah* (militer), agar mereka menolong tegaknya *DinulLâh*. Istimewanya, secara kiasan Allah menisbatkan pertolongan hamba-hamba-Nya kepada Diri-Nya. Padahal Allah Mahakuasa atas segala perkara. Dia tak membutuhkan pertolongan makhluk-Nya. Ini untuk menunjukkan betapa agungnya aktivitas menolong tegaknya *Dîn* Allah (lihat: QS *al-'Ankabût* [29]: 6).

Imam Abu Ja'far al-Nahhas (w. 338 H) dalam *I'râb al-Qur'ân* (4/119) menjelaskan bahwa ungkapan tersebut merupakan kiasan (*majâz*) yang disebutkan oleh Allah. Maksudnya adalah menolong Rasul-Nya, *Dîn*-Nya, syariah-Nya dan kelompok pembela *Dîn*-Nya (*hizbullâh*). Demikian sebagaimana ditegaskan pula oleh Imam ar-Razi dalam *Mafâtîh al-Ghaib* (8/42). Merekalah golongan di garda terdepan pada setiap celah benteng pertahanan Islam. Imam al-Marwazi (w. 294 H) dalam *As-Sunnah* menukil nasihat Imam al-Awza'i:

﴿مَا مِنْ مُسْلِمٍ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى ثَغْرَةٍ مِنْ ثَغْرِ الْإِسْلَامِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَّا يُؤْتَى الْإِسْلَامُ مِنْ ثَغْرَتِهِ فَلْيَفْعَلْ﴾

Tidaklah setiap Muslim itu, kecuali ia harus berdiri di depan benteng pertahanan dari benteng-benteng pertahanan Islam.

Karena itu siapa saja yang mampu agar Islam tidak (dihancurkan) datang dari arah bentengnya, maka lakukanlah!

Hal ini meniscayakan kaum Muslim, da'i dan *ahl al-quwwah* untuk merapatkan barisan, menguatkan keyakinan, serta menjalin ikatan pemikiran dan perasaan untuk meraih pujian tertinggi dari Allah Yang Mahaperkasa, sebagaimana firman-Nya:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا
كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ﴾

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (QS ash-Shaff [61]: 4).

Melebur Dua Potensi Kekuatan: Keyakinan dan Amal Perbuatan

Rib'i bin 'Amir r.a., salah seorang pejuang Islam mulia dan pemberani yang diutus oleh Panglima Jihad, Sa'ad bin Abi Waqqash ra., pernah menjumpai Rustum (pemimpin pasukan Persia), sebelum meletus Pertempuran al-Qadisiyyah (636 M). Rustum bertanya, "Apa tujuan yang mendorong kalian datang ke tempat ini?" Rib'i bin 'Amir ra. menegaskan:

لَقَدْ ابْتَعَثَنَا اللَّهُ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ
إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، وَمِنْ جُورِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ
الْإِسْلَامِ، وَمِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Sesungguhnya Allah telah mengirim kami untuk mengeluarkan hamba dari penyembahan kepada hamba menuju penyembahan kepada Tuhan para hamba semata; dari kezaliman berbagai agama

menuju keadilan Islam; dan dari dari kesempatan dunia menuju kelapangan dunia dan akhiratnya.

Untaian kalimat Rib'i ra. sarat dengan spirit keimanan dan kecintaan pada dakwah Islam. Benar-benar menonjol. Terpatrit dalam dada-dada setiap individu pasukan militer dari jajaran Sahabat Rasulullah saw. Menjadi spirit yang menonjol secara komunal. Tercatat dalam tinta emas sejarah Islam. Merekalah golongan yang Allah firmankan:

﴿وَكَايْنٍ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا
لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾

Berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut-(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai kaum yang sabar (QS Ali 'Imran [3]: 146).

Bukan sekadar tercermin dalam aspek ucapan dan perbuatan, tetapi juga tercermin dalam akhlak dalam berperang. Syariah Islam, dengan kemuliaan ajarannya, jelas mengharuskan pasukan kaum Muslim memerangi anak-anak, perempuan dan orangtua yang lemah tak bersenjata. Bahkan Islam pun menjauhi perbuatan *ghuluww*, yakni membalas kejahatan kaum *kuffaar* dengan kejahatan serupa yang bertentangan dengan syariah Islam. Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq ra., sebagai pemimpin, adalah teladan bagi militer kaum Muslim.

Dalam riwayat shahih dari an-Nasa'i, al-Baihaqi, diriwayatkan: dari 'Uqbah bin

Amir ra., bahwa 'Amru bin al-'Ash dan Syurahbil bin Hasanah ra., keduanya mengutus dirinya kepada Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq ra. membawa kepala Banan (salah seorang komandan Romawi). Ketika dihadapkan kepada Abu Bakar ra., beliau mengingkarinya. Uqbah kemudian menanggapi, "Wahai Khalifah Rasulullah saw., hal ini pula yang dilakukan mereka kepada kita." Abu Bakar ra. menjawab, "Apakah layak mengikuti tradisi Persia dan Romawi? Jangan bawa kepala. Cukup dengan surat dan beritanya saja!"

Sikap *bara'ah* (berlepas diri) dari segala pemikiran kufur dan tradisi jahiliyah kaum *kuffaar*, menjadi cerminan berpegang teguh pada *Dîn al-Islâm*, menjadi faktor utama kemenangan kaum Muslim, benarlah Umar bin al-Khatthab ra. yang bertutur:

«إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَنْ نَبْتَغِيَ الْعِزَّةَ
بِغَيْرِهِ»

Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Karena itu kami tak akan pernah mencari kemuliaan dengan selainnya.

Kekuatan iman ini didukung oleh amal perbuatan yang relevan. Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ
الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ
مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾

Persiapkanlah oleh kalian segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kalian miliki, juga pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang tidak kalian

ketahui, tetapi Allah mengetahui mereka (QS al-Anfal [8]: 60).

Allah SWT memerintahkan kaum Muslim, mempersiapkan segala potensi kekuatan yang cukup untuk menggetarkan musuh Allah dan kaum Muslim. Lafal *quwwah* dalam bentuk *ism nakirah* menunjukkan keluasan cakupan kekuatan militer yang dimaksud. Syaikh Ali al-Shabuni dalam *Shafwat at-Tafâsîr* menegaskan mencakup ragam jenis kekuatan yang bersifat materil maupun maknawi. Apa hikmahnya? Ditunjukkan kalimat *turhibûna bihi 'aduwallâh wa 'aduwwakum*, yakni agar cukup menggentarkan musuh Allah dan musuh kaum Muslim, bahkan musuh-musuh lain yang samar bagi kaum Muslim. Kekuatan ini adalah bagian dari apa yang dipuji Rasulullah saw. dalam hadisnya:

«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ
الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، إِحْرَضَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ
وَاسْتَعَانَ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجُزْ»

Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah 'Azza wa Jalla daripada Mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah (HR Muslim).

Sifat kekuatan dalam hadis ini tidak terbatas pada kekuatan fisik (*quwwat al-jism*), tetapi mencakup kekuatan iman (*quwwat al-'îmân*), ilmu (*quwwat al-'ilm*) dan jiwa (*quwwat al-nafs*).

Wallâhu a'lam. []



PERAN PENTING AHLUL QUWWAH DI DUNIA ISLAM

Dr. Muh. Kusman Sadik



iliten merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas suatu negara. Negara dengan militer yang kuat memiliki posisi tar lebih tinggi dalam hubungan internasional. Karenanya kekuatan militer sering digunakan sebagai alat diplomasi dalam menjaga kepentingan suatu negara di tingkat global.

Dalam Islam, sejak zaman Rasulullah SAW kekuatan militer atau *ahlul quwwah* telah menjadi faktor utama dalam melindungi dakwah, umat, dan wilayah negara Islam. Sebagaimana diketahui, pada masa awal dakwahnya Rasulullah telah menghadapi berbagai tantangan dari kaum Quraisy yang menolak ajaran tauhid.

Penolakan tersebut tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi juga ancaman fisik, boikot ekonomi, dan penganiayaan terhadap umat Muslim. Untuk itulah Rasulullah kemudian mencari dukungan dari para *ahlul quwwah*. Yakni para pemilik kekuatan, seperti para tokoh dan pemimpin kabilah/suku, agar dakwah Islam dapat berkembang dan terlindungi dari serangan musuh. Termasuk pula dalam rangka membangun kekuatan (negara) yang kemudian tegak di Madinah.

Negara Islam Madinah yang dibangun Rasulullah SAW tersebut kemudian dilanjutkan oleh para khalifah sesudah beliau. Dalam sejarahnya yang panjang Khilafah Islamiyah telah menjadikan militer sebagai salah satu penopang utama aktivitas dakwah Islam ke seluruh dunia. Sehingga sangat terkenal di masa itu bahwa politik luar negeri negara Khilafah adalah dakwah dan jihad.

Namun sejak runtuhnya Khilafah kondisi umat Muslim terus mengalami degradasi hingga saat ini. Umat ini terpuruk hampir di segala bidang termasuk pula di bidang keamanan. Sangat tragis, militer yang dulu diarahkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan umat Muslim itu kini justru digunakan oleh rezim sekuler di negeri-negeri Islam untuk menangkap dan membunuh para aktivis Muslim.

Peran Penting Menuju Tegaknya Khilafah

Tidak adanya penerapan Islam secara *kāffah* dalam kehidupan merupakan akar masalah umat Muslim saat ini. Sehingga solusi fundamentalnya adalah dengan kembali menegakkan syariah Islam secara *kāffah*. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan kecuali dalam institusi Khilafah Islamiyah. Metodenya ada-

lah melalui jalan umat (*thariqul ummah*) yang sadar karena dakwah disertai dengan meraih dukungan (*thalabun nushrah*) dari para pemilik kekuatan (*ahlul quwwah*). Prosesnya dilakukan berdasar basis pemikiran dan perjuangan politik yang damai.

Thalabun nushrah tersebut merupakan bagian dari metode (*thariqah*) dakwah Rasulullah SAW. Karena sebagai *thariqah* maka hal itu menjadi wajib bagi umat Muslim untuk mengikutinya, khususnya saat serangan terhadap dakwah makin keras. Rasulullah mulai mencari *nushrah* saat Abu Thalib meninggal. Saat itu masyarakat Makkah jumud dan tertutup di hadapan Rasulullah. Dengan meninggalkannya Abu Thalib, penyerangan Quraisy kepada Rasulullah makin sengit sampai pada tingkat yang belum pernah mereka lakukan semasa hidup paman beliau, Abu Thalib.

Jadilah perlindungan kepada Rasulullah menjadi lebih lemah daripada perlindungan pada masa Abu Thalib. Lalu Allah SWT mewahyukan kepada beliau untuk menyodorkan diri kepada kabilah-kabilah Arab untuk meminta perlindungan dan *nushrah* mereka. Agar beliau mampu menyampaikan wahyu Allah SWT dalam keadaan aman dan terlindungi. Imam Ibnu Katsir menyatakan di dalam *Sirah an-Nabawwiyah li Ibn Katsir* dari Ali bin Abi Thalib:

"Ketika Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk menyodorkan diri beliau kepada kabilah-kabilah Arab, beliau dan saya serta Abu Bakar keluar bersama beliau ke Mina hingga kami datang majelis-majelis orang Arab."

Saat itu sangat jelas bagi *ahlul quwwah* bahwa yang diminta dari mereka adalah melindungi Rasulullah dalam upayanya mendirikan entitas yang menerapkan hukum-hukum Allah SWT di tengah-tengah mereka. Artinya, mereka paham bahwa *nushrah* tersebut adalah untuk melindungi kekuasaan (negara)

yang akan dibangun oleh Rasulullah. Karena itu Bani 'Amir bin Sha'sha'ah, ketika Rasulullah meminta *nushrah*, mereka berkata:

"Bagaimana pandanganmu jika kami membaikatmu atas urusanmu, kemudian Allah memenangkanmu atas orang yang menyelisihimu, apakah perkara sesudahmu menjadi milik kami?" Rasul menjawab, *"Perkara (kekuasaan) terserah kepada Allah. Dia meletakkannya sesuai kehendak-Nya."* Ibnu Abbas berkata: Lalu salah seorang dari mereka berkata kepada beliau, *"Apakah kami dikorbankan agar orang Arab melindungi kamu, sementara jika Allah memenangkanmu, urusan (kekuasaan) milik selain kami? Kami tidak ada keperluan dengan urusanmu."* Lalu mereka menolak beliau.

Itu merupakan indikasi bahwa mereka mengetahui *nushrah* tersebut adalah untuk menegaskan kekuasaan (negara). Karenanya mereka menyatakan keinginannya agar mereka menjadi penguasanya setelah Rasulullah. Ibnu Saad dalam *At-Thabaqât*, sebagaimana ditulis oleh Ahmad al-Mahmud dalam kitab *Ad-Da'wah ilâ al-Islâm*, menyebut ada 15 kabilah yang didatangi Rasulullah.

Di antaranya kabilah Kindah, Hanifah, Bani 'Amir bin Sha'sha'ah, Kalb, Bakar bin Wail dan Hamdan. Mereka semuanya didatangi oleh Rasulullah untuk *thalabun-nushrah*. Rasulullah mengajak mereka beriman dan memberikan *nushrah* guna memberikan kekuasaan demi tegaknya agama Allah.

Meski berulang ditolak, Rasulullah tidak mengubah langkah ini. Ini adalah *qar'inah jâzim* (tegas) bahwa *thalabun nushrah* yang dilakukan Rasulullah tersebut merupakan kewajiban *syar'i*, perintah dari Allah SWT. Bukan inisiatif Rasulullah sendiri atau sekadar tuntutan keadaan yang bersifat opsional.

Kemudian ketika Allah SWT memutuskan perkara tersebut, maka terjadilah Baiat 'Aqa-

bah kedua yang merupakan *nushrah* untuk menegakkan negara Islam (*daulah Islamiyah*) di Madinah. Semoga Allah SWT memuliakan umat ini dengan hadirnya para *ahlul quwwah* untuk menjadi penolong dakwah demi mengembalikan jejak langkah kaum Anshar yang pertama. Melalui itulah Daulah Islam dapat ditegakkan kembali, yakni Daulah Khilafah Rasyidah yang akan menjadi institusi politik global bagi umat Muslim.

Sejak Rasulullah SAW membangun negara Islam pertama di Madinah itu yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, Islam diterapkan di tengah masyarakat secara nyata. Faktanya Khilafah kemudian menjadi kunci kegemilangan peradaban Islam. Sebuah peradaban yang telah memberikan tinta emas dalam perjalanan kehidupan manusia pada berbagai aspeknya. Belum ada peradaban yang bertahan lebih dari 1300 tahun kecuali Khilafah.

Hasilnya berupa kemajuan luar biasa yang lahir dari sana. Kemajuan ilmu pengetahuan hingga kesejahteraan masyarakat berhasil mencapai titik gemilang ketika peradaban Islam tegak di muka bumi. Hal tersebut merupakan buah dari penerapan syariah Islam dalam segala aspek kehidupan rakyat di dalam institusi Khilafah.

Peran Penting Membebaskan Negeri-negeri Islam

Sejarah Islam mencatat bahwa kekuatan militer selalu menjadi faktor kunci dalam mempertahankan dan membebaskan negeri-negeri Islam dari penjajahan dan dominasi asing. Dari masa Rasulullah SAW hingga era Kekhalifahan Utsmaniyah, militer memainkan peran strategis dalam membebaskan wilayah Islam dari agresi eksternal dan menegakkan pemerintahan Islam yang adil.

Sebuah malapetaka terbesar bagi umat Muslim tatkala institusi Khilafah tersebut mengalami keruntuhan pada 3 Maret 1924.

Dampaknya kaum Muslim kemudian mengalami kemunduran dan keterjajahan pada segala lini kehidupan. Saat ini, banyak negeri Islam berada dalam kondisi keterjajahan, baik secara langsung melalui pendudukan militer asing maupun secara tidak langsung melalui sistem politik, ekonomi, dan ideologi yang dikendalikan oleh kekuatan global.

Ketika nanti Khilafah tegak kembali, para militer Muslim akan digerakkan kembali dalam sebuah tugas yang mulia yakni membebaskan negeri-negeri Islam dari cengkeraman penjajah. Rasulullah SAW telah menunjukkan bagaimana kekuatan militer digunakan untuk membebaskan wilayah Islam dari penindasan dan ketidakadilan, seperti dalam Perang Badar (624 M), Perang Uhud (625 M), Fathu Makkah (630 M) juga ekspansi Islam ke wilayah Syam dan Persia. Misalnya Rasulullah SAW mengirim pasukan ke luar Jazirah Arab untuk membebaskan masyarakat dari penindasan kekaisaran besar seperti Romawi dan Persia.

Khalifah-khalifah setelah Rasulullah SAW terus menggunakan kekuatan militer untuk melakukan penaklukan (*futuhat*) dan membebaskan negeri-negeri Islam. Seperti penaklukan Syam dan Mesir oleh Khalifah Umar bin al-Khattab, pembebasan Andalusia oleh Khalifah Umayyah, Perang Salib dan pembebasan Yerusalem oleh Shalahuddin Al-Ayyubi, serta ekspansi dan pertahanan Kekhalifahan Utsmaniyah di Eropa dan Timur Tengah.

Khilafah beserta kekuatan militernya merupakan perisai dan pelindung bagi umat Muslim. Tanpa Khilafah umat Muslim menjadi lemah dan mudah dijajah oleh bangsa lain. Banyak negeri Muslim saat ini masih dalam kondisi keterjajahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lihatlah misalnya Palestina yang diduduki Israel sejak 1948 hingga kini. Kashmir yang merupakan wilayah mayoritas Muslim terus mengalami represi dari India sejak 1947.

Juga penindasan sistematis terhadap Muslim Uyghur oleh pemerintah China. Afghanistan dan Irak, yang meski militer asing telah mundur namun intervensi politik dan ekonomi dari negara-negara Barat masih kuat hingga saat ini. Suriah dan Yaman yang terus terjebak dalam konflik internal akibat intervensi militer asing yang memanfaatkan perpecahan di antara umat Muslim.

Di era modern, tantangan yang dihadapi Khilafah nanti akan lebih kompleks. Karena tidak hanya berupa penjajahan fisik, tetapi juga dalam bentuk dominasi ekonomi, politik, dan ideologi. Oleh karena itu, Khilafah harus membangun militer yang mandiri, berdaulat, dan profesional untuk menghadapi tantangan ini. Sebab tantangan membebaskan dan menjaga negeri-negeri Islam ke depan membutuhkan banyak kemampuan, mulai dari kemampuan pertempuran fisik, aspek geopolitik, ekonomi, hingga ideologi.

Potensi Kekuatan Militer Dunia Islam

Dunia Islam memiliki potensi militer yang sangat besar, baik dari segi jumlah personel, sumber daya alam, industri pertahanan, hingga posisi geopolitik yang strategis. Namun, tanpa Khilafah sebagai institusi pemersatu, hingga saat ini kekuatan militer negeri-negeri Islam masih terfragmentasi dan belum mampu bersatu untuk membentuk sebuah blok militer yang solid dan kuat.

Saat ini dunia Islam terdiri dari lebih dari 50 negara dengan populasi lebih dari 1.9 miliar jiwa, tersebar di Asia, Afrika, dan sebagian Eropa. Secara geografis, dunia Islam memiliki posisi strategis dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Namun lagi-lagi potensi ini belum bisa berpengaruh secara signifikan karena masing-masing negeri terpecah belah dalam *nation-state*.

Berikut adalah beberapa negeri Muslim de-

ngan kekuatan militer terbesar berdasarkan jumlah personel aktif (*Global Firepower*, 2025 [1]):

Negara	Personel Aktif	Cadangan	Paramiliter
Pakistan	654.000	550.000	291.000
Turki	355.000	200.000	150.000
Mesir	440.000	480.000	397.000
Indonesia	400.000	400.000	280.000
Iran	610.000	350.000	150.000
Arab Saudi	257.000	25.000	24.500
Aljazair	325.000	155.000	112.000

Total gabungan militer 7 negeri Muslim itu saja sudah lebih dari 3.04 juta personel aktif, belum termasuk negeri-negeri Islam lain seperti Yordania, Libanon, Afghanistan, Malaysia, dan lain sebagainya. Jumlah tersebut jauh melebihi negara besar seperti AS (1.33 juta personel) dan Rusia (1.32 juta personel). Hal ini menunjukkan bahwa dunia Islam memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat kuat untuk membangun kekuatan militer global.

Negeri-negeri Islam juga memiliki anggaran pertahanan yang cukup besar. Beberapa diantaranya yang terbesar adalah Arab Saudi, Turki, dan Pakistan (*Stockholm International Peace Research Institute*, SIPRI, 2023 [2]).

Negara	Anggaran Pertahanan (USD, 2023)	Persentase dari PDB
Arab Saudi	\$46,0 Miliar	7,4%
Turki	\$20,4 Miliar	2,1%
Pakistan	\$10,3 Miliar	3,9%
Iran	\$8,2 Miliar	2,5%
Indonesia	\$9,3 Miliar	0,8%
Mesir	\$4,3 Miliar	1,2%

Beberapa negeri Muslim menggunakan anggaran tersebut untuk pengembangan teknologi pertahanan canggih. Turki misalnya telah mengembangkan Bayraktar TB2 & Akinci Drone (*Defense News*, 2023 [3]), tank tempur Altay Tank, dan TF-X Fighter Jet yang merupakan pesawat tempur generasi kelima. Pakis-

tan mengembangkan Pesawat tempur JF-17 Thunder (*Al-Jazeera*, 2023 [4]), serta Program Rudal Balistik Shaheen & Ghauri sebuah sistem rudal jarak jauh yang mampu membawa hulu ledak nuklir.

Sementara Iran mengembangkan Rudal Balistik Shahab & Khoramshahr (*The Middle East Institute*, 2024 [5]) dan drone canggih Drone Shahed-136. Arab Saudi dan UEA Fokus pada produksi drone, kendaraan lapis baja, dan sistem pertahanan udara (SIPRI, 2023 [2]). Masalahnya banyak negeri Muslim masih bergantung pada produksi peralatan militer dari AS, Rusia, dan Eropa. Keterangan ini membuat mereka rentan terhadap embargo senjata, seperti yang dialami oleh Turki dan Iran (*Defense News*, 2023 [3])

Saat ini, dunia Islam tidak memiliki organisasi pertahanan bersama seperti NATO. Upaya seperti Koalisi Militer Islam Anti-Terorisme (IMCTC) yang dipimpin Arab Saudi masih terbatas pada perang melawan kelompok militan (*Al-Jazeera*, 2023 [4]). Kelak ketika Khilafah mampu menyatukan negeri-negeri Islam tersebut akan terbentuk kekuatan militer Muslim global yang dapat melampaui atau minimal setara dengan kekuatan NATO. Berdasar kondisi tersebut Khilafah beserta kekuatan militernya akan mampu melindungi negeri-negeri Islam secara nyata, insyaAllah.

Penutup

Dalam Islam, kekuatan militer atau *ahlul quwwah* memiliki peran penting dalam menjaga agama, melindungi negeri-negeri Islam dan umatnya, serta menegakkan keadilan dan keamanan. Karenanya *ahlul quwwah* memiliki kedudukan tinggi dalam Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Allah SWT menjanjikan pahala besar bagi mereka yang berperang di jalan-Nya, bahkan satu malam berjaga lebih baik dari dunia dan seisinya. Mati syahid adalah keutamaan tertinggi, di mana mereka

yang gugur di jalan Allah mendapatkan kedudukan istimewa di surga-Nya.

Ketidakberdayaan *ahlul quwwah* (militer) di negeri Islam saat ini sebenarnya lebih diakibatkan oleh kebijakan para penguasa di negeri Islam tersebut, bukan karena potensinya yang lemah. Berdasarkan fakta di atas dapat diketahui bahwa sesungguhnya gabungan negeri-negeri Islam memiliki potensi kekuatan militer dan persenjataan yang memungkinkan untuk menjadi militer terkuat di dunia. Khususnya ketika mereka disatukan dalam satu payung institusi negara Khilafah Islamiyah.

Tidak hanya potensi kekuatan personil militer dan persenjataannya, negeri-negeri Islam yang kelak akan disatukan dalam negara Khilafah Islamiyah tersebut juga menempati posisi strategis. Misalnya, benua Afrika, Timur Tengah, Laut Mediterania, Teluk Persia, Semenanjung India, Selat Gibraltar, Terusan Suez, Selat Hormuz, dan Selat Malaka berada dalam wilayah negeri Islam. Kawasan tersebut memiliki nilai geopolitik yang sangat penting di dunia, baik sebagai rute perdagangan dan perekonomian maupun sebagai basis pertahanan dan keamanan.

Sehingga nanti begitu Khilafah Islamiyah tegak, dengan menguasai kawasan strategis tersebut serta didukung oleh potensi militer, ekonomi, demografi, dan ideologi, maka dalam waktu singkat Khilafah Islamiyah akan menjelma menjadi negara adidaya baru di dunia. *Wallahua'lam bi ash-shawab*. []

Referensi

1. Global Firepower Index, "*Military Strength Ranking*", 2025.
2. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), "*Military Expenditure Database*", 2023.
3. Defense News, "*The Rise of Turkey's Military Industry*", 2023.
4. Al-Jazeera, "*Military Capabilities of Muslim Countries*", 2023.
5. The Middle East Institute, "*Iran's Military Expansion and Drone Warfare*", 2004.

ISLAM DAN AGAMA PARA NABI

Soal:

Di dalam Kitab Nizhâm al-Islâm tertulis bahwa: Islam adalah agama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesama manusia.

Pertanyaannya: Apakah Islam hanya diturunkan kepada Rasulullah Muhammad saw. saja dan tidak diturunkan kepada para nabi terdahulu? Lalu apa agama para nabi terdahulu?

Jawab:

Pertanyaan ini merujuk pada apa yang ada di awal pembahasan Nizhâm al-Islâm di dalam Kitab Nizhâm al-Islâm tentang definisi Islam sebagai berikut:

Islam adalah agama yang telah Allah SWT turunkan kepada Sayidina Muhammad saw untuk mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya, dengan dirinya sendiri dan dengan manusia yang lain. Hubungan manusia dengan Penciptanya mencakup akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri mencakup akhlak, makanan dan pakaian. Hubungan manusia dengan manusia yang lain mencakup muamalah dan 'uqûbât.

Kata *Islam* dan bentukannya digunakan di dalam nas-nas syariah dengan makna bahasanya, yakni *al-haqîqah al-lughawiyah*; juga digunakan dengan makna istilahnya,

yakni *al-haqîqah asy-syar'iyah*. Makna bahasa kata *al-Islâm* adalah berserah diri, tunduk patuh dan ikhlas. Adapun makna istilahnya, penyebutan lafal *al-Islâm* sebagai isim 'alam atas agama yang Allah SWT turunkan kepada Sayidina Muhammad saw secara khusus sebagaimana definisi yang dikutip dari Kitab Nizhâm al-Islâm di atas. Berikut penjelasannya:

Pertama: Makna secara bahasa (*al-haqîqah al-lughawiyah*) untuk kata *al-Islâm*. Di dalam kamus-kamus bahasa dinyatakan makna bahasa kata *al-Islâm* sebagai berikut:

Di dalam *Lisân al-'Arab* (12/289) dinyatakan: *Al-Islâm* dan *al-istislâm* adalah *al-inqiyâd* (patuh). *Al-Islâm* dari syariah adalah menampakkan kepatuhan dan menampakkan syariah serta berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi saw. terkait *al-Islâm*, Abu Bakar Muhammad bin Basyar berkata: Dikatakan "*Fulân muslim[un]*." Di sini ada dua pendapat: (1) Yang dimaksud adalah *al-mustaslim* (orang yang berserah diri) kepada perintah Allah; (2) Yang dimaksud adalah *al-mukhlis lillâh al-'ibâdah* (yang memurnikan ibadah karena Allah). Ini dari ucapan mereka: *sallama asy-syay'a li fulân*, yakni *khalashahu* (memurnikannya), juga *salama lahu asy-syay'a* yakni *khalasha lahu* (memurnikan untuknya). Di dalam hadis dinyatakan (yang artinya), "*Tidaklah seorang anak Adam kecuali setan bersama dia.*" Dikatakan, "Bersama Anda juga?" Beliau bersabda, "*Benar. Namun, Allah menolong aku mengalahkan dia sehingga dia patuh.*" Dalam satu Riwayat dinyatakan, "*sehingga dia aslama yakni*

inqāda (patuh) dan berhenti dari memberi bisikan-bisikan.”

Di dalam Kamus *Al-Muḥīth fī al-Lughah* (2/265 dengan penomoran Asy-Syamilah secara otomatis) dinyatakan: *Al-Islām: al-istislām li amrillāh wa al-inqiyādu li thā'atillāh* (berserah diri pada ketentuan Allah dan patuh menaati-Nya). Mereka berkata: “*Salamnā lillāh Rabbinā*, yakni: *Istaslamnā lahu wa aslamnā* (Kami berserah diri kepada Dia dan kami patuh). *As-Salām*—juga—*al-islām* dan *al-muslim* adalah *al-mustaslim* (yang berserah diri)....

Jadi *al-islām* dalam bahasa adalah *al-istislām* (berserah diri), *al-inqiyād* (patuh) dan *al-ikhhlāsh* (ikhlas). Hal ini ditujukan kepada Allah SWT, yakni patuh, tunduk dan berserah diri kepada Allah; demikian juga ikhlas kepada-Nya.

Kedua: Penggunaan nas-nas syariah untuk kata *al-Islām* dengan makna bahasanya. Nas-nas syariah menggunakan kata *al-islām*, bentukannya dan topiknya di sejumlah tempat dengan makna bahasanya yang disebutkan di atas. Berikut dua contoh dari nas-nas syariah untuk itu:

Contoh pertama, firman Allah dalam QS al-Baqarah [2]: 127-134. Semua lafal di dalam ayat-ayat ini memiliki hubungan dengan topik *al-islām*; “*muslimayn, muslimat[an], aslama, aslamtu, muslimūn, muslimīn*”. Ini adalah dengan makna bahasa untuk kata *al-islām* yakni *al-istislām* (berserah diri), *al-khudhū* (patuh) dan *al-ikhhlāsh* (ikhlas) untuk Allah SWT. Perkara ini dijelaskan oleh apa yang ada di buku-buku tafsir seputar makna ayat-ayat ini. Berikut kutipan ringkas dari *Tafsīr an-Nasafi* (*Tafsīr an-Nasafi* (1/79 dengan penomoran asy-Syamilah secara otomatis):

“*Rabbanā wa[ij]jalnā muslimayni laka*”, yakni *mukhlisḥina laka awjahnā* (mengikhlaskan niat untuk-Mu), dari firman-Nya, “*Aslama wajhahu lillāh*”; atau *mustas-*

limīna (kami berserah diri). Dikatakan: *Aslama lahu wa istaslama* jika *khadhi'a* (patuh) dan *adz'ana* (tunduk). Maknanya: Tambahlah untuk kami keikhlasan dan ketundukan kepada-Mu. “*Wa min dzurriyatina*” (Jadikan anak keturunan kami) “*ummatan muslimat[an] laka*”. Kata “*min*” untuk menyatakan sebagian (*li at-tab'īdh*) atau untuk menjelaskan (*li at-tabyīn*). Dikatakan, yang dimaksudkan dengan umat bukanlah umat Muhammad saw., melainkan dikhususkan dengan doa anak keturunan keduanya karena mereka lebih utama dengan kasih sayang. Ini seperti firman Allah: “*Qū anfusakum wa ahlīkum nār[an]*”. Lafal “*idz qāla*” merupakan *zharf* untuk *ishtafaynāhu*, atau di-nashab-kan dengan disembunyikan kata “*udzkur*” seolah dikatakan: *udzkur dzālika al-waqtī* (ingatlah waktu itu) agar kamu tahu bahwa dia *al-mushthafa ash-shālih* (yang dimuliakan lagi shalih), yang tidak berpaling dari *millah* semisalnya. “*Lahu rabbuhu aslim*”, yakni *adz'in* (tunduklah) atau *athi'* (taatlah) atau *akhlish dīnaka lillāh* (murnikan agamamu untuk Allah). “*Qāla aslamtu li Rabbi al-ālamīn*” yakni *akhlishṭu* (aku murnikan) atau *anqadtu* (aku patuh).

“*Falā tamūtunna illā wa antum muslimūn*” (Janganlah kematianmu datang kecuali kamu dalam keadaan teguh di atas Islam). “*Wa nahnu lahu muslimūn*”, yakni *lillāh mukhlisḥina* (mereka ikhlas kepada Allah)...

Contoh kedua adalah firman Allah SWT (yang artinya): ...Mereka (pengikut Isa as.) menjawab, “Kami telah beriman dan saksi-kannah (wahai rasul) bahwa kami adalah orang-orang yang patuh (kepada seruanmu).” (TQS al-Maidah [5]: 111).

Jelas dari ayat tersebut bahwa pembicaraannya adalah tentang al-Hawariyun, para pengikut Isa as. Mereka berkata bahwa mere-

ka adalah *muslimûn*, yakni *mustaslimûn* (berserah diri) *munqâdûna* (patuh) pada perintah Allah *mukhlisûna lahu* (ikhlas kepada-Nya). Dinyatakan di dalam *Tafsîr an-Nasafi* (1/314 dengan penomoran Asy-Syamilah secara otomatis): “...*Qâlû âmannâ wa [i]syhad bi-annanâ muslimûna*”, yakni saksikanlah bahwa kami *mukhlisûna* (*mukhlis*) dari *aslama wajhahu* (tunduk patuh kepada-Nya).

Ketiga: Penggunaan secara istilah untuk kata *al-Islâm* (*al-haqîqah asy-syar’iyyah*). Seperti telah kami sebutkan di atas, nas-nas syariah menggunakan kata *al-Islâm* dengan maknanya secara istilah, yakni sebagai *isim ‘alam* untuk agama yang diturunkan kepada Muhammad saw. Berikut dua contohnya:

Firman Allah SWT (yang artinya): *Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Kucukupkan untuk kalian nikmat-Ku dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagi kalian* (TQS al-Maidah [5]: 3).

Dinyatakan di dalam *Tafsîr Ibni Katsîr* (3/26):

Firman Allah QS al-Maidah [5]: 3. Ini merupakan nikmat Allah ‘Azza wa Jalla yang paling besar kepada umat ini karena Allah SWT telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka. Dengan itu mereka tidak membutuhkan agama lain. Mereka pun tidak memerlukan nabi lain selain nabi mereka (Muhammad saw.). Karena itu Allah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutus beliau kepada seluruh manusia dan jin. Jadi, tidak ada yang halal, kecuali yang Dia halalkan, dan tidak ada yang haram, kecuali yang Dia haramkan. Tidak ada agama kecuali yang Dia syariatkan. Segala sesuatu yang Dia informasikan adalah haq dan benar. Tidak ada kebohongan di dalamnya dan tidak ada pengingkaran. Ini seperti firman-Nya (yang artinya): *Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Quran) sebagai kalimat yang*

benar dan adil (TQS al-An’am [6]: 115).

Artinya, benar dalam informasi serta adil dalam perintah dan larangan. Ketika Allah telah menyempurnakan agama untuk mereka maka telah sempurnalah kenikmatan atas mereka. Karena itu Allah SWT berfirman (yang artinya): *Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Kucukupkan untuk kalian nikmat-Ku dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agama bagi kalian* (TQS al-Maidah [5]: 3).

Jelas dari konteks ayat tersebut bahwa pembicaraannya adalah tentang agama yang telah Allah SWT turunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad saw. Allah telah menyempurnakan dan meridhai agama ini untuk kaum Muslim.

Imam al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam *Shahîh*nya dari Ibnu Umar ra. yang berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda, “*Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat berhaji dan puasa Ramadhan.*” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Jelas dari hadis yang mulia ini bahwa pembicaraannya adalah tentang Islam yang telah Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad saw., juga bahwa lima perkara yang disebutkan adalah pilar-pilar (rukun)-nya sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis-hadis lainnya.

Apa yang dinyatakan di dalam Kitab *Nizhâm al-Islâm* pada teks yang dikutip di atas adalah tentang Islam dengan makna istilahnya (*al-haqîqah asy-syar’iyyah*). Dari definisi Islam ini tampak kesempurnaan syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Dinyatakan dalam definisi bahwa Islam adalah agama yang telah Allah turunkan kepada Sayidina Muhammad saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya, dengan dirinya

sendiri dan dengan manusia lainnya. Begitulah. Islam tidak membiarkan satu hubungan yang mungkin untuk manusia kecuali diatur oleh Islam dan ditetapkan hukum-hukumnya.

Keempat: Islam dan agama para nabi. *Al-Islâm* dengan makna bahasanya adalah *al-inqiyâd wa al-khudhû' lillâh* (patuh dan tunduk kepada Allah) *wa al-ikhhlâsh lahu* (ikhlas untuk-Nya). Itu merupakan sifat untuk agama para nabi seluruhnya sejak Nabi Adam as. sampai Nabi Muhammad saw. Para nabi semuanya adalah di atas *al-Islâm*.

Dinyatakan, misalnya, tentang Ibrahim as. di dalam al-Quran al-Karim (yang artinya): ... *Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam."* (TQS al-Baqarah [2]: 131).

Dinyatakan pula tentang Ya'qub as. dan anak-anaknya dalam al-Quran (yang artinya): ... *(Ibrahim berkata), "Anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Karena itu janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Muslim (berserah diri)." Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut dan ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kalian sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu; Ibrahim, Ismail dan Ishaq. (Itulah) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Dia."* (TQS al-Baqarah [2]: 132-133).

Dinyatakan pula tentang Yusuf as. dalam al-Quran (yang artinya): *Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam (pasrah) dan gabungkanlah aku dengan orang-orang shalih* (TQS Yusuf [12]: 101).

Juga dinyatakan tentang Musa as. dan para pengikutnya. Demikian juga tentang tukang sihir yang beriman kepada Musa as. (yang artinya): *Berkata Musa, "Kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka berta-wakkallah kepada Dia saja jika kalian be-*

nar-benar orang-orang yang berserah diri (Muslimîn)." (TQS Yunus [10]: 84).

Allah SWT juga berfirman (yang artinya): ... *(Mereka berdoa), "Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan Muslimîn (berserah diri [kepada-Mu])."* (TQS al-A'raf [7]: 126).

Juga tentang Sulaiman as. dinyatakan (yang artinya): ... *Dia menjawab, "...Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri (Muslimîn)"* (TQS an-Naml [27]: 42).

Demikian pula tentang Isa as. dan para penolongnya dinyatakan (yang artinya): ... *Para Hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab, "... Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (Muslimûn)."* (TQS Ali Imran [3]: 52).

Lalu tentang Ahlul Kitab juga dinyatakan (yang artinya): ... *Mereka berkata, "... Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang berserah diri (Muslimîn)."* (TQS al-Qashash [28]: 53).

Begitulah. Islam dengan makna *al-istislâm* (berserah diri), *al-inqiyâd* (patuh) kepada Allah SWT dan ikhlas kepada-Nya. Itu adalah sifat untuk agama para nabi semuanya.

Adapun makna istilah *syar'i* maka hal itu sebagaimana yang ada di *Nizhâm al-Islâm* (sebagaimana dikutip pada bagian awal di atas, *red.*). Dalil-dalil atas hal itu banyak dan *qath'i*. Sebagiannya telah dijelaskan di atas. Semoga di dalam jawaban ini ada kecukupan.

Wallâh a'lam wa ahkam.

[Dikutip dari *Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Anbu ar-Rasyah* tanggal 08 Jumadal Akhirah 1444 H - 01 Januari 2023 M]

Sumber:

<https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/86241.html>

<https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/715495583471147>



LINTAS DUNIA

Trump Ingin AS Kuat, Penguasa Muslim Ingin Negerinya Lemah

Berkebalikan dengan ambisi Presiden Donald Trump untuk memperkuat Amerika Serikat dengan menyatukan Greenland menjadi wilayah kekuasaannya menyusul penyatuan negeri-negeri lain menjadi wilayah AS yang dimulai sejak 1800-an, Aktivis Hizbut Tahrir Dr. Abdullah Rubin mengkritik para penguasa Dunia Islam yang ingin negeri-negeri Muslim menjadi lebih kecil dan lebih lemah karena membiarkan tetap terpecah lebih dari 57 negara-bangsa.

“Trump ingin memperluas Amerika agar menjadi lebih kuat, para penguasa kita ingin negeri-negeri kita menjadi lebih kecil dan lebih lemah,” ujarnya sebagaimana diberitakan *hizb-ut-tahrir.info*, (21/3/2025).

Jadi, tegas Abdullah, yang seharusnya membuat kaum Muslim khawatir bukanlah keinginan AS untuk berekspansi. Namun, kontradiksi antara keinginan tersebut dan para penguasa Muslim yang diperbudak.

“Mereka (para penguasa Muslim) memerintah orang-orang dengan kesamaan akidah, budaya dan sejarah gemilang di panggung dunia. Namun, mereka merasa puas untuk tetap terbagi menjadi 57 wilayah, mereka menya-nyaksikan negeri-negeri mereka diserang se-

cara militer, budaya dan ekonomi, satu demi satu!” ujarnya.

Ia kemudian berseru. “Wahai kaum Muslim, di bawah para penguasa yang menyedihkan ini, siapakah yang dapat membayangkan adanya penyatuan meski hanya dua negeri Islam saja? Jadi, dua saja susah, apalagi penyatuan lima puluh tujuh negeri menjadi satu negara, dan menyebarkan cahaya Islam ke negeri-negeri baru. Kami yakin itu akan terjadi. Namun, berapa banyak generasi yang akan hilang hingga hari itu tiba?!” tegasnya.

Seperti diketahui, pada 13 Maret 2025 kembali menegaskan untuk mencaplok Greenland dari Denmark. Sebelumnya, AS telah memperluas wilayahnya melalui berbagai akuisisi. Di antaranya: pembelian Louisiana (1803) dari Prancis; mendapatkan Florida (1819) dari Spanyol; aneksasi Texas (1845) dari Meksiko; pembelian Alaska (1867) dari Rusia; serta pada 1898, Hawaii dicaplok dan mengakuisisi Puerto Rico, Guam, dan Filipina setelah Perang Spanyol-AS. Sebaliknya, kaum Muslim terpecah lebih dari 57 negara-bangsa kecil dan lemah. Padahal sebelumnya mereka bersatu dalam naungan khilafah Islam yang puncak kejayaannya menaungi dua pertiga dunia. []

Rampas Kendali Perairan Internasional, AS Perompak Modern

Menyanggah pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio (16/3) yang berdalih serangan udara AS di Yaman terhadap Houthi bertujuan untuk *memberikan kebaikan kepada dunia* sehingga tidak lagi mengganggu pengiriman global, Aktivis Hizbut Tahrir AS Haitsam bin Tsubait menyatakan justru serangan itu menegaskan AS sebagai perompak modern yang menggunakan kekuatan militer untuk merampas kendali perairan internasional.

“Pesan yang sebenarnya kepada dunia, bahwa Amerika Serikat adalah penegak perdagangan global yang menyatakan diri sebagai perompak modern yang menggunakan kekuatan militer untuk merampas kendali atas perairan internasional,” ujar Aktivis Hizbut Tahrir AS Haitsam bin Tsabait sebagaimana diberitakan *hizb-ut-tahrir.info*, Sabtu (22/3/2025).

Haitsman juga mengingatkan, campur tangan AS tidak pernah bertujuan untuk perdamaian. Semuanya selalu terkait dengan ketidakstabilan, eksploitasi dan pertumpahan darah.

“Kehadiran militer dan politik Amerika di dunia tidak menghasilkan apa pun kecuali perpecahan dan kehancuran. Jadi, jalan ke depan kita adalah mengakhiri era dominasi kolonial atas urusan, langit dan perairan kita,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan kaum Muslim, bahwa kebaikan sejati yang harus diberikan kepada dunia terletak pada upaya menegakkan Islam sebagai jalan hidup yang akan membawa kedamaian dan keadilan bagi dunia.

“Kita harus menyadari tanggung jawab kita untuk membersihkan dan menyelamatkan dunia dari para perompak kapitalis sejati dan mengembalikan keadilan, kekuatan dan kemerdekaan sejati melalui sistem politik khilafah yang akan mengakhiri segala bentuk perompakan untuk selamanya, mengembalikan tatanan hidup yang penuh belas kasih bagi dunia yang telah dilanda eksploitasi dan tirani,” pungkasnya. []

Pernyataan Intel AS Ungkap Pengkhianatan Penguasa Bangladesh

Pernyataan penuh kebencian yang dilonarkan oleh Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard saat kunjungannya ke India terkait penganiayaan terhadap kaum minoritas di Bangladesh dan isu Khilafah Islam sebagaimana ditayangkan NDTV (20/3), menu-

rut Kantor Media Hizbut Tahrir Bangladesh, mengungkap pengkhianatan para penguasa Bangladesh.

“(Pernyataan Gabbard) tidaklah mengejutkan bagi masyarakat yang sadar politik dan mencintai Islam di negara tersebut. Namun, pernyataan tersebut justru mengungkap pengkhianatan antek-antek Amerika di Bangladesh,” tulisnya sebagaimana dilansir *media-umat.info*, Ahad (23/3/2025).

Sebab, lanjutnya, antek-antek ini (para penguasa Bangladesh) mempromosikan penerimaan AS sebagai sahabat Bangladesh untuk menghadapi India. Mereka pun meyakinkan orang-orang yang mencintai Islam di negara itu bahwa Amerika telah meninggalkan kebijakan perang terhadap Islam.

Padahal, HT Bangladesh mengingatkan, kenyataannya adalah sekalipun kepemimpinan AS berubah, kebijakan luar negerinya tetap tidak berubah. Sesungguhnya Trump yang arogan dan pemerintahannya suka sekali menghina antek-antek mereka dan mengungkap motif kebijakan luar negeri mereka. Itulah sebabnya ia menyerukan audit atas 29 juta dolar yang dibayarkan kepada para antek untuk mengubah lanskap politik di Bangladesh.

“Penggunaan dana ini untuk mengendalikan kebijakan negara berdaulat merupakan kejahatan serius dan sama saja dengan mencampuri urusan dalam negeri negara lain,” jelasnya.

Menurut HT Bangladesh, antek-antek AS di Bangladesh selalu menyesatkan orang-orang, dengan mengatakan, “(Sekalipun AS mendukung entitas Yahudi terkutuk dalam membantai dan mengusir rakyat Palestina) Amerika akan berdiri bersama negara kita melawan agresi India.”

Padahal, tegas HT Bangladesh, yang sebenarnya terjadi adalah ketika AS mengobarkan perang terhadap Islam dan kaum Muslim dengan mendukung entitas Yahudi di kawasan

Arab. AS juga sedang mempromosikan perangnya terhadap Islam dan kaum Muslim di kawasan ini, dengan menggunakan India sebagai pelindung regionalnya.

Selain itu, tegasnya, Allah SWT juga telah memperingatkan kaum Muslim terhadap kaum kafir penjajah dan antek-anteknya dalam al-Quran Surah al-Maidah [5] ayat 51 (yang artinya): *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.*

HT Bangladesh juga mengingatkan, AS tahu betul kaum Muslim adalah musuh bebuyutan entitas Yahudi dan negara politeistik India, sebagaimana telah Allah SWT tegaskan dalam Al-Qur'an surah al-Maidah [5] ayat 82 (yang artinya): *Pasti akan engkau dapati orang yang paling keras permusuhan-nya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.*

Kaum Muslim, tegas HT Bangladesh, telah menyaksikan bagaimana pemerintah sementara Bangladesh, untuk menyembunyikan aib dan rasa malunya, mengirimkan apa yang disebut kecaman terhadap pernyataan Tulsi Gabbard. Namun, mereka menegaskan kembali komitmen mereka untuk menindas kaum Muslim dengan menggambarkan tuntutan rakyat negeri ini akan pemerintahan Islam (Khilafah) sebagai terorisme Islam.

"Antek-antek ini tunduk kepada tuan mereka di Barat. Begitu bodohnya sehingga me-



reka tidak berani mengajukan satu pertanyaan pun kepada Amerika sebagai protes! Mengapa Tulsi Gabbard tidak menyatakan keprihatinannya terhadap penganiayaan kaum Muslim di India yang didukung negara? Dunia telah menyaksikan bagaimana kaum Muslim di India dianiaya oleh para ekstremis Hindutva tepat saat Tulsi berada di India, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang mengapa India melindungi Hasina (mantan penguasa Bangladesh) yang fasis. Antek-antek Amerika tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini karena mereka mengetahui hubungan antara AS dan India di kawasan," bebernya.

Oleh karena itu, Hizbut Tahrir Bangladesh menyeru masyarakat yang sadar, politisi, cendekiawan dan personel militer yang tulus ikhlas untuk bersatu. "Kita harus bersatu menggagalkan agenda AS-India untuk mengembalikan tiran Hasina atau mengangkat antek lain untuk menggantikannya dan menggagalkan konspirasi mereka terhadap Islam dan kaum Muslim."

Ia juga mengingatkan stabilitas kawasan ini hanya dapat dipulihkan oleh Khilafah Rasyidah 'alâ Minhâj an-Nubuwwah, insya Allah. "Oleh karena itu, marilah kita semua bersatu dengan Hizbut Tahrir dan bergerak maju menegakkan khilafah 'ala minhâjin nubuwwah," pungkasnya. [] [Joy dan Tim]

Abul Wafa al-Buzjani

Pendiri Ilmu Trigonometri

Selama berabad-abad, para ulama Islam telah menjalin hubungan erat dengan ilmu-ilmu lain serta ilmu-ilmu agama dan telah mengembangkan diri mereka sendiri. Peristiwa ilmiah di Eropa terjadi sebagai hasil karya para cendekiawan Muslim. Jadi, seberapa baik kita mengenal Abul Wafa al-Buzjani, salah satu ulama matematika dan astronomi Islam terkemuka, yang juga dikenal dengan julukan hasib dan pendiri ilmu trigonometri?

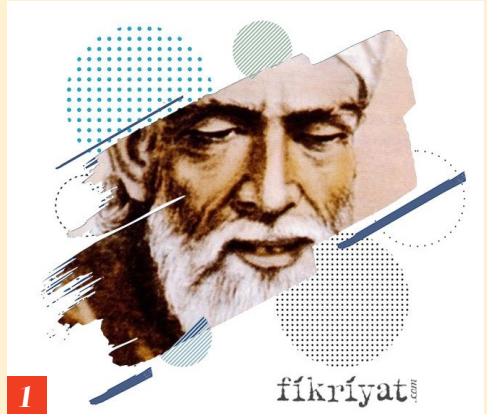
Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/biografi/trigonometri-ilminin-kurucusu-ebul-vefa-el-buzcani>

Siapakah Abul Wafa al-Buzjani?

Merupakan salah satu ulama matematika dan astronomi Islam terkemuka dan juga dikenal dengan julukan "insinyur" dan "hasib". Ia dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan 328 (10 Juni 940) di kota Buzcan, terletak antara Herat dan Nishapur di Khorasan, dan meninggal di Baghdad pada tahun 388 (998); Dalam beberapa sumber, tanggal kematian disebutkan sebagai 387 (997).



Dia berkorespondensi dengan Biruni untuk mendapatkan informasi mengenai pandangnya mengenai masalah ini; Sementara itu, mereka membandingkan hasil pengamatan peristiwa Birkhus yang diamati oleh Biruni di Khwarezm dan Abul Wafa di Baghdad. Selain itu, Biruni menyebutkan pengamatannya dalam beberapa karyanya. Diketahui bahwa Abul Wafa juga berkorespondensi dengan rekan sezamannya Abu Ali al-Hububi, dan Hububi meminta kepadanya beberapa rumus untuk mencari luas segitiga.



Abul Wafa al-Buzjani memperoleh pengetahuan dasar matematika dari pamannya Abu Amr al-Mughāzili dan paman dari pihak ibunya Abu Abdullah Muhammad b. Dia belajar dari Anbese. Kemudian, ia pergi ke Baghdad dan menyelesaikan pendidikannya di bawah bimbingan para ulama terkemuka pada masa itu dan mulai memberikan ceramah di Baghdad serta melakukan penelitian di bidang matematika dan astronomi. Secara khusus, ia membuat sebagian besar pengamatannya di sini dengan emir Buwayhid Izzūdevle Bahtiyār b. Dia melaksanakannya pada masa pemerintahan Muizzuddin .



Menurut Ibnu Khallikan, Abul Wafa merupakan seorang matematikawan (hasib) ternama dan juga pemilik penemuan-penemuan baru dan belum pernah ada sebelumnya dalam ilmu geometri, khususnya mengenai balok. Kemaleddin Ibn Yunus juga menunjukkannya sebagai salah satu ulama yang paling memahami geometri.



5

5 Meskipun Habesh al-Hasib al-Marwazi, salah seorang ulama periode Ma'mun, merupakan orang pertama yang membahas trigonometri, Abul Wafa-lah yang mengubah subjek ini menjadi cabang ilmu pengetahuan yang sistematis.

Di antara karyanya mengenai subjek ini, ia memberikan bukti pertama teorema trigonometri, mendefinisikan garis singgung dengan nama "zil", garis sekan dengan nama "kut-r zil", dan membuat tabel fungsi trigonometri yang tepat dengan langkah 15 menit sebagai fungsi busur.

6



Ia juga mengembangkan berbagai metode untuk memecahkan beberapa masalah segitiga bola. Ia menemukan persamaan $-\text{tgctg}C = \sin b$, $-\text{tgbtg}B = \sin c$ dalam segitiga siku-siku berbentuk bola, di mana huruf kapital melambangkan sudut, huruf kecil melambangkan sisi, dan A melambangkan sudut siku-siku. Ia juga membuktikan teorema sinus untuk segitiga bola miring. Abul Wafa, yang mengembangkan metode baru untuk menggambar parabola titik demi titik, juga memiliki beberapa karya penting pada gambar geometris, sebagian didasarkan pada model India.

6

Abul Wafa merupakan orang pertama yang menggambar persegi di dalam lingkaran dengan satu lubang kompas dan menggambar segitiga sama sisi di dalam persegi tertentu. Ia juga membahas masalah polihedra beraturan dan memberikan gambar perkiraan poligon beraturan bersisi tujuh dan sembilan. Ia juga memberikan berbagai sumbangan pada aljabar dan teori persamaan, dan khususnya terkenal karena menemukan solusi persamaan $x^4 + px^3 = r$ dengan mengambil perpotongan dua parabola.

Pergelin bir tek açıklığıyla daire içine kare çizimini ve verilen bir kare içine eşkenar üçgen çizimini ilk defa Ebü'l-Vefâ yapmıştır.

fikriyat

7

7 Parameter baru yang ditentukan oleh Abul Wafa dengan pengamatan asli, yang sangat penting dalam studi astronomi, telah digunakan selama berabad-abad. Dalam karyanya al-Majisti, ia mempelajari perubahan (tadil, variasi) bulan jauh sebelum astronom Denmark Tycho Brahe (w. 1601) dan mengkritik karya Abu Nasr Ibn al-İrâq pada beberapa poin.

Orisinalitas pandangannya mengenai subjek ini dan penemuannya terkait garis singgung ini berasal dari abad ke-19. Hal ini telah dibahas di kalangan sejarawan sains selama berabad-abad. Sebuah kawah di bulan dinamai menurut namanya karena kontribusinya yang besar di bidang astronomi



4

fikriyat

MEMBANGUN MENTAL PEJUANG PADA ANAK SEJAK DINI

Najmah Saiidah

“Wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian memeluk agama ini tanpa paksaan. Kalian berhijrah dengan kehendak sendiri. Demi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya kalian ini putra-putra dari seorang lelaki dan perempuan yang sama. Tidak pantas bagiku untuk mengkhianati bapakmu, atau membuat malu pamanmu, atau mencoreng arang di kening keluargamu.

Jika kalian telah melihat perang, singsingkanlah lengan baju dan berangkatlah, majulah paling depan niscaya kalian akan mendapatkan pahala di akhirat. Negeri keabadian. Wahai anakku, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Inilah kebenaran sejati. Untuk itu berperanglah dan demi itu pula bertempurlah sampai mati.

Wahai anakku, carilah maut niscaya dianugrahi hidup.”

++++++

Sebuah motivasi yang luar biasa dari seorang ibu ketika melepas anak-anaknya berjihad. Perempuan luar biasa ini adalah al-Khansa yang dikenal

sebagai *Ummu Syuhada* (Ibunda Para Syuhada). Dengan pendidikan, pembinaan dan motivasi dari seorang ibu yang tangguh, yang dibersamai suami yang tangguh pula, keempat anak lelakinya tampil menjadi para pejuang Islam terpercaya. Mereka pergi ke medan perang dengan gagah berani dan syahid di medan al-Qadisiyah. Ketika al-Khansa mendengar kesyahidan semua anaknya, sedikit pun dia tidak merasa sedih atau gundah gulana. Bahkan ia berkata, “Alhamdulillah, Allah telah memuliakan diriku dengan syahidnya putra-putraku.”

Fakta tak terbantahkan, ketika Islam ditegakkan, banyak para pejuang dan pembela Islam lahir dari para ibu dan keluarga beriman. Sebabnya, memang keluarga Muslim pada masa Rasulullah dan sahabat adalah keluarga pejuang. Dari merekalah seharusnya kita banyak belajar dan meneladani.

Keluarga Pejuang Islam

Ketika sistem Islam ditegakkan, kita akan melihat bahwa keluarga Muslim pada masa itu adalah keluarga pejuang Islam terpercaya. Dalam diri mereka tertanam mental pejuang

yang luar biasa. Keluarga Rasulullah saw. dan para Sahabat merupakan sosok teladan bagi umat Islam. Mereka adalah keluarga yang senantiasa gigih berjuang menegakkan kebenaran di muka bumi. Mereka mampu menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Mereka bertanggung jawab menjaga, membela dan menyebarkan risalah ini serta melibatkan keluarga dalam memperjuangkan Islam.

Pada kisah keluarga al-Khansa di atas, tampak nyata mental pejuang dalam keluarga ini. Tanggung jawab terhadap umat membuat dirinya menyemangati keempat putranya untuk berjuang membela Islam. Demikian halnya keluarga Muslim lainnya pada masa itu. Di antaranya keluarga Yasir bin Amir bin Malik ra. selalu lekat dalam ingatan kita. Yasir bersama istrinya, Sumayyah binti Khubath ra., dan anak mereka, Amar bin Yasir ra., termasuk tujuh orang pertama yang masuk Islam. Mereka adalah keluarga sakinah sekaligus pejuang dan penegak Islam yang tangguh. Siap mempertahankan nyawa untuk membela Islam. Mereka menjadikan kemuliaan akhirat sebagai tujuan, sekaligus poros hidup mereka.

Tampak jelas betapa pentingnya peran keluarga dalam menumbuhkan mental pejuang dan ruh perjuangan dalam diri anak. Oleh karena itu, para pejuang dan pembela Islam harus mempersiapkan keluarganya agar selalu berada dalam barisan dakwah, menjadi penerus estafet perjuangan dan senantiasa siap membela Islam.

Bagaimana Mempersiapkan Anak Bermental Pejuang?

Orangtua manapun tentu sangat menginginkan anak-anaknya memiliki tekad yang kuat, bersungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah saat mereka berusaha meraih cita-citanya atau menghadapi kondisi buruk apapun yang menimpanya.

Anak-anak kita hari ini berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Beragam pemikiran dan budaya melingkupi mereka, yang memengaruhi pola pikir dan pola sikap mereka. Sistem kehidupan sekuler kapitalisme yang mencengkeram negeri ini memang memberi andil besar bagi kondisi anak hari ini. Anak-anak malas beribadah. Sulit diajak shalat. Tidak biasa menutup aurat. Tidak mau belajar. Mendapat pemakluman dari orangtua dan lingkungan sekitar. *Mager*. Sering menunda sesuatu yang harus segera dikerjakan. *Bad mood*. Ingin serba instan. Semua ini senantiasa mewarnai kehidupan anak-anak hari ini. Keadaan ini harus menjadi *warning* bagi para orangtua.

Kalau saja kita dan para ibu lainnya memiliki orientasi hidup dan prinsip sebagaimana para ibunda seperti al-Khansa, Sumayyah dan ibu lainnya yang hidup pada masa sistem Islam tegak, maka kelak akan lahir sosok generasi Muda muslim yang memiliki mental pejuang yang tangguh. Lalu apa yang dapat kita lakukan agar lahir dari keluarga kita anak-anak yang bermental pejuang?

Pertama: Menanamkan keimanan yang kukuh. Sejak dini, anak-anak harus diperkenalkan dengan akidah Islam. Orangtua harus dengan sabar mengenalkan rukun iman dan Islam kepada anak. Ini adalah fondasi yang harus ditanamkan dengan benar dalam diri anak yang akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya sendi-sendi agama dalam diri anak. Rasulullah saw. bersabda, “*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu dan bapaknyalah yang menjadikan dirinya Yahudi, Nasrani atau Majusi.*” (HR al-Bukhari).

Penanaman keimanan ini akan menjadikan anak kita mengenal Allah sebagai *Al-Khâliq al-Mudabbir* dan Rasulullah Muhammad saw.

sebagai penyampai risalah Islam. Selanjutnya, akan tumbuh kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Cinta ini akan mendorong anak-anak kita untuk melakukan amal Dia dicintai dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. Agar anak semakin mencintai Nabi Muhammad saw., orangtua harus rajin membacakan *Sirah Nabawiyah* yang menjelaskan cara Rasulullah saw. memperjuangkan dan menegakkan Islam di muka bumi. Dengan demikian, anak-anak akan paham Syariah, juga cara memperjuangkan dan membela Islam.

Kedua: Mengenalkan syariah Islam, termasuk adab dan akhlak mulia, sejak dini. Rasulullah saw. bersabda, *“Perintahkanlah anak-anakmu agar mendirikan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukullah mereka (jika meninggalkan shalat) ketika telah berumur sepuluh tahun.”*

Hadis ini memberikan penjelasan tentang kewajiban orangtua mengajarkan salah satu syariah Islam, yaitu shalat. Demikian pula hukum-hukum yang lain, seperti kewajiban berpakaian sempurna, larangan mencuri, dan sebagainya. Orangtua juga harus menjelaskan hukum yang lima (*ahkâm al-khamsah*), adab dan akhlak. Orangtua bisa mengajak anak-anak ke majelis-majelis ilmu untuk memperkaya pemahamannya tentang syariah Islam, berdiskusi bersama, dan sebagainya.

Seiring berjalannya waktu, keimanan menguat, makin menguat pula dorongan mereka untuk belajar Islam. Tentu pemahaman terhadap syariah Islam makin luas. Mereka pun makin merasa bertanggung jawab melaksanakannya. Selanjutnya, mereka akan paham betapa istimewanya syariah Islam. Ini semua menjadi kekuatan pendorong dalam diri mereka untuk mengamalkan Islam dalam mengarungi kehidupan. Mereka akan merindukan penerapan syariah Islam di muka bumi. Akhir-

nya, mereka akan senantiasa terdorong untuk menyebarkan dan berjuang untuk Islam.

Ketiga: Menceritakan tentang kehidupan para Sahabat Nabi saw. Orangtua bisa menceritakan kepada anak-anak tentang kehidupan para Sahabat Nabi saw. Para Sahabat adalah orang-orang berkepribadian unggul dan mulia karena dorongan akidah Islam. Rasulullah saw. telah meletakkan fondasi akidah yang kukuh kepada para Sahabat.

Kepada anak prabalig, orangtua bisa menyampaikan cerita tentang para Sahabat berulang-ulang. Dengan demikian, anak-anak akan berkeinginan menjadi seperti Umar bin al-Khatthab, Khalid bin Walid, Asma binti Abu Bakar, dan sebagainya. Cerita keteguhan Bilal bin Rabbah, keberanian Hamzah bin Abdul Muthalib, kecerdasan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, serta masih banyak keutamaan orang-orang terdekat Nabi saw., bisa orangtua sampaikan kepada anak.

Keempat: Memahamkan agar anak menjadikan dakwah sebagai poros kehidupan. Sesungguhnya perjuangan dakwah merupakan *sunnatullah* yang harus ditempuh umat Islam. Apalagi dalam situasi ketiadaan Khilafah saat ini. Tegaknya hukum Islam merupakan kewajiban. Karena itu mewujudkan adanya Khilafah di muka bumi ini merupakan kewajiban bagi kita semua. Hanya saja, perjuangan dakwah menuju tegaknya Khilafah bukanlah jalan mudah untuk dilalui oleh keluarga Muslim.

Karena itu, betapa pentingnya peran keluarga bagi keberlangsungan perjuangan. Oleh karena itu para pejuang Islam harus menyiapkan keluarga agar selalu berada dalam barisan dakwah, penerus estafet perjuangan, saling menyemangati yang satu dengan yang lainnya. Hanya dengan dakwah sajalah mental dan semangat pejuang akan senantiasa terpe-

lihara sehingga tetap istiqamah dan konsisten dalam medan perjuangan.

Di sinilah pentingnya peran orangtua untuk terus menanamkan pentingnya dakwah kepada anak-anak sejak dini agar ruh perjuangan selalu ada dalam diri mereka. Dengan itu mereka menjadi para pembela Islam terpercaya. Dengan demikian rintangan, tantangan dan hambatan apa pun di jalan dakwah akan disikapi sebagai risiko atau konsekuensi perjuangan.

Kelima: Memberikan teladan bagi anak. Bagaimana pun anak-anak membutuhkan *qudwah* dan teladan yang baik, bahkan hingga mereka dewasa. Sudah seharusnya orangtua selalu memberikan contoh yang baik kepada anak cara menjadi pembela Islam terpercaya. Tentu agar benih-benih kebaikan tertanam dan menghunjam dalam jiwa dan sanubari mereka. Selanjutnya, hal itu akan terbawa dalam setiap sikap dan perilaku mereka bahwa syariat Islam harus diterapkan dan ditegakkan.

Orangtua harus memberikan teladan untuk menjadikan Islam sebagai standar setiap perbuatan, juga sebagai rujukan dalam berpikir atau berdiskusi. Buatlah mereka bangga menjadi seorang Muslim dengan aturannya yang sempurna. Mereka akan semangat menjalankan dan menyebarkan syariah-Nya meskipun tidak mudah. Inilah yang akan mengokohkan jiwa untuk menjadi pembela Islam terpercaya saat syariah Islam dan umatnya direndahkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka akan menyampaikan kebenaran Islam di mana pun berada.

Keenam: Senantiasa *taqarrub* kepada Allah SWT. Membela Islam memang bukan tanpa hambatan dan tantangan. Namun, semuanya akan dapat dihadapi. Saat kita makin dekat kepada Allah, Dia pun makin dekat ke-

pada kita. Pada saat itulah pertolongan dan kemudahan akan Allah berikan kepada kita.

Banyak hal yang bisa dilakukan bersama anak-anak kita untuk makin dekat pada Allah SWT, seperti banyak melakukan shalat sunnah, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak shaum sunnah, banyak tilawah al-Quran, dan banyak muhasabah. Dengan *taqarrub* kepada Allah, berarti kita telah mengundang bantuan, pertolongan dan pemeliharaan-Nya. Rasulullah saw. bersabda, *"Pada setiap malam, Tuhan kami Yang Mahasuci dan Mahatinggi turun (ke langit dunia) ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Dia berfirman, 'Siapa saja yang berdoa kepada Diri-Ku, Aku akan memperkenankan doanya. Siapa saja yang meminta kepada Diri-Ku, Aku akan mengabulkannya. Siapa meminta ampunan kepada Diri-Ku, Aku pun akan mengampuninya.'"* (HR al-Bukhari Muslim).

Ketujuh: Berusaha menghadirkan 'ruh perjuangan' setiap hari' di rumah. Bukan hal mudah memang memelihara mental pejuang atau ruh perjuangan di tengah situasi sistem yang rusak hari ini. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memberi pemahaman kepada anak-anak bahwa antara kebenaran dan kebatilan senantiasa bertarung dan kebenaran harus bisa melenyapkan kebatilan. Karena itu terus mengkaji Islam *kāffah* menjadi kunci bagi kita dan anak-anak. Dengan itu kebenaran Islam dalam benak kita tetap terjaga kemurniannya.

Selain itu sering berdiskusi tentang berbagai permasalahan yang menimpa umat menjadi momen yang baik bagi anak dan orangtua untuk mengasah pemahaman Islam, semakin yakin bahwa sistem Islamlah yang benar dan satu-satunya yang mampu memberi solusi permasalahan manusia. Inilah yang akan menguatkan semangat juang keluarga kita untuk melawan segala kebatilan.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

Budi Mulyana, S.I.P, M.Si.:

TUGAS UTAMA MILITER DALAM ISLAM ADALAH PERTAHANAN DAN JIHAD



Pengantar:

Pengesahan RUU TNI baru-baru ini telah menuai kontroversi di masyarakat. Banyak komponen masyarakat menolak—bahkan melalui sejumlah aksi demonstrasi yang cukup massif—pengesahan RUU TNI tersebut.

Mengapa UU TNI banyak ditolak? Apa alasannya? Betulkah UU TNI akan mengembalikan dwifungsi TNI yang pernah menimbulkan trauma bagi masyarakat, sebagaimana pada masa Orde Baru? Ataukah ini hanya semacam kekhawatiran tak berdasar?

Lepas dari kontroversi tersebut, bagaimana sebetulnya Islam memposisikan militer di dalam Negara Islam? Bagaimana pula relasi sipil-militer dalam pandangan Islam?

Itulah di antara pertanyaan yang diajukan kepada pengamat politik Islam, **Ustadz Budi Mulyana, S.I.P., M.Si.** Berikut wawancara lengkapnya dengan *Redaksi*.

Saat ini sedang ramai kontroversial UU TNI. Bagaimana menurut pandangan Ustadz?

Ramainya kontroversi revisi UU TNI menurut saya karena beberapa sebab. *Pertama*, lemahnya literasi. Ada anggapan ini adalah undang-undang baru, padahal hanya revisi. Ada pula anggapan bahwa ini revisi menyeluruh, padahal hanya revisi 3 pasal saja; terkait penambahan operasi militer selain perang, penambahan prajurit aktif di instansi sipil, dan penambahan batas usia pensiun. Akibat lemahnya literasi ini, muncullah penolakan yang sifatnya *gebyah-uyah*.

Kedua, revisi UU TNI ini berbarengan de-

ngan naiknya Prabowo sebagai presiden yang memiliki latar belakang purnawirawan TNI. Apalagi di awal pemerintahannya, dia mengesankan pemerintahan yang militeristik, misal dengan adanya pembekalan berupa *retret* bagi para menteri dan kepala daerah di Akmil Magelang dengan menggunakan seragam ala militer dan kegiatan yang bernuansa militer. Akibatnya, muncul kesan kuat akan munculnya kembali pemerintahan yang militeristik.

Dari beberapa indikasi tersebut, muncullah kekhawatiran bahwa revisi UU TNI ini adalah bagian dari pemerintahan Prabowo untuk memperkuat otoritarianisme militer yang berujung pada ancaman otoritas negara yang me-

ngedepankan supremasi sipil.

Namun, dalam pandangan saya, hal ini masih perlu dilihat praktiknya, karena masih terkesan seremonial dan romantisme militer. Apalagi kalau nanti kita posisikan bagaimana semestinya menempatkan militer dalam kehidupan bernegara.

Bagaimana dengan adanya perluasan peran militer dalam operasi non-perang, seperti ancaman siber, penyalahgunaan narkoba, dll yang dikhawatirkan akan berpotensi tumpang-tindih dengan fungsi lembaga sipil?

Sebenarnya, kalau jelas definisi dan pembagian cakupan kewenangan masing-masing, potensi tumpang-tindih akan bisa dihindari. Jika ada hal-hal yang bisa ditangani bersama, tinggal diatur fungsi komunikasi dan koordinasinya, serta siapa yang diberi kewenangan untuk memutuskan dalam hal kondisi-kondisi yang sifatnya lintas kelembagaan.

Untuk ancaman siber, dengan perkembangan teknologinya dan realitas yang menjadi ancaman pertahanan dan keamanan negara, sudah tepat jika penanganannya melibatkan militer profesional. Ini juga yang dilakukan oleh negara-negara maju saat ini. Namun, untuk penyalahgunaan narkoba, sebenarnya tinggal optimalisasi fungsi kepolisian, tidak mesti melibatkan militer secara langsung.

Kritik utama dari masyarakat sipil terkait UU TNI adalah kekhawatiran militer bisa menjadi alat kekuasaan. Masuk akalukah?

Kekhawatiran tersebut tentu ada alasannya. Trauma masa Orde Baru, ketika militer dengan dwifungsinya, menjadi alat kekuasaan rezim. Akibatnya, dengan revisi UU TNI ini, ada kekhawatiran akan memperluas peran dari TNI dan menambah durasi masa jabatan untuk pangkat-pangkat tertentu.

Tadi dikatakan ada trauma atas dwifungsi militer masa Orde Baru. Apakah ini relevan?

Istilah dwifungsi TNI adalah istilah yang sarat dengan nuansa politis. Apalagi terkait dengan trauma masa Orde Baru, yang menimbulkan kesan pemerintahan yang militeristik, yang digunakan untuk kepentingan penguasa yang sedang memerintah. Apalagi presiden saat ini adalah Prabowo yang tidak lain pada masa Orde Baru adalah menantu dari Presiden Soeharto.

Maka dari itu, naiknya Prabowo menjadi presiden, juga dengan menunjukkan awal pemerintahannya dengan seremonial yang militeristik, apalagi dilanjutkan dengan upaya revisi UU TNI, memunculkan kekhawatiran tersebut di tengah masyarakat, terutama yang *concern* dengan isu sipil militer.

Bagaimana dengan adanya kekhawatiran masyarakat akan munculnya pola pikir militeristik dalam menjalankan pemerintahan, sementara dalam penguasaan rakyat oleh negara harusnya yang digunakan adalah perspektif ri'ayah, sebagai politisi dan negarawan?

Betul. Militer memiliki pola pikir yang khas, yang berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya. Dengan senjata yang ada di tangannya, mereka terbiasa membangun logika kuat-lemah. Kepemilikan senjata menjadi mereka kuat. Mereka juga mengkondisikan situasi ancaman untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ancaman yang bisa mengarah pada situasi konflik yang meluas yang bisa menimbulkan perang, dan menjadi tanggung jawab mereka untuk menghadapi situasi tersebut. Sistem komando, kepangkatan berjenjang serta tuntutan kedisiplinan dan ketaatan mutlak menjadi harga mati yang harus dijunjung tinggi. Ini memang dibutuhkan dalam situasi kritis yang senantiasa dihadapi militer.

Namun, tentu berbeda dengan menghadapi masyarakat sipil. Pola pikir militeristik cocok dalam kehidupan militer dan situasi perang atau darurat. Namun, dalam kondisi damai, tentunya melayani masyarakat tidak bisa dengan pola pikir militeristik karena akan men-

ciptakan situasi yang penuh dengan ancaman, logika *power* dan ketaatan ala militer yang malah tidak sesuai bagi masyarakat sipil.

Bagaimana dengan mereka yang berpendapat bahwa UU TNI bisa memunculkan pengendalian negara dengan kekuatan militer, yang bisa berujung menjadi negara militeristik?

UU TNI justru bertujuan untuk mengendalikan TNI berdasarkan konstitusi dan persetujuan otoritas sipil. Maka dari itu, pengendalian negara dengan UU TNI sebenarnya kekhawatiran yang berlebihan. Sebabnya, jika TNI mau maka dengan *power* yang dimiliki, militer akan menciptakan situasi darurat militer, mengabaikan perundangan serta mengatur dan mengendalikan masyarakat dengan kekuatan senjata. Lalu akan tercipta situasi masyarakat yang dibangun dengan pola pikir militeristik/junta militer.

Dalam Islam, bagaimana sebenarnya relasi sipil dengan militer?

Problem relasi sipil-militer adalah buah dari penerapan sistem demokrasi ala Barat yang mendikotomikan sipil dengan militer sebagai sesuatu hal yang seolah harus diposisikan secara *vis a vis* (saling berhadapan).

Ciri masyarakat demokratis yang mengharuskan kedaulatan ada di tangan rakyat diwujudkan dengan pengagungan terhadap supremasi sipil (rakyat). Rakyatlah sang pemangku kepentingan dan memiliki kontrol yang penuh terhadap negara (*civilian control*). Adapun militer diposisikan sebagai subordinasi dari sipil. Keberadaan militer diatur kompetensinya oleh sipil dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Ini berbeda dengan pandangan Islam. Islam memiliki sistem pemerintahan yang khas, yang berbeda dengan sistem pemerintahan yang lainnya. Demikian juga dalam mendudukan relasi sipil dan militer. Maka dari itu semestinya dalam Islam tidak akan muncul problem hubungan sipil dengan militer.

Dalam Islam, prinsip awalnya adalah adanya kewajiban jihad bagi umat Islam, yang merupakan fardhu kifayah (kewajiban komunal). Karena itu setiap laki-laki Muslim harus memiliki kemampuan dasar kemiliteran. Sewaktu-waktu mereka siap diterjunkan dalam kancah peperangan. Negara akan mengatur pola pendidikannya secara umum, pembagian kemampuan dasarnya, penempatan dalam situasi perang, bahkan kemampuan teknis dalam penanganan alutsista tertentu. Bisa jadi akan ada semacam wajib militer dalam masa tertentu untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan pengaturan kemiliteran bagi setiap warga negara.

Dengan demikian tidak ada dikotomi sipil-militer dalam pandangan Islam sebagaimana yang ada dalam konsepsi negara yang menganut nilai-nilai demokrasi.

Jika demikian, lalu apa sebenarnya tugas utama militer dalam kacamata syariah Islam?

Tugas utama militer dalam kacamata syariah Islam adalah melakukan perang dan segala hal yang terkait dengan perang. Tugas utama militer adalah pertahanan dan keamanan negara dari ancaman luar negeri. Militer punya tugas untuk menjaga perbatasan negara dari ancaman negara lain. Tidak boleh dibiarkan satu jengkal pun dari negeri Muslim terlepas dan berada di bawah pendudukan musuh-musuh Islam.

Militer bertugas melakukan jihad fî sabilillah sebagai bagian dari tugas negara melakukan dakwah ke seluruh penjuru dunia.

Dalam konteks keamanan dalam negeri, tugas penjagaannya ditangani oleh polisi (*syurtah*) yang masuk ke dalam departemen *amnud-dakhili* (keamanan dalam negeri). Namun, jika dalam kondisi tertentu yang sifatnya insidental, polisi tidak mampu menjalankan tugasnya, maka bisa meminta bantuan kepada militer. Namun, sifatnya adalah *hasbal-hajat* (sesuai dengan kebutuhan), bukan sesuatu yang dipermanenkan

Dalam kondisi bagaimana militer bisa diperbantukan?

Karena komando militer berada langsung di bawah kepala negara (Khalifah), maka Khalifah berhak memerintahkan militer untuk melakukan tindakan-tindakan non-militer yang dibutuhkan oleh umat. Terutama dalam situasi yang membutuhkan pola pikir militeristik dalam situasi darurat. Misalnya dalam situasi bencana alam, kecelakaan massal (*search and rescue*), wabah penyakit dan yang semisal. Ketika terjadi bencana tsunami dan gempa, kecelakaan pesawat terbang yang jatuh ke laut, pandemi corona, sudah dimaklumi peran militer sangat dibutuhkan dan signifikan.

Untuk hal-hal tersebut, semestinya menjadi maklum dibutuhkan kecepatan, sistem komando, kedisiplinan ketat dan ketangguhan dalam penanganan, yang bagi militer mereka terbiasa berada dalam situasi tersebut. Tentu situasi ini sifatnya temporal, tidak berkelanjutan. Namun, akan senantiasa muncul situasi yang mungkin sama, sehingga peran militer harus disiapkan menangani hal tersebut sebagai tugas tambahan.

Posisi dan kedudukan militer dalam Islam di bawah apa? Bagaimana mekanismenya?

Militer berada di bawah Khalifah (kepala negara) secara langsung. Secara teknis, Khalifah bisa menunjuk Amirul Jihad sebagai pemimpin organisasi kemiliteran. Kepemimpinan kepala negara atas militer harus nyata, bukan simbolis dan seremonial. Dia yang berhak menyatakan perang, langsung memimpin peperangan dan menghentikan peperangan sesuai dengan tuntunan syariah.

Karena militer adalah kemampuan profesional, maka Amirul Jihad, sebagai pemimpin organisasi kemiliteran, akan memberikan pertimbangan-pertimbangan profesional sesuai dengan *kafâ'ah* yang dimiliki. Terkait dengan taktik perang, penggunaan alutsista, mobilisasi pasukan dan lainnya, tentu semua berada dalam ranah perwira-perwira militer, walau ten-

tunya otoritas utama kembali kepada Khalifah.

Apa beda militer dengan hukkâm (penguasa)? Apakah militer harus dibedakan dengan hukkâm?

Walau muaranya ada pada Khalifah, yang merupakan penguasa (*hukkâm*) sekaligus pemimpin tertinggi militer. Namun, tentu pemberlakuannya harus sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dalam situasi perang, berlaku hukum perang. Pola pikir dan prinsip-prinsip militeristik, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, berlaku dalam situasi ini.

Namun, ketika perang sudah berakhir, dan mulai berjalan sistem pengaturan masyarakat, maka para penguasa, yang awalnya bisa saja mereka adalah para jenderal militer yang memimpin perang, harus mengelola masyarakat dengan prinsip-prinsip *ri'âyah* (pelayanan) masyarakat. Bukan dengan pola pikir militeristik.

Maka dari itu, di sinilah Islam membekali para perwira militer tidak hanya mahir dalam berperang, namun juga siap menjadi para da'i dan *hukkâm*, yang akan melayani masyarakat dalam situasi yang sesuai.

Bagaimana peran strategis militer dalam Islam? Khususnya terkait dengan politik luar negeri?

Politik luar negeri Islam adalah dakwah. Ketika dakwah mengalami hambatan fisik, adanya penolakan sekaligus ancaman terhadap keberlangsungan dakwah, maka syariah memerintahkan diberlakukan jihad/perang untuk menghilangkan hambatan fisik tersebut. Di sinilah peran strategis militer dalam kaitannya dengan politik luar negeri.

Dengan demikian, setidaknya ada tiga peran strategis militer di dalam Islam. Ketiganya kental kaitannya dengan politik luar negeri Negara Islam. *Pertama*: Penjaga utama Negara dan perbatasan, karena militer wajib menjaga batas-batas teritorial negara sebagai wujud dari kedaulatan teritorial. *Kedua*: Menjadi ujung tombak *futûhât* (pembebasan) negeri-negeri yang belum ditaklukkan, seba-

gai wujud dari kewajiban dakwah, dan jihad dilakukan ketika ada halangan terhadap upaya dakwah tersebut. *Ketiga*: Membebaskan negeri-negeri Islam yang diduduki. Jika dalam situasi ada negeri Muslim yang diduduki pihak asing, seperti yang terjadi di Palestina, Xinjiang, Andalusia, Walachia, dan yang semisal, maka militer memiliki tugas untuk mengembalikan wilayah-wilayah tersebut ke pangkuan umat Islam

Bagaimana cara agar militer tidak dengan mudah dikendalikan oleh asing dan oligarki?

Militer adalah kekuatan strategis. Karena itu militer harus dijauhkan dari kepentingan asing dan oligarki yang akan merusak posisi militer dalam negara. Khusus untuk militer reguler, maka penting untuk memperhatikan hal-hal berikut:

Pertama, proses rekrutmen harus dilakukan seleksi yang sangat ketat. Tidak boleh ada penyusupan kepentingan asing dari awal. Pengaruh asing bisa menjadi faktor perusak institusi militer secara keseluruhan.

Kedua, tentara harus diberi gaji dan tunjangan yang cukup sehingga tidak ada pihak-pihak yang melakukan 'ijon' kepada militer, memberikan bantuan demi kepentingan. Bahkan dalam situasi perang, militer memiliki hak atas *ghanimah* dan *fai*'.

Ketiga, militer harus diawasi dengan ketat ketika melakukan interaksi dengan pihak-pihak asing, misal ketika penugasan (misi operasi, pelatihan dan pendidikan), karena ini juga menjadi celah penyusupan kepentingan asing terhadap institusi militer.

Bagaimana seharusnya hubungan militer dengan umat Islam?

Umat dan militer adalah bagian yang tidak terpisahkan. Dalam Islam, dengan adanya kewajiban jihad bagi umat Islam, maka setiap Muslim harus memiliki kemampuan dasar kemiliteran. Umat sewaktu-waktu harus siap diterjunkan dalam kancah peperangan.

Dalam proses penegakan Daulah Islam, juga harus melalui proses *thalabun-nushrah* yang membutuhkan *ahlul quwwah*, yakni militer. Artinya, tegaknya Daulah Islam membutuhkan dukungan dari militer.

Namun demikian, bukan berarti Daulah Islam adalah pemerintahan militer. Ini karena implikasi dari pemerintahan militer ini jelas sangat berbahaya: kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat bisa berubah menjadi kekuatan militer. Taqiyuddin an-Nabhani menulis bahaya dari pemerintahan militer ini, "Kekuasaan tidak boleh berubah menjadi militer. Jika kekuasaan telah berubah menjadi militer, pelayanan urusan-urusan rakyat akan menjadi rusak. Dalam kondisi demikian, konsep-konsep dan standar-standar kekuasaan telah berubah menjadi konsep-konsep dan standar-standar otoritarianisme dan kediktatoran; bukan konsep dan standar pelayanan urusan rakyat. Begitu pula pemerintahannya; telah berubah menjadi pemerintahan militer yang hanya akan menyiratkan ketakutan, kediktatoran, otoritarianisme, dan pertumpahan darah."

Tegak dan kuatnya Daulah Khilafah Islam sangat membutuhkan bantuan dari kalangan militer. Secara nyata, militer adalah kelompok yang sangat berkuasa di negeri-negeri Islam. Bersama Daulah Khilafah Islam, para prajurit Islam ini akan berjuang untuk menegakkan Islam. Mereka akan menjadi pahlawan kaum Muslim yang memiliki tugas penting, yakni menjaga keutuhan Daulah Khilafah Islam, serta menjaga Daulah Khilafah Islam dari serangan musuh-musuh Islam. Dengan begitu, mereka akan mendapat posisi yang tinggi dan mulia di sisi Allah SWT.

Namun, Daulah Khilafah bukanlah pemerintahan militer. Artinya, kekuasaan pemerintah tidak boleh menjadi kekuasaan militer. Dengan demikian kekuasaan tetap konsisten digunakan untuk melayani umat; bukan menjadi pemerintahan militer yang diktator serta menimbulkan ketakutan dan teror di tengah-tengah rakyat.

Wallâhu a'lam. []

KEKERASAN MENGINTAI PEREMPUAN

Fatma Sunardi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Kendati telah diketok palu, gelombang protes lewat tagar [#TolakRUUTNI](#) terus bergema. Protes lain berupa petisi yang dimulai oleh (*The Indonesian Human Rights Monitor*) Imparsial Indonesia. Hingga (19/3) kemarin, petisi itu sudah ditandatangani lebih dari 2.000 orang.

Amandemen terhadap Undang-Undang TNI tahun 2004 memperkenalkan beberapa perubahan yang bertujuan untuk memperluas peran militer di luar bidang pertahanan. Padahal UU tahun 2004 (awal) itu sendiri merupakan reformasi penting yang mengurangi peran militer dalam urusan sipil. Revisi UU ini dikhawatirkan mengembalikan “dwifungsi” yang memungkinkan militer untuk campur tangan dalam pemerintahan sipil.

Kembalinya dwifungsi TNI dan militerisme tentu bukan persoalan sepele. Ada beberapa dampak besar yang bakal langsung dirasakan warga, termasuk perempuan.

Mempersubur Kekerasan Terhadap Perempuan

Perempuan rentan menjadi target keke-

rasan militer, termasuk kekerasan seksual, penyiksaan, hingga pembunuhan. Sejarah membuktikan, aparat militer pernah menjadi sponsor kekerasan perempuan. Misalnya, kekerasan seksual pasca-peristiwa 1965, pemeriksaan massal pada Mei 1998, pemerkosaan dan penyiksaan seksual selama masa Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh (1989–1998), Timor Leste (1975–1976), dan pendudukan Papua.

Di Papua, Asia Justice and Rights (AJAR) pada 2014–2017 pernah meneliti 40 perempuan korban kekerasan negara. Korban menyebutkan, ada tiga periode kekerasan yang mereka alami, yaitu ketika Operasi Militer tahun 1977 – 1978, Operasi Militer 2005 dan peristiwa pengejaran OPM pada 2007.

Selain itu, ada pula kasus pembunuhan Marsinah pada 1993. Buruh Marsinah yang getol memimpin aksi demonstrasi untuk kenaikan upah buruh di pabrik tempatnya bekerja diculik, diperkosa dan dibunuh. Beberapa bukti mengindikasikan keterlibatan militer dalam pembunuhan Marsinah. Di antaranya adalah pengamanan pabrik tempat Marsinah bekerja oleh militer, Marsinah dan 12 buruh lainnya dikumpulkan di Kodim Sidoarjo, serta

pemaksaan penandatanganan surat pengunduran diri karena telah melakukan rapat ilegal.

Namun, sama seperti pelanggaran HAM terhadap perempuan lain, kasus Marsinah dipetieskan. Anggota militer sering dapat impunitas dari negara atau melalui peradilan militer yang tidak transparan.

Konflik Agraria

Kekuatan militer selalu digunakan oleh Pemerintah untuk memuluskan jalan mereka melakukan pembangunan. Pada masa Orde Baru, cara ini biasa dilakukan mulai dari pembangunan Waduk Kedung Ombo, Revolusi Hijau, proyek transmigrasi, hingga beberapa proyek tambang besar seperti Freeport di Papua dan tambang minyak di Sumatera. Di beberapa kasus, warga harus kehilangan nyawa dan kebebasannya. Misal di kasus Waduk Kedung Ombo, ada lima warga tewas dan penolak pembangunan waduk disebut disusupi komunis sehingga KTP mereka diberi tanda ET (eks tapol).

Jauh setelah Orde Baru runtuh, pelibatan militer dalam proyek pembangunan nasional tetap dilakukan. Salah satunya dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). KontraS mencatat sedikitnya 79 peristiwa pelanggaran HAM yang berkaitan dengan PSN sepanjang November 2019-Oktobre 2023. Temuan itu sejalan dengan catatan Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA) yang mendapati 115 letusan konflik agraria akibat PSN, sepanjang 2020-2023.

Dengan adanya revisi UU TNI, kekerasan pada masyarakat sipil oleh aparat dalam proyek Pemerintah akan berpotensi meningkat. Hal ini sempat disampaikan Siska, aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dalam aksi Tolak RUU TNI, di Dago, Bandung (18/03).

Dilansir dari *Bandung Bergerak*, sebelum ada heboh-heboh soal revisi UU TNI saja, masyarakat Papua yang tanahnya sudah jadi target PSN tiap hari sudah dihadapkan de-

ngan moncong senjata. Jadi dengan adanya UU Revisi ini tuh pasti akan melegalkan semua kejahatan yang mereka lakukan.

Tak Bebas di Internet

Dalam *draft* UU TNI, TNI bakal mendapatkan tugas baru, yakni terlibat dalam pertahanan siber. Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum dikutip dari *Media Indonesia* menyebut, perluasan menyatakan kewenangan perluasan operasi militer selain perang (OMSP) untuk mengatasi dimensi virtual dan kognitif dari perang siber dapat diinterpretasikan secara luas dan sangat rentan disalahgunakan.

Nenden menjelaskan perluasan OMSP pada ranah digital sangat kental dengan nuansa militerisasi ruang siber. Ini nantinya bakal membenarkan pengembangan dan peningkatan berkelanjutan kapabilitas militer siber tanpa henti. Selain itu, negara dapat menjadikan narasi “ancaman siber” sebagai bentuk justifikasi untuk menerapkan langkah-langkah koersif yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

Dalam cuitan terpisah, SAFEnet Indonesia menyatakan bagaimana UU TNI berpotensi memperluas tugas Satuan Siber Tentara Nasional Indonesia (Satsiber TNI).

Lewat Satsiber TNI, Pemerintah bisa melakukan pengawasan ketat terhadap akun atau konten di media sosial. Atas dasar menjaga keamanan siber negara, akun atau konten media sosial ini bisa ditangguhkan (*takedown*). Satsiber TNI juga bisa mengarahkan kontra opini terhadap akun media sosial melalui kecerdasan buatan atau AI. Akibatnya, ruang gerak masyarakat yang kritis di ruang siber semakin terimpit.

Jauh dari Aman

Kehadiran prajurit aktif di ranah sipil pada praktiknya semakin mengusik rasa aman warga. Hal ini terdengar ironi memang, bagaima-

na institusi dan personil yang lekat dengan tugas pertahanan–penjagaan ancaman, tetapi malah dirasakan sebagai gangguan oleh masyarakat.

Lantas bagaimana mewujudkan rasa aman? Masalah keamanan adalah masalah pengaturan ketertiban dan penegakan aturan. Artinya, harus ada aturan yang mengatur interaksi diantara individu yang mampu menyelesaikan persoalan. Baik masalah ekonomi, politik, sosial hingga hukum. Baru diikuti dengan penegakan hukum yang adil. Jadi rasa aman itu bukan karena banyak melibatkan personil militer.

Namun, perluasan personil aktif militer pada jabatan publik yang diatur dalam UU TNI Revisi sepertinya jauh dari kepentingan warga. Sebaliknya, lebih dekat pada kepentingan rezim saat ini. Mengapa demikian? Banyak pihak mengakui pendidikan di militer telah menjadikan personil TNI lebih memiliki kemampuan berpikir strategis dan taktik, juga keahlian dan pengalaman di bidang logistik operasi. Hal lainnya, budaya komando yang kuat akan menjadikan kerja lebih cepat dan efisien. Ini aspek teknis. Bagaimana dengan aspek politisnya?

Politik komando bagaimanapun akan menjadikan pemerintahan dipandang lebih efektif karena dilakukan dengan komando. Tuntutan ini sesuai dengan kondisi rezim saat ini yang dikritik sana-sini karena kebijakan blunder dan menyebabkan gaduh di bawah. Gaya komando tentu lebih efektif untuk berjalannya tugas pemerintahan. Namun, semua ini harus dibayar dengan pendekatan kekerasan ala militer yang tentu saja mengancam keamanan warga negara.

Akhirnya, UU TNI revisi menjadi bagian dari *puzzle* regulasi mengokohkan apa yang disebut sebagai rezim otoriter. Sifat otoriter selalu dibutuhkan manakala kepemimpinan dengan gaya populis ada. Sebut saja, berba-

gai kebijakan populis semacam Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memunculkan kebijakan blunder efisiensi anggaran yang membuat marah rakyat. Kegaduhan demi kegaduhan akan lebih cepat diredam dengan strategi, taktik dan operasi gaya militer. Lagi-lagi korbannya adalah warga, terutama perempuan.

Islam Mewujudkan Keamanan

Islam datang dengan membawa sistem yang sempurna yang mengatur seluruh aktivitas manusia. Penerapan aturan-aturan Islam oleh negara akan mampu mewujudkan hal-hal yang harus ada dalam kehidupan manusia (*dharûriyât*). Kemaslahatan ini yang akan menjaga manusia dari bersikap anarki, merusak dan akhirnya tertimpa kesengsaraan.

Masalah *dharuriyât* itu ada delapan: (1) Menjaga agama; (2) Menjaga jiwa; (3) Menjaga akal; (4) Menjaga keturunan; (5) Menjaga harta-benda; (6) Menjaga kehormatan; (7) Menjaga keamanan; (8) Menjaga negara.

Negara Islam, melalui aturan dan struktur pemerintahannya, akan mewujudkan delapan kemaslahatan *dharûriyât ini*. Karena itu menjadi keharusan bagi negara untuk mewujudkan pasukan dalam koordinasi departemen perang untuk menangani pertahanan dari hal-hal yang mengancam negara, juga Departemen Dalam Negeri (*Al-Amnu Ad-Dakhili*) yang bertugas menindak perilaku kriminal yang mengganggu keamanan warga negara.

Lebih khusus, militer dan pasukan hanya fokus pada aktivitas jihad (perang dalam konteks *futûhât*) dan keamanan yang dipandang oleh khalifah perlu menurunkan pasukan militer untuk mendukung kerja polisi di Departemen Keamanan Dalam Negeri. Dengan pengaturan ini, maka militer dan pasukan tidak akan menebar ketakutan dan kengerian pada masyarakat umum. Tentu saja masalah keamanan tetap terjaga.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

HARAM MENELANTARKAN HARTA

«كَانَ النَّبِيُّ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ»

Nabi saw. telah melarang *qîla wa qâla*, banyak bertanya dan menelantarkan harta. (HR al-Bukhari no. 6473 dan 7292, Muslim no. 593, Ahmad no. 18192 dan ad-Darimi no. 2793).



adis ini diriwayatkan dari jalur al-Mughirah bin Syu'bah. Juga diriwayatkan dengan redaksi lainnya bahwa Rasul saw bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ»

Sesungguhnya Allah tidak menyukai untuk kalian: *qîla wa qâla*, banyak bertanya dan menelantarkan harta (HR al-Bukhari no. 5975, Muslim no. 593, Ahmad no. 18179, an-Nasai di dalam *Sunan al-Kub-râ* no. 11784, Ibnu Khuzaimah no. 208 dan Ibnu Hibban no. 5555).

Di dalam hadis ini Allah dan Rasul saw. telah melarang tiga hal. Salah satunya adalah penelantaran harta (*idhâ'atu al-mâl*).

Abu al-Walid al-Baji (w. 474 H) di dalam *Al-Muntaqâ Syarhu al-Muwaththa'* menyatakan, terkait sabda Rasul saw. "*wa idhâ'atu al-mâl*" mungkin yang beliau maksudkan dengan menelantarkan harta adalah tidak menginvestasikan harta dan menjaganya. Mungkin juga yang beliau maksudkan adalah membelanjakan harta tidak pada arah yang dibenarkan berupa *isyraf* dan kemaksiatan. Malik berkata, "menelantarkan harta adalah Allah memberi kamu rezeki, lalu kamu membelanjakan dalam apa yang Allah haramkan atas dirimu."

Abu Bakar ibnu Syaibah meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair: ia ditanya oleh seorang laki-laki tentang penelantaran harta. Ia berka-

ta, "Allah memberi kamu rezeki. Lalu kamu membelanjakan harta itu pada apa yang Allah haramkan atas dirimu."

Abu Umar Ibnu Abdi al-Barr (w. 463 H) menjelaskan di dalam *Al-Istidzkâr*, "Adapun terkait *idhâ'atu al-mâl*, para ulama punya tiga pendapat: *Pertama*, harta yang dimaksudkan adalah budak, hewan tunggangan dan semua hewan yang dimiliki agar diperlakukan baik dan tidak ditelantarkan. Itu adalah pendapat as-Sariy bin Ismail dari asy-Sya'biy. *Kedua*, menelantarkan harta adalah membiarkan harta tersebut; tidak memperbaiki, tidak memperhatikan dan tidak mengembangkannya. *Ketiga*, *idhâ'atu al-mâl* adalah membelanjakan harta tidak dengan benar, berupa kebatilan, *al-isrâf* dan kemaksiatan. Ini adalah yang *shawâb* menurut orang yang punya agama dan akal."

Abu al-Faraj Ibnu al-Jawzi (w. 597 H) di dalam *Kasyfu al-Musykil min Hadîts ash-Shahihayn* menjelaskan, "Adapun *idhâ'ah al-mâl* maka itu dari beberapa sisi, dan induknya empat sisi: *Pertama*, membiarkan harta tanpa dijaga sehingga hilang/rusak. *Kedua*, melenyapkan harta dengan membiarkan harta itu—jika berupa makanan—sampai rusak atau dibuang; atau jika sombong dari memakan yang kecil atau rela dengan *ghabn* atau membelanjakan dalam bangunan, pakaian dan makanan yang merupakan *isrâf*. *Ketiga*, membelanjakan harta dalam kemaksiatan. Ini penelantaran dari sisi makna. *Keempat*, menyerahkan hartanya sendiri kepada orang khianat atau harta anak yatim kepada anak

yatim itu jika dia sudah tahu anak yatim itu men-*tabdzîr* harta tersebut.”

Menurut Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Syarhu Shahîh Muslim* dan az-Zurqani (w. 1122 H) di dalam *Syarhu az-Zurqânî ‘alâ Muwaththa’ al-Îmâm Mâlik*, “Penelantaran harta adalah membelanjakan harta itu pada yang bukan arahnya yang *syar’i* dan menjerumuskan harta tersebut ke kerusakan. Sebab larangan tersebut adalah bahwa itu merupakan *ifsâd[un]* (perusakan), sementara Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dan karena jika hartanya terlantar maka dapat terjerumus ke apa yang ada di tangan orang.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Ashqalani (w. 852 H) menjelaskan di dalam *Fathu al-Bârî*, sabda Rasul “*idhâ’atu al-mâl*”, mayoritas memba-wa maknanya pada *al-isrâf* dalam pembelan-jaan. Sebagian lainnya membatasi maknanya dengan pembelanjaan pada yang haram. Yang lebih kuat, *idhâ’atu al-mâl* adalah apa yang dibelanjakan pada selain arahnya yang diizin-kan secara *syar’i*, baik diniyah atau duniawi-yah. Rasul saw. melarang hal demikian karena Allah menjadikan harta sebagai penopang untuk kemaslahatan hamba dan dalam pem-borosannya berarti meluputkan kemaslahatan itu, kadang pada orang yang menelantarkan dan kadang pada orang lain. Dikecualikan dari itu, banyaknya pembelanjaan pada arah keba-ikan untuk meraih pahala akhirat selama tidak meluputkan hak ukhrawi yang lebih penting.”

Dari penjelasan para ulama itu dapat dipa-hami bahwa penelantaran harta (*idâ’atu al-mâl*) itu mencakup: *Pertama*, pembelanjaan harta dalam keharaman atau kemaksiatan. Ini disepakati tanpa ada perbedaan pendapat me-rupakan penelantaran harta. *Kedua*, *tasharruf* harta dengan *tasharruf* yang tidak *syar’i* atau *tasharruf* yang *syar’i* tetapi dapat mengan-tarkan pada sesuatu yang haram. Termasuk dalam hal ini, pembelanjaan harta untuk yang mubah hingga menghabiskan harta atau membuat pemiliknya menjadi terlantar atau

membuat dia meminta-minta kepada orang. *Ketiga*, membiarkan harta, tidak memelihara-nya atau menjaganya sehingga rusak atau le-nyap. Hal itu menyebabkan *dharar* dalam hal harta terhadap pemiliknya. Ini haram karena menyebabkan *dharar* atas pemiliknya. Ketiga bentuk itu dilarang dan haram.

Adapun membelanjakan untuk mubah, kenikmatan, atau kemewahan maka itu tidak termasuk *idhâ’atu al-mâl*. Meski lebih utama tidak dilakukan. Begitu juga tidak mengem-bangkan dan tidak memproduksi harta dalam proyek atau bisnis, dan menyimpannya saja maka juga bukan *idhâ’atu al-mâl*, selama bukan termasuk aktivitas menimbun harta (*kanzu al-mâl*) yang diharamkan. Meski lebih baik dikembangkan atau dibisniskan, apalagi harta anak yatim, seperti yang diperintahkan oleh Rasul supaya tidak habis dimakan zakat.

Orang yang suka menelantarkan harta-nya harus dilarang oleh negara (di-*hijr*), yakni dilarang melakukan *tasharruf* atas hartanya. Negara menunjuk *washiy* untuk mengelola harta orang itu demi kemaslahatannya, baik dari walinya atau orang lain.

Ibnu Baththal (w. 449 H) di dalam *Syar-hu Shahîh al-Bukhârî li Ibnî Baththâl* me-nyatakan, “Jumhur ulama mengatakan wajib melakukan *hijr* atas setiap orang yang me-nelantarkan hartanya, baik anak kecil atau orang dewasa. Ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu az-Zubair, Aisyah ra. Ini adalah pendapat Malik, al-Awza’iy, Abu Yusuf, Mu-hammad, asy-Syafi’iy, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsawr. Ada sekelompok ulama yang menga-takan tidak boleh melakukan *hijr* atas orang merdeka yang sudah balig. Ini adalah penda-pat an-Nakha’iy dan Ibnu Sirin dan dikatakan oleh Abu Hanifah dan Zufar.”

Yang *râjih* (lebih kuat) adalah wajib di-*hijr* sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas yang ada.

Wallâh a’lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]



PERISAI UMAT

Lebih dari satu setengah tahun genosida keji dilakukan oleh Zionis Yahudi terhadap bangsa Palestina. Ribuan nyawa melayang. Ratusan ribu terluka. Jutaan lainnya hidup dalam ancaman yang sama. Namun, dunia seakan terdiam. Tidak ada upaya nyata untuk menghentikan kekejian tersebut. Tak seorang pun dari para penguasa dunia, terutama di negeri-negeri Muslim, yang berani bergerak mengerahkan pasukan mereka untuk melawan tindakan biadab ini.

Padahal sudah sangat jelas ditegaskan, baik dalam al-Quran maupun as-Sunnah, bahwa kaum Muslim itu bersaudara. Persaudaraan mereka diikat oleh Aqidah yang sama: Aqidah Islam. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Sungguh kaum Mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat* (TQS al-Hujurat [49]: 10).

Dari ayat di atas tersurat bahwa siapapun, juga di manapun di seluruh dunia ini, asalkan Mukmin, adalah bersaudara. Ini karena dasar ukhuwah (persaudaraan) adalah kesamaan Aqidah. Ayat ini menghendaki ukhuwah

kaum Mukmin harus benar-benar kuat, bahkan lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab (Lihat: Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth*, 8/3; Ar-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, 14/11).

Rasulullah saw. pun telah menegaskan, *"Mukmin dengan Mukmin lainnya bagaikan satu bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian lainnya."* (HR Bukhari, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ahmad).

Selain karena faktor persaudaraan yang sangat kuat, kewajiban membela kaum Muslim yang tertindas didasarkan pada fakta betapa mahalnya harga nyawa seorang Muslim. Allah SWT menetapkan pembunuhan satu nyawa tak berdosa sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia (Lihat: QS al-Maidah [5]: 32).

Allah SWT pun mengancam orang yang menghilangkan nyawa seorang Mukmin dengan ancaman yang sangat keras (Lihat: QS an-Nisa`[4]: 93).

Rasulullah saw. bahkan bersabda:

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
Kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang Muslim (HR an-Nasa'i).

Karena itulah, sepanjang sejarah penerapan syariah Islam, tak ada darah seorang Muslim pun ditumpahkan, melainkan akan diberikan pembelaan yang besar dari umat dan Daulah Islam. Ibnu Hisyam dalam Sirah-nya menceritakan, ketika ada seorang pedagang Muslim yang dibunuh beramai-ramai oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa, karena membela kehormatan seorang Muslimah yang disingkap pakaiannya oleh pedagang Yahudi, Rasulullah saw. segera mengirim para Sahabat untuk memerangi mereka dan mengusir mereka dari Madinah setelah mengepung perkampungan mereka selama 15 malam (Ibnu Hisyam, *Sîrah Ibnu Hisyâm*, 3/9-11).

Rasulullah saw., selaku penguasa kaum Muslim, semasa menjadi kepala Negara Islam Madinah, telah melindungi setiap tetes darah kaum Muslim. Demikian pula Khulafaur-Rasyidun dan para khalifah setelah mereka. Mereka terus melindungi umat dari setiap ancaman dan gangguan. Dengan begitu umat dapat hidup tenang di mana pun mereka berada karena ada yang menjadi pelindung bagi mereka.

Sayang, meski telah dengan gamblang dipahami bahwa kaum Muslim itu bersaudara di mana pun, juga bahwa betapa mahalnya harga nyawa seorang Muslim, faktanya hal sederhana ini seolah tidak dimengerti oleh para penguasa Arab dan Muslim saat ini. Jika tidak demikian, lalu mengapa para penguasa Arab dan Muslim tidak sejak awal segera bertindak untuk membela kaum Muslim Palestina yang tertindas selama puluhan tahun lamanya? Mengapa mereka tidak pernah tergerak untuk mengiriskan pasukan demi membela saudara-saudara Muslim di Palestina yang bahkan saat ini sedang mengalami genosida oleh Yahudi Zionis?

Ada dua alasan utama mengapa hal ini terjadi: *Pertama*, karena dominasi *'ashabiyah* dalam wujud nasionalisme dan konsep *nation state* yang telah merusak ukhuwah islamiyah. Setiap negara Muslim hanya memikirkan kepentingan nasional atau kemaslahatan bangsanya sendiri. Tragedi kemanusiaan di Palestina saat ini, juga di negeri-negeri Muslim lainnya, sejauh ini tidak dianggap sebagai masalah bersama yang harus segera ditangani. *Kedua*, kebanyakan penguasa Muslim dan Arab telah menjadi boneka Barat, khususnya Amerika dan Rusia. Mereka lebih memilih diam atau malah mendukung kebijakan tuan-tuan mereka yang jelas-jelas memusuhi kaum Muslim. Ini terbukti dengan tidak adanya tindakan nyata ketika Muslim Palestina dibantai bahkan mengalami genosida hingga saat ini.

Dengan semua tragedi yang menimpa umat Islam, selayaknya kita memahami kem-

bali sabda Rasulullah saw., *"Imam (Khalifah) adalah perisai; kaum Muslim diperangi (oleh musuh) di belakangnya dan dilindungi oleh dirinya."* (HR Muslim).

Sabda Rasulullah saw. menunjukkan pentingnya keberadaan penguasa yang menjadi pelindung umat. Inilah yang dipahami oleh para khalifah pada masa lalu. Salah satunya adalah Khalifah al-Mu'tashim Billah dari Kekhalifahan Abasiyyah. Ia benar-benar mengamalkan Hadis Rasulullah saw. tersebut. Ia benar-benar menjadi *"junnah"* (perisai) bagi rakyatnya.

Menurut Ibn Khalikan dan Ibn al-Atsir, kisah bermula saat terjadi penawanan dan penistaan oleh seorang kafir Romawi terhadap seorang wanita Muslimah nan mulia keturunan Fathimah ra. Kabar itu sampai ke telinga Khalifah al-Mu'tashim Billah. Mendengar kabar tersebut, tanpa menunda-nunda, Khalifah segera bergerak. Ia segera mengerahkan bahkan memimpin sendiri puluhan ribu pasukan menuju Kota Amuriyah. Jumlah pasukan sebanyak itu dikerahkan hanya untuk membela kehormatan wanita Muslimah mulia yang telah dinodai oleh seorang kafir Romawi tersebut.

Singkat cerita. Kota tersebut berhasil ditaklukkan. Tidak kurang dari 30 ribuan tentara Romawi tewas. Sebanyak 30 ribuan lainnya berhasil ditawan. Wanita Muslimah itu akhirnya bisa dibebaskan (Lihat: Ibn Khalikan, *Wafayât al-A'yân*, 2/149); Ibn al-Atsir, *Al-Kâmil fî at-Târikh*, 6/36).

Kisah heroik ini sangat kontras dengan situasi para penguasa Arab dan Muslim saat ini. Tak satu pun dari mereka yang berani menggerakkan pasukannya untuk melindungi umat Islam. Khususnya kaum Muslim Palestina saat ini. Mereka memilih diam atau bersikap pengecut. Tak mau menjadi "lelaki sejati" meski cuma sehari saja.

Wa mâ tawfiqillâ billâh. [Arief B. Iskandar]

BOLEHKAH NEGARA MENGADOPSI HUKUM IBADAH?

Soal:

Bolehkan negara mengadopsi hukum ibadah, seperti penentuan awal dan akhir Ramadhan, atau waktu wukuf di Arafah, dan sebagainya?

Jawab:

Masalah ini telah dibahas sejak lama oleh Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Muhammad Taqi-uddin an-Nabhani (w. 1977 M) dalam kitabnya, *Muqaddimah ad-Dustur*. Pada Pasal 3, dinyatakan: "Kepala Negara hendaknya tidak mengadopsi hukum syariah apapun dalam masalah ibadah, selain zakat dan jihad. Begitu juga tidak mengadopsi pemikiran apapun yang terkait dengan akidah Islam."

Dalam konteks ini, status hukum mengadopsi hukum bagi kepala negara itu mubah, bukan wajib. Artinya, dia boleh mengadopsi hukum tertentu, juga boleh tidak mengadopsi hukum tertentu.

Karena itu, di pasal tersebut, beliau menggunakan redaksi, "*La Yatabanna*" (hendaknya tidak mengadopsi), bukan "*La Yajuzu an Yatabanna*" (Tidak boleh mengadopsi). Maka dari itu, tidak mengadopsi dalam masalah akidah dan ibadah tidak berarti haram bagi kepala negara untuk mengadopsinya, tetapi maksudnya kepala negara boleh memilih untuk mengadopsi atau tidak. Nah, dalam hal ini lebih baik tidak mengadopsi, ketimbang mengadopsinya.¹

Mengapa sebaiknya kepala negara tidak mengadopsi dalam masalah akidah dan hukum? Ada dua alasan. *Pertama*, karena pemaksaan dalam masalah akidah atau ibadah tertentu bisa menyebabkan keberatan (*haraj*). *Kedua*, karena mengadopsi pemikiran itu untuk mengurus



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca al-wa'ie, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

urusan kaum Muslim dengan pandangan yang sama, serta menjaga persatuan dan kesatuan negara. Karena itu yang diadopsi oleh kepala negara adalah masalah yang terkait dengan hubungan antar individu dan apa saja yang terkait dengan urusan umum. Bukan dalam urusan *private* dengan tuhan.

Dalil alasan yang pertama adalah larangan Allah memaksa kaum kafir untuk meninggalkan agamanya, dan memeluk akidah Islam, serta tidak boleh memaksa mereka untuk meninggalkan ibadah mereka. Ini sebagaimana firman Allah:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat (QS al-Baqarah [2]: 256).

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan (QS al-Hajj [22]: 78)

Jika melarang orang kafir untuk meninggalkan akidahnya dan memeluk akidah Islam saja tidak boleh, maka tentu lebih tidak boleh lagi memaksa orang Islam untuk meninggalkan hukum-hukum yang terkait dengan akidahnya, selama akidah yang dia peluk adalah akidah Islam. Begitu juga tidak boleh memaksa dia meninggalkan hukum yang terkait dengan ibadah, selama hukum tersebut merupakan hukum syariah. Selain itu, memaksa mereka untuk meninggalkan pemikiran akidah Islam tertentu bisa menyebabkan kesulitan (*haraj*). Inilah yang terjadi pada masa Abbasiyah. Saat itu fitnah *Khalq al-Qur'an* telah memakan korban. Di antaranya Imam Ahmad yang mengalami penyiksaan di dalam penjara karena mempertahankan pendiriannya bahwa al-Quran bukan makhluk.²

Dengan demikian berdasarkan dua alasan di atas—terjadi *haraj* (kesulitan) dan bertentangan dengan fakta *tabanni*—maka kepala negara

sebaiknya tidak mengadopsi masalah yang terkait dengan akidah, maupun ibadah. Namun, ini tidak bersifat mutlak. Dalam kondisi tertentu, ketika ada larangan yang jelas dan tegas dalam al-Quran maupun as-Sunnah dalam masalah akidah, maka saat itu kepala negara justru harus mengadopsinya, meski menimbulkan *haraj* (kesulitan). Ini seperti larangan mengambil akidah dari *dzann*, sebagaimana firman Allah:

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan saja. Padahal sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran (QS an-Najm [53]: 28).

Karena itu, ketika negara tidak mengadopsi akidah harus dibangun dengan dalil *qath'i*, justru menyebabkan perselisihan di tengah kaum Muslim dalam masalah akidah. Demikian sebagaimana yang terjadi saat ini, antara penganut Salafi dan Asy'ari, maupun yang lain. Perselisihan ini bisa berujung pada saling mengkafirkan di antara sesama kaum Muslim karena perselisihan ini dalam masalah akidah. Untuk mencegah terjadinya tindakan *takfir* di antara sesama kaum Muslim, negara harus mengadopsi dalil akidah harus *qath'i*. Meski menimbulkan kesulitan, kesulitan ini dalam rangka mencegah konflik yang lebih besar dan perpecahan di antara sesama kaum Muslim.

Begitu juga, ketika mengurus urusan kaum Muslim meniscayakan kepala negara harus menyatukan mereka dengan satu hukum demi menjaga persatuan dan kesatuan negara, maka hukum ini harus diadopsi. Misalnya, penyatuan waktu haji, kapan 1 Dzulhijjah, kapan waktu wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah), Idul Adhha (10 Dzulhijjah), mabit di Muzdalifah dan Mina (10-13 Dzulhijjah). Kapan puasa 1 Ramadhan, dan kapan 1 Syawal. Semuanya ini meniscayakan negara harus mengadopsi hukum tertentu.

Hal yang sama juga terkait dengan zakat dan jihad. Pasalnya, hukum ini tidak hanya terkait dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi hubungan manusia dengan sesama manusia, seperti Hari Raya, Haji, Zakat dan Jihad. Terkait dengan akidah, dalam konteks *tabanni* dalil *qath'i* tersebut, maka ini tidak termasuk memaksa kaum Muslim untuk meninggalkan akidah Islam, tetapi memaksa mereka untuk terikat dengan apa yang harusnya diyakini, yaitu

nash yang *qath'i tsubût* dan *dalâlah*.³

Begitu juga dalam konteks ibadah, ini bukan masalah memaksa mereka untuk terikat dengan ibadah, yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah semata, seperti shalat, tetapi ini juga masalah yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia (Hari Raya, Haji, Zakat dan Jihad). Karena itu ketika negara memaksa kaum Muslim dalam dua masalah ini, yaitu akidah dan ibadah, maka hukumnya boleh.

Dengan demikian boleh dan tidaknya kepala negara mengadopsi masalah akidah dan ibadah bisa disimpulkan sebagai berikut:

Negara tidak semestinya mengadopsi pemikiran akidah Islam tertentu, seperti Muktaizilah, Jabariyah, Salafiyah, atau yang lain. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya kesulitan (*haraj*), bahkan bisa menyebabkan terjadinya perpecahan, juga bisa menyebabkan terjadinya pemaksaan kaum Muslim untuk meninggalkan pemikiran akidahnya.

Negara boleh mengadopsi dalil akidah, bahwa dalil akidah harus *qath'i tsubût* dan *dalâlah*. Negara juga boleh memaksa kaum Muslim untuk terikat dengan dalil tersebut, meski menyebabkan kesulitan (*haraj*), tetapi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perpecahan di tubuh kaum Muslim.

Dalam masalah ibadah, negara tidak semestinya mengadopsi hukum syariah tertentu yang mengatur hubungan manusia dengan Allah semata, seperti shalat dan puasa, misalnya.

Namun, dalam masalah ibadah yang tidak hanya melibatkan hubungan manusia dengan Allah semata, seperti Hari Raya, Zakat, Haji dan Jihad, misalnya, maka negara boleh. Seperti penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal, 9, 10 Dzhulhijjah, dan lain-lain.

Wallâhu a'lam. []

Catatan kaki:

- 1 Al-Allamah al-Qadhi Syaikh Muhammad Taqiyudin an-Nabhani, *Muqaddimatu ad-Dustur Aw al-Asbab al-Mujibah Lahu*, t.p. 1382 H/1963 M, hal. 14-19.
- 2 Fitnah *Khalq al-Qur'an* ini diceritakan panjang lebar oleh Adz-Dzahabi dalam kitabnya, *Siyar al-A'lam an-Nubala'*. Lihat, Syamsu ad-Din adz-Dzahabi, *Siyar al-A'lam an-Nubala'*, Dar al-Fikr, Beirut, cet I, 1417 H/1997 M, Juz IX, hal. 434-547.
- 3 Penjelasan lebih detail mengenai penggunaan dalil akidah harus *qath'i*, telah diuraikan oleh Syaikh Fathi Salim, dalam kitabnya, *al-Istidlal bi ad-Dzanni fi al-'Aqidah*. Lihat, Syaikh Fathi Salim, *al-Istidlal bi ad-Dzanni fi al-'Aqidah*, Dar al-Bayariq, Beirut, cet I, 1401 H/1981 M, hal. 99-127.



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



SETAN BERLEPAS DIRI DARI ORANG KAFIR (1)

﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾﴾

Yang menyertai dia berkata (pula), "Tuhan kami, aku tidak menyesatkan dia, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Allah berfirman, "Janganlah kalian bertengkar di hadapan-Ku. Padahal sesungguhnya Aku dulu telah memberikan ancaman kepada kalian. Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku. (QS Qaf [50]: 27-29).

Dalam ayat-ayat sebelumnya, diberitakan tentang sebuah peristiwa yang akan terjadi pada Hari Kiamat, yakni ketika ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang dilemparkan itu memiliki sifat sangat ingkar, keras kepala, yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas dan ragu-ragu. Orang tersebut menyembah sesembahan yang lain beserta Allah SWT.

Ayat ini masih memberitakan tentang perdebatan orang-orang kafir dengan setan dari bangsa jin.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾

Yang menyertai dia berkata (pula),

"Tuhan kami, aku tidak menyesatkan dia, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh."

Kalimat «قَالَ قَرِينُهُ» merupakan kalimat *isti'nāfiyah* (kalimat baru yang terpisah dari sebelumnya).¹ Yang dimaksud dengan *qarîn* (pendamping) dalam ayat ini adalah setan. Demikian penjelasan Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibnu Zaid, dan lain-lainnya. Mujahid berkata, "Qarîn di sini adalah setan yang ditetapkan untuk dirinya."²

Demikian juga penjelasan Ibnu Jarir ath-Thabari, al-Qurthubi, al-Syaukani, al-Khazin, al-Jazairi, dan lain-lain.³ Bahkan menurut al-Mahdawi, para ulama tidak berbeda pendapat bahwa *qarîn* yang dimaksud ayat ini adalah setan.⁴

Pendapat berbeda diriwayatkan oleh ats-

Tsa'labi yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas dan Muqatil berkata: «قَرِينُهُ» adalah malaikat. Hal itu karena al-Walid bin al-Mughirah berkata kepada malaikat yang mencatat keburukannya, “Tuhanku, dia telah mempercepat aku.” Malaikat pun menjawab, “Tuhan kami, aku tidak membuat dia melampaui batas.” Artinya, “Aku tidak mempercepatnya.”⁵

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibnu 'Asyur: *Al-Qarîn* di sini adalah yang juga disebutkan dalam firman Allah SWT sebelumnya: «وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ».⁶

Dhamîr al-hâ` (kata ganti pihak ketiga) pada kata «قَرِينُهُ» adalah orang kafir. Menurut Ibnu Jarir, orang kafir yang selalu menolak kebenaran.⁷ Imam al-Qurthubi berkata, “Maksudnya, setan yang selalu menyertai orang kafir yang keras kepala itu berlepas diri dari dia dan mendustakan dirinya.”⁸

Diberitakan dalam ayat ini, setan yang selalu menemani orang kafir ketika di dunia itu berlepas diri dari dia dan tidak mau bertanggung terhadap orang kafir itu dengan mengatakan: «رَبَّنَا مَا أَطَّعْنَاهُ». Kata «أَطَّعْنَاهُ» berasal dari kata «الطَّغْيَانُ». Kata tersebut berarti: «تَجَاوَزُ» (melewati batas dalam kesombongan, kezaliman dan kekufuran). Dengan demikian makna «أَطَّعْنَاهُ» adalah «أَطَّعْنَاهُ» (aku tidak menjadikan dia sebagai orang yang melampaui batas), yakni: «مَا أَمَرْتُهُ بِالطَّغْيَانِ وَلَا زَيْنْتُهُ لَهُ» (aku tidak memerintahkan dia untuk melampaui batas dan tidak pula menghiasinya untuknya).⁹

Menurut Ibnu Katsir, setan yang menjadi *qarîn* itu berkata tentang manusia yang datang pada Hari Kiamat dalam keadaan kafir, setannya berlepas diri dari dirinya, lalu berkata, “Tuhan kami, kami tidak membuat dia melampaui batas.” Maknanya: «مَا أَضَلَّلْنَاهُ» (kami tidak menyesatkan dia).¹⁰

Ibnu Jarir ath-Thabari menafsirkan perkataan *qarîn* itu, “Bukan aku yang membuat dia

tersesat dan melakukan kemunggaran. Begitulah dia kafir kepada Allah.”¹¹

Lebih dari itu, *qarîn* justru menyalahkan orang kafir sebagaimana diberitakan dalam firman-Nya:

﴿وَلَكِنَّ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾

...tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.

Huruf *al-wāwu* merupakan ‘*āthifah* (kata hubung). Adapun «لَكِنَّ» berguna sebagai *li al-istidrâk*, yakni mengoreksi kalimat yang disebutkan sebelumnya.¹² Sedangkan kata «كَانَ» merujuk kepada *al-insân* (manusia).¹³ Disebutkan bahwa manusia itu sendirilah yang berada dalam «فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ» (dalam kesesatan yang jauh).

Makna «الضَّلَالُ» (kesesatan) adalah «الْعُدُولُ» (berpaling dari jalan yang lurus). Lawannya adalah *al-hidâyah* (petunjuk). Allah SWT berfirman:

﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾

Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya (QS al-Isrâ' [17]: 15).¹⁴

Adapun «بَعِيدٌ» merupakan *shifah* (sifat) yang menunjukkan keadaan tetap dari kata «بَعْدَ» (jauh), lawannya adalah «قَرِيبٌ» (dekat).¹⁵ Kata tersebut berkedudukan sebagai sifat bagi kata «ضَلَالٍ» (kesesatan).

Menurut Ibnu 'Asyur, kata *al-ba'îd* (jauh) digunakan sebagai *isti'ârah* (kiasan) untuk sesuatu yang mencapai tingkat kekuatan suatu sifat hingga batas yang tidak dapat dijangkau oleh akal dengan mudah. Ini sebagaimana

perjalanan seseorang ke tempat yang jauh tidak dapat ditempuh kecuali dengan kesulitan; atau 'jauh' dalam arti waktu, yaitu sesuatu yang lama dan mendalam sehingga menjadi penegasan bagi makna *fi'l* (kata kerja) «كَانَ» yang disebutkan sebelumnya. Makna ini seperti dalam firman Allah SWT:

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

Siapa saja yang mempersekutukan Allah, sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh (QS al-Nisa' [4]: 116).

Maknanya, kesesatan yang sudah mengakar kuat dalam dirinya menunjukkan bahwa ia tidak hanya sekadar mengikuti bisikan atau pengaruh dari pihak lain. Sebabnya, orang yang sekadar mengikuti sesuatu tidak akan memiliki keteguhan dalam hal tersebut, sebagaimana ilmu orang yang hanya *al-muqallid* (orang yang mengikuti tanpa dalil) berbeda dengan ilmu para *an-nazhzhâr* (orang yang berpikir kritis dan mendalam).¹⁶

Tentang ayat ini, al-Qurthubi berkata, "Dia tersesat dari jalan kebenaran dan melampaui batas karena pilihannya sendiri. Sesungguhnya aku hanya sekadar mengajak dia, lalu dia mau menerimanya."¹⁷

Menurut asy-Syaukani, "Seandainya dia termasuk para hamba-Mu yang ikhlas, tentu lah aku tidak akan mampu mengajak dia."¹⁸

Tak jauh berbeda, Ibnu Jarir al-Thabari berkata, "Akan tetapi, dia sendiri yang berada di jalan yang menyimpang jauh dari jalan petunjuk."¹⁹

Abu Bakar al-Jazairi juga berkata, "Akan tetapi, dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh dari petunjuk dan terbuai dalam kesyirikan dan kejahatan."²⁰

Menurut Ibnu Jarir, Allah SWT menceritakan perkataan *qarîn* pada Hari Kiamat itu untuk memberitahu hamba-hamba-Nya, bah-

wa pada Hari Kiamat kelak mereka akan saling melepaskan tanggung satu sama lain.²¹

Tidak ada yang mau dipersalahkan akibat perbuatan orang lain. Semuanya berupaya melemparkan tanggung jawab kepada yang lain.

Realitas ini juga dikabarkan Allah SWT dalam firman-Nya:

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

Berkatalah setan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahi (janji itu). Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagi aku atas diri kalian, melainkan (sekadar) aku menyeru kalian. Lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencera aku, tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian. Kalian pun sekali-kali tidak dapat menolong aku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dulu." Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih (QS Ibrahim [14]: 22).²²

Juga dalam firman Allah SWT:

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنْ بَرِئَ مِنْكَ إِنْ أَحَافَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ فَكَانَ عَقِبَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاُ الظَّالِمِينَ ﴿٦٧﴾﴾

(Perumpamaan bujukan orang-orang munafik kepada kaum Yahudi) seperti setan ketika berkata kepada manusia, “Kufurlah kamu!” Ketika orang itu kufur, ia berkata, “Sesungguhnya aku berlepas diri dari dirimu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam.” Lalu sesudah itu bagi keduanya (setan dan manusia yang mengikutinya) bahwa keduanya berada dalam neraka, kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang zalim (QS al-Hasyr [59]: 16-17).

Menurut banyak mufassir, perkataan *qarîn* ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan diajukan orang kafir, “Tuhan kami, setanku ini yang menyesatkan aku.” Perkataan tersebut dimaksudkan agar dia dimaafkan dan tidak dimasukkan ke dalam neraka karena tersesat karena disesatkan oleh setan. Seolah dia ingin mengatakan bahwa itu bukan salah dia, namun salah setan yang menggoda, menyesatkan, dan menjerumuskan. Setan pun tidak mau dipersalahkan. Dia menjawab, “Tuhan kami, aku tidak menyesatkan dan menggelincirkan dia. Namun, dia sendirilah yang berada dalam kesesatan yang jauh dari kebenaran.”²³

Demikianlah. Setan-setan yang menggoda, menggelincirkan dan menyesatkan manusia itu pada Hari Kiamat berlepas diri orang-orang kafir yang dia sesatkan. Sebaliknya, mereka justru menyalahkan orang-orang kafir itu, bahwa mereka sendiri yang berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Maka dari itu, betapa menyesalnya mereka. Mereka bukan hanya tidak mendapatkan pertolongan dari setan yang dia ikuti, namun justru mereka disalahkan. Mereka sesat bukan karena disesatkan oleh setan, tetapi mereka sendiri yang sudah sesat sejak awal.

Wallâh a'lam bi al-shawâb. []

Catatan kaki:

- 1 Abu Bilal, *al-Mujtabâ min Musykil I'râb al-Qur`ân*, vol. 4 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, tt), 1226
- 2 al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 22 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 357.. Lihat juga Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-Azhîm*, vol. 7 (tt: Dar Thayyibah, 1999), 403
- 3 al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 22, 357; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 17 (Kairo: Dar al-Maktabh al-Mishriyyah, 1964), 17; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5 (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1994), 91; al-Khazin. *Lubâb al-Ta'wîl fî Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 188; al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2003), 146
- 4 al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 17, 17
- 5 al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 17, 17
- 6 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah, 1984), 314
- 7 al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 22, 357
- 8 al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 17, 17
- 9 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26, 314
- 10 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-Azhîm*, vol. 7, 403
- 11 al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 22, 358
- 12 Mahmud Shafi, *al-Jadwal fî I'râb al-Qur`ân*, vol. 26 (Damaskus: Dar al-Rasyid, 1998), 312
- 13 al-Harari, *Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 27 (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 2001), 442
- 14 al-Asfahani, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur`ân* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 509
- 15 Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*, vol. 1 (tt: 'Alam al-Kitab, 2008), 226
- 16 Lihat Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26, 314
- 17 al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 17, 17
- 18 al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 91
- 19 al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 22, 358
- 20 al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 146
- 21 al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 22, 358
- 22 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-Azhîm*, vol. 7, 403. Lihat juga al-Zamakhshari, *al-Kasasyâf*, vol. 4, 387; al-Baidhawî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 14 2; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Muniir*, vol. 26 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 300; al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*, 806
- 23 Al-Alusi, *Rûh al-Ma'ân*, vol. 13 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 336; al-Khazin. *Lubâb al-Ta'wîl fî Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 189. Lihat juga al-Zamakhshari, *al-Kasasyâf*, vol. 4, 387; al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 127 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 137

BAYÂN AL-MUJMAL

بَيَانُ الْمُجْمَلِ

Di dalam al-Quran dan as-Sunnah ada nas-nas yang *mujmal*. Dalil *al-mujmal* itu, karena ketidakjelasan *dalâlah*-nya atau karena mengandung lebih dari satu *dalâlah* atau makna dan tidak ada keistimewaan yang satu atas yang lain, maka hukumnya belum dapat diamalkan. Padahal asal pada dalil itu adalah diamalkan, bukan diabaikan. Maka dari itu perlu dalil yang menjelaskan dalil yang *al-mujmal* itu.

Jadi semua yang *al-mujmal* memerlukan *al-bayân* (penjelasan). Qadhi Abu Ya'la al-Fara' (w. 458 H) menjelaskan di dalam *Al-'Iddah fî Ushûl al-Fiqhi*, "Adapun apa yang memerlukan *al-bayân* adalah semua lafal yang tidak mungkin dilaksanakan hukumnya (tanpa *al-bayân*). Misal firman Allah SWT ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ dan ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾, juga sabda Rasul saw:

«أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُواهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا»

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan,

"Tidak ada Tuhan kecuali Allah." Jika mereka mengatakan demikian maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Adapun yang mungkin dijalankan menurut lahiriah dan hakikatnya tidaklah memerlukan *al-bayân*. Sebaliknya, jika yang diinginkan oleh yang menyeru adalah sebagian yang dikandungnya atau bukan hakikatnya maka perlu penjelasan yang diinginkan itu. Misalnya firman Allah SWT ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ dan ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَمْهَاتُكُمْ﴾. Lafal-lafal ini maknanya dapat dipahami (secara langsung) dan jelas sehingga tidak memerlukan *al-bayân*".

Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullâh* menyatakan di dalam *Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah* Jilid 3: "*al-bayân* adalah dalil yang menjelaskan *al-mujmal*". *Al-Bayân* adalah dalil yang telah jelas *dalâlah* atau maknanya, yang menjelaskan dalil yang *al-mujmal*.

Penjelasan (*bayân*) *al-mujmal* ini tidak harus menghasilkan *dalâlah* yang *qath'i*. Demikian seperti dijelaskan oleh al-'Abdari yang dikutip oleh az-Zarkasyi di dalam *Bahru al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqhi*: "...Yang menjadi pokok *al-bayân* adalah dalil, yakni dalil yang telah jelas *dalâlah* atau maknanya sehingga dapat memberikan penjelasan atas kesamaran atau ketidakjelasan dalil lainnya dan menghasilkan *al-'ilmu* (keyakinan) atau dugaan kuat atas *dalâlah* atau maknanya."

Bayân al-mujmal itu, karena merupakan penjelasan atas dalil yang *al-mujmal*, maka ia harus berupa dalil juga. Dalil yang *al-mujmal* itu hanya ada di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Adapun di dalam *al-Ijmâ'* dan *al-Qiyâs*



maka tidak ada yang *mujmal*. *Bayân al-mujmal* itu terjadi dengan al-Quran, as-Sunnah *mutawaatir* dan *ahad*, *al-Ijmâ`* dan *al-Qiyâs*. Qadhi Abu Ya'la (w. 458 H) menyatakan, "Adapun apa yang dengannya terjadi *al-bayân* adalah al-Kitab, as-Sunnah, *al-Ijmâ`* dan *al-Qiyâs*."

Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan, "*Al-Bayân* dapat berupa ucapan dari Allah dan Rasul saw., juga berupa perbuatan dari Rasul saw. Contoh *al-bayân* dari Allah adalah firman-Nya ﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا﴾ sampai akhir merupakan penjelasan untuk firman-Nya SWT ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْجُوا بَقَرَةً﴾. Contoh *al-bayân* berupa ucapan dari Rasul saw adalah apa yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi:

لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي عَشْرَةِ أَشْيَاءَ: الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْتَمْرِ وَالزَّيْتِ وَالسَّلْتِ

Rasulullah saw. tidak memfardhukan zakat kecuali pada sepuluh sesuatu: unta, sapi, kambing, emas, perak, gandum, jelay, kurma, kismis dan as-sultu (salah satu jenis jelay).

Itu adalah penjelasan untuk ayat tentang kefardhuan zakat. Contoh *al-bayân* berupa perbuatan dari Rasul saw. adalah apa yang diriwayatkan dari beliau yang memberitahukan shalat dan haji melalui perbuatan beliau. Beliau bersabda: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (*Shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku shalat*) (HR al-Bukhari); «أَلَا فَخَذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (*Ingatlah, ambillah dariku manasik haji kalian*) (HR Ahmad). Perbuatan beliau untuk shalat itu merupakan penjelasan untuk firman Allah SWT ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (*Dirikanlah shalat oleh kalian*). Perbuatan beliau untuk haji me-

rupakan penjelasan untuk firman-Nya SWT ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (*Mengerjakan ibdah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah*) (TQS Ali Imran [3]: 97).

Al-Khathib al-Baghdadi (w. 463 H) menyatakan di dalam *Al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, "*Al-Bayân* terjadi dengan ucapan, *mafhum* ucapan (*mafhum al-muwâfaqah* dan *mafhum al-mukhâlafah*, pen.), perbuatan Rasul, *al-iqrâr* (*taqrîr*-persetujuan Rasul), isyarat dari Rasul, tulisan dari Rasul dan dengan qiyas."

Menurut Qadhi Abu Ya'la al-Fara (w. 458 H) di dalam *Al-'Iddah fî Ushûl al-Fiqhi*, *bayân al-mujmal* itu bisa datang dari Allah dalam bentuk ucapan dan tulisan; bisa datang dari Rasul dengan ucapan, tulisan, perbuatan, isyarat, *iqrâr* (persetujuan) atas perbuatan yang beliau saksikan dilakukan oleh pelakunya dan tidak beliau ingkari. *Bayân* juga dengan *ad-dalâlah wa at-tanbîh* terhadap hukum tanpa nas atau, dalam istilah ulama lainnya, yakni dengan *al-qiyâs*. *Bayân* juga terjadi dengan *Ijmâk*.

Menurut Abu al-Muzhaffar as-Sam'ani (w. 489 H) di dalam *Qawâti'u al-'Adillah fî al-Ushûl*, *bayân al-mujmal* terjadi dalam enam *wajah* (bentuk). *Pertama*, dengan ucapan. Ini yang paling besar dan tegas seperti penjelasan *nishaab* zakat dan sabda Rasul saw. «فَلْفُطْعُ» (*Hukuman potong tangan itu berlaku pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih*).

Kedua, dengan perbuatan seperti sabda Rasul saw. «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat*) (HR al-Bukhari); «أَلَا فَخَذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (*Ingatlah, ambillah dariku manasik haji kalian*) (HR Ahmad).



Ketiga, *bayân* dengan tulisan seperti penjelasan Rasul saw. untuk *diyat* gigi dan *diyat* anggota badan dengan tulisan. Demikian juga zakat.

Keempat, *bayân* rasul saw. dengan isyarat semisal sabda beliau:

«الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي ثَلَاثِينَ يَوْمًا
ثُمَّ أَعَادَ الْإِشَارَةَ بِأَصَابِعِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَحَسِبَ
إِنْهَا مَهْمَةٌ فِي الثَّالِثَةِ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرُونَ يَوْمًا»

“Satu bulan begini, begini dan begini, yakni yakni 30 hari.” Kemudian beliau mengulangi isyarat tiga kali itu. Lalu beliau menahan ibu jari beliau pada yang ketiga jadi 29 hari.

Kelima, *bayân* beliau dengan tafsir (penjelasan) dan itu adalah makna dan ‘*illat* yang beliau informasikan atas penjelasan hukum seperti sabda beliau tentang jual-beli *ruthab* (kurma basah) dengan kurma «أَيُنْقَضُ إِذَا يَبَسَ» (Apakah *ruthab* berkurang jika mengering); juga seperti sabda beliau tentang orang berpuasa yang mencium istrinya «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّضْتَ» (Bagaimana menurut pandanganmu andai kamu berkumur?).

Keenam, dikhususkan oleh ulama dengan penjelasannya dari ijtihad mereka. Hal itu adalah apa yang di dalamnya dikedepankan lima bentuk tersebut jika ijtihad itu mengantarkan padanya dari salah satu di antara bentuknya. Adakalanya dari pokok yang dengannya cabang ini *mu’tabar* dan adakalanya dari jalan sinyal (*amarah*) yang menunjukkannya.

Hal senada disampaikan oleh Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) di dalam *Al-Maḥshûl*, Abu al-Husain al-Bashri (w. 436 H) di dalam *Al-Mu’tamad fî Ushûl al-Fiqhî*, al-Isnawi (w. 772 H) di dalam *Nihâyah as-Sûl*, Ibnu Qudamah

(w. 620 H) di dalam *Rawdah an-Nâzhir wa Jannah al-Munâzhir*, dan lainnya.

Tentang *bayân* dengan perbuatan Rasul saw., Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) di *al-Maḥshûl* menjelaskan, “Ketahuilah bahwa tidak diketahui keberadaan perbuatan sebagai *bayân* untuk *al-mujmal* kecuali dengan salah satu dari tiga: Pertama, hal itu diketahui dengan *adh-dharûrah* dari maksudnya. Kedua, diketahui dengan dalil *lafzhi*, yaitu Rasul saw. bersabda, “perbuatan ini adalah penjelasan untuk *al-mujmal* ini”; atau beliau mengatakan ucapan-ucapan yang meniscayakan hal itu dari keseluruhannya. Ketiga, dengan dalil ‘*aqli*, yaitu disebutkan *al-mujmal*, lalu pada waktu perlu dilaksanakan, beliau melakukan perbuatan yang layak menjadi *bayân* untuknya dan beliau tidak melakukan sesuatu yang lain, maka diketahui bahwa perbuatan itu merupakan *bayân* untuk *al-mujmal* tersebut. Jika tidak maka terjadi penundaan *bayân* dari waktu diperlukan dan bahwa itu tidak boleh.”

Jika terjadi *bayân* berupa sabda dan perbuatan Rasul saw., maka, seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Amidi di dalam *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* dan al-Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah* Jilid 3: Adakalanya keduanya sama *dalâlah*-nya terhadap hukum dan adakalanya berbeda. Jika *dalâlah* hukumnya sama maka yang lebih dulu merupakan *bayan*, baik berupa sabda atau perbuatan, karena tercapainya maksud dengannya; dan yang kedua adalah penegeasan (*ta’kid*). Jika berbeda dalam *dalâlah* hukumnya, seperti diriwayatkan bahwa setelah ayat tentang haji, Rasul saw. bersabda: «مَنْ قَرَنَ حَجًّا إِلَى عُمْرَةٍ فَلْيُطْفِئْ طَوَافًا وَاجِدًا، وَيَسْعَى» (Siapa yang mengaitkan haji ke umrah maka hendaklah *thawaf* sekali dan



sa'i sekali) (HR Ahmad). Juga diriwayatkan dari Rasulullah saw.: «كَانَ قَارِئًا فَطَافَ طَوَافِينَ وَسَعَى سَعْيَيْنِ» (Beliau mengaitkan haji ke umrah dan beliau thawaf dua kali dan sa'i dua kali) (HR ad-Daraquthni). Dalam hal ini perlu diperhatikan: Jika tidak diketahui mana yang lebih dulu, sabda atau perbuatan beliau, maka diambil sabda beliau. Hal itu karena ucapan menunjukkan secara langsung keberadaannya sebagai *bayân*. Berbeda dengan perbuatan, yang menunjukkannya dengan perantaraan (yakni dengan tiga hal yang dijelaskan oleh Fakhruddin ar-Razi di atas). Maka dari itu, diperkirakan ucapan sebagai yang lebih dulu dan dibawa pada pemahaman bahwa *thawaf* dan *sa'i* yang kedua adalah *mandûb* (sunnah).

Jika diketahui yang lebih dulu, yakni sabda beliau, maka *thawaf* dan *sa'i* yang kedua tidak wajib. Lalu perbuatan Nabi saw. wajib dibawa pada hukum *mandûb*. Jika diketahui yang lebih dulu adalah perbuatan maka sabda Nabi saw. menjadi *me-naskh* kewajiban *thawaf* dan *sa'i* kedua yang ditunjukkan oleh perbuatan itu; atau dibawa pemahamannya bahwa perbuatan Rasulullah saw. sebagai *bayân* kewajiban *thawaf* dan *sa'i* kedua bagi beliau, tetapi tidak wajib bagi umat beliau.

Adapun *bayân* melalui ijtihad, dalam istilah Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah di dalam *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*, disebut dengan *al-bayân al-mustanbath*. Misalnya, firman Allah SWT «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» bahwa *dalâlah al-wâwu* pada *wa ar-râsikhûna* bersifat *mujmal* antara untuk *al-'athaf* atau *al-isti'nâf* sehingga perlu *bayân* yang *me-râjih*-kan salah satunya. Dengan *intinbâth* itu menjadi jelas bahwa tambahan sifat pada ilmu dengan *ar-râsikhûna* pasti punya re-

levansi. Jika *al-wâwu* untuk *al-isti'nâf*, jadilah kalimat "*wa ar-râsikhûna fî al-'ilmi*" merupakan kalimat baru. Dengan demikian tambahan sifat *ar-rusûkh fî al-'ilm* (mendalam ilmunya) itu adalah untuk iman dan ini tidak relevan. Sebabnya, untuk beriman tidak diperlukan sifat itu, tetapi cukup ilmu saja. Bahkan akal yang sehat dan lurus sudah cukup untuk beriman.

Adapun jika *al-wâwu* untuk *al-'athaf* maka sifat *ar-rusûkh fî al-'ilmi* itu untuk mengetahui takwil *al-mutasyâbih* dan ini relevan. Sebabnya, untuk mengetahui takwil *al-mutasyâbih* diperlukan ilmu yang mendalam. Dari situ maka yang *râjih* adalah *al-wâwu* itu untuk *al-'athaf* sehingga *waqaf* dalam bacaannya adalah setelah *wa ar-râsikhûna fî al-'ilmi*, bukan setelah lafal *ALLâh*.

Selain itu, jika *al-wâwu* itu untuk *al-isti'nâf* sehingga *waqaf* adalah setelah lafal *ALLâh*, maka maknanya hanya Allah saja yang mengetahui takwil ayat *al-mutasyâbih*. Ini bertentangan dengan firman Allah SWT lainnya bahwa al-Quran merupakan «تِبْيَانٌ لِّلنَّاسِ» (penjelasan untuk manusia) (TQS Ali Imran [3]: 138) dan «تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ» (untuk menjelaskan segala sesuatu) (TQS an-Nahl [16]: 89). Ini meniscayakan semua ayat al-Quran dapat dipahami termasuk ayat *al-mutasyâbih*. Adapun jika *al-wâwu* itu untuk *al-'athaf* maka maknanya bahwa takwil ayat *al-mutasyâbih* itu juga diketahui oleh *ar-râsikhûna fî al-'ilmi* (orang-orang yang mendalam ilmunya). Ini sesuai dengan firman Allah QS Ali Imran [3]: 138 dan an-Nahl [16]: 89 tersebut.

Inilah contoh *bayân* dengan ijtihad atau *al-bayân al-mustanbath* (penjelasan yang di-*istinbâth*).

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

SYARIAH ISLAM

M. Taufik NT

Konsekuensi seseorang mengimani dan mengesakan Allah SWT adalah ketundukannya pada syariah-Nya. Demikian sebagaimana perkataan sebagian ulama:

اَلتَّوْحِيدُ يُوجِبُ الْإِيْمَانَ. فَمَنْ لَا إِيْمَانَ لَهُ لَا تَوْحِيدَ لَهُ. وَالْإِيْمَانُ يُوجِبُ الشَّرِيعَةَ. فَمَنْ لَا شَرِيعَةَ لَهُ لَا إِيْمَانَ لَهُ وَلَا تَوْحِيدَ لَهُ...

*Tauhid itu mengharuskan adanya iman. Siapa saja yang tidak punya iman maka ia tidak bertauhid. Iman menuntut syariah. Siapa saja yang tidak menerapkan syariah maka tidak ada iman dan tauhid pada dirinya...*¹

Pembahasan tentang hukum syariah setidaknya mencakup pembahasan tentang: (1) Siapakah *Al-Hâkim* (Pembuat Hukum); (2) *Al-Mahkûm 'alayhi* (Pihak yang dibebani dengan hukum syariah); (3) *Al-Mahkûm fih* (perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan taklif/pembebanan); (4) Hukum syariah itu sendiri.

Makna *Al-Hâkim*

Istilah *al-hâkim* dalam peradilan, maknanya adalah *al-qâdhî*. Dalam bidang politik, *al-hâkim* bermakna *munaffidzu al-hukmi bayna an-nâs* (pelaksana hukum di tengah-tengah manusia). Dua makna ini tidak dibahas dalam tulisan ini, yang akan dibahas adalah *al-hâkim* dalam terminologi ushul fikih, yakni yang bermakna:

مَنْ يَمْلِكُ إِصْدَارَ الْحُكْمِ عَلَى الْأَفْعَالِ وَعَلَى الْأَشْيَاءِ

*Pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan penilaian atas tindakan dan benda.*²

Mengapa yang dinilai hanya perbuatan dan benda? Hal itu karena sesuatu yang terindera kemungkinannya hanya ada dua hal tersebut. Yang dimaksud dengan “penilaian atas tindakan dan benda” adalah berkaitan dengan penilaian status perbuatan-perbuatan manusia dan barang-barang yang digunakan manusia, apakah baik ataukah buruk, apakah terpuji ataukah tercela.

Apakah penetapan hukum tentang baik dan buruk, terpuji dan tercela itu wewenang akal atau wewenang syariah (Allah SWT)? Inilah objek pembahasan *al-hâkim* ini. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang pertama dan paling penting berkaitan dengan hukum. Pasalnya, pengetahuan terhadap hukum dan jenis-jenisnya bergantung pada hal ini. Begitu juga sikap manusia terhadap suatu perbuatan, apakah dia lakukan atau tidak dilakukan, dia berhak memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, itu juga berkaitan dengan pembahasan ini.

Pembuat Hukum

Penilaian terpuji (*al-hasan*) dan tercela (*al-qabih*) atas perbuatan dan benda bisa dibagi dari tiga aspek: *Pertama*, dari segi realitasnya; apakah benda dan perbuatan

tersebut? *Kedua*, dari sisi kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan tabiat manusia dan kecenderungan fitrahnya. *Ketiga*, dari sisi pujian dan celaan atas pelakunya atau tidak ada pujian sekaligus celaan atas pelakunya; yakni dari sisi adanya pahala atau siksa atas pelakunya atau tidak ada pahala dan tidak ada siksa atas pelakunya.

Terkait dengan penilaian *al-hasan* dan *al-qabih* dari aspek pertama dan kedua, manusia dengan akalanya memiliki otoritas untuk itu. Imam asy-Syaukani di dalam *Irsyād al-Fuhūl* menyatakan:

وَقَدْ اتَّفَقَ الْأَشْعَرِيُّ وَالْمُعْتَزَلَةُ عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ
يُذَرِّكُ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ فِي شَيْئَيْنِ: الْأَوَّلُ: مُلَاءَمَةُ
الْعَرَضِ لِلطَّبْعِ وَمُنَافَرَتُهُ لَهُ، فَالْمُؤَافِقُ حَسَنٌ عِنْدَ
الْعَقْلِ، وَالْمُنَافِرُ قَبِيحٌ عِنْدَهُ. الثَّانِي: صِفَةُ الْكَمَالِ
وَالنَّقْصِ، فَصِفَاتُ الْكَمَالِ حَسَنَةٌ عِنْدَ الْعَقْلِ،
وَصِفَاتُ النَّقْصِ قَبِيحَةٌ عِنْدَهُ.

Asy'ariyah dan Muktazilah sepakat bahwa akal dapat memahami *al-hasan* dan *al-qabih* dalam dua sisi. *Pertama*, selaras tidaknya suatu objek dengan tabiat manusia. Yang selaras dengan tabiat adalah *hasan* (terpuji) menurut akal dan yang disharmoni adalah tercela menurut akal. *Kedua*, terkait sifat kesempurnaan dan kekurangan; sifat kesempurnaan adalah terpuji menurut akal dan sifat-sifat kekurangan adalah tercela menurut akal.³

Contoh lainnya, dalam dua aspek pertama, akal mampu memahami bahwa ilmu adalah terpuji dan kebodohan adalah tercela; kaya itu terpuji dan miskin itu tercela; sehat itu terpuji dan sakit itu tercela. Begitu juga tampak jelas bagi akal, apakah kecenderungan fitri manusia menyukai atau sebaliknya menjauhi. Menolong orang yang kesulitan adalah terpuji dan menyakiti orang lain adalah tercela; mem-

beri orang lain adalah terpuji dan mengambil harta orang lain secara paksa adalah tercela. Jelas, manusia itu cenderung pada perbuatan menolong orang kesulitan dan menjauhi dari menyakiti orang lain sebab tabiat manusia itu menjauhi kezaliman.

Akal menjadi *al-hâkim* dalam dua aspek itu. Sebabnya, hal itu kembali pada realita sesuatu yang bisa diindera oleh manusia dan dipahami oleh akalanya, atau kembali pada tabiat dan fitrah manusia. Manusia bisa merasakan dan akalanya bisa memahami. Karena itulah Rasulullah saw. marah kepada Muawiyah bin al-Hakam ra. saat mengetahui bahwa dia memukuli budaknya gara-gara ada gem-balaannya ada yang hilang. Di sisi lain beliau tidak marah saat Muawiyah bin al-Hakam berbicara spontan saat salat berjamaah karena ketidaktahuannya. Hal ini karena untuk mengetahui bahwa memukuli budak adalah tercela itu cukup dengan akal saja, sementara untuk mengetahui bahwa berbicara dalam salat itu tercela tidak ditetapkan oleh akal, sehingga orang yang baru masuk Islam seperti Muawiyah bin al-Hakam wajar saja tidak mengetahuinya.

Adapun penilaian terpuji dan tercela dari sisi ketiga, yakni dari sisi pujian dan celaan atau dari sisi pahala dan siksa di akhirat, maka *al-hâkim* terhadap perbuatan dan sesuatu dari sisi ini adalah syariah, bukan akal. Imam al-Haramain (w. 478 H) menyatakan:

ثُمَّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ التَّفْقِيحُ وَالتَّحْسِينُ وَهُمَا
رَاجِعَانِ إِلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فَلَا يَقْبَحُ شَيْءٌ فِي
حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى لِعَيْنِهِ كَمَا لَا يَحْسُنُ شَيْءٌ لِعَيْنِهِ

Kemudian, di antara hukum syariah adalah penetapan sesuatu tercela dan terpuji. Keduanya kembali pada perintah dan larangan (Allah). Maka dari itu, sesuatu tidak jelek dalam hukum Allah SWT karena zatnya, sebagaimana tidak terpuji karena zatnya.”⁴



Al-Hâkim dalam sisi ketiga ini adalah syariah semata tanpa akal. Hal itu berdasarkan argumentasi secara 'aqli dan naqli. Argumentasi secara 'aqli: *Pertama*, akal mustahil mengeluarkan hukum atas sesuatu yang tak bisa diindera. Keberadaan pujian dan celaan atas perbuatan dan sesuatu atau pahala dan siksa atas perbuatan atau sesuatu jelas tidak bisa diindera oleh akal. Karena itu mustahil akal bisa mengeluarkan status terpuji dan tercela atau pahala dan siksa atas perbuatan dan sesuatu. Itu artinya akal mustahil menjadi *al-hâkim*. *Al-Hâkim* dalam hal ini hanya syariah semata.

Kedua, status terpuji dan tercela itu tidak boleh diserahkan pada kecenderungan fitri manusia. Sebabnya, kecenderungan manusia itu menilai terpuji atas apa yang sesuai dengan kecenderungan itu dan menilai tercela apa yang tidak sesuai. Tak jarang, kecenderungan manusia sesuai dengan apa yang justru tercela seperti zina, riba, menampakkan kecantikan di muka umum, dsb. Sebaliknya, tak jarang kecenderungan manusia mencela sesuatu yang justru terpuji, seperti memerangi musuh, amar makruf nahi mungkar, berinfak, dsb. Menyerahkan penilaian status terpuji dan tercela pada akal artinya menyerahkan status hukum pada kecenderungan manusia atau hawa nafsu manusia. Ini akan mendatangkan bahaya (*dharar*) bagi umat manusia.

Ketiga, penilaian akal dan kecenderungan manusia itu dipengaruhi oleh kepentingan, situasi, lingkungan dan waktu. Akibatnya, penilaian manusia akan berubah-ubah. Ini berbahaya dalam hal penilaian terpuji dan tercela; menyebabkan status hukum yang salah dan berubah-ubah.

Dengan demikian penilaian terpuji dan tercela atas perbuatan dan sesuatu itu tidak boleh diserahkan pada akal, melainkan pada syariah. Sebab, syariahlah yang mengetahui hakikat terpuji dan tercela, pahala dan siksa atas perbuatan dan sesuatu.

Adapun argumentasi secara *naqli* atau secara *syar'i*, syariah telah mengaitkan penilaian terpuji dan tercela dengan perintah untuk mengikuti Rasul saw. dan mencela hawa nafsu. Banyak ayat al-Quran yang mengaitkan pahala dan surga atas apa yang diperintahkan atau dihalalkan oleh syariah, sebaliknya mengaitkan siksa dan neraka dengan apa yang dilarang atau diharamkan. Karena itu, sesuatu yang dipastikan secara *syar'i* bahwa *al-hasan* adalah apa yang dipuji oleh syariah dan *al-qabih* adalah apa yang dicela oleh syariah.

Imam as-Sarakhsi (w. 483 H) menyatakan:

أَنَّ الْحَسَنَ مُطْلَقًا مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ وَالْقَبِيحَ مَا قَبَّحَهُ الشَّرْعُ

*Apa yang benar-benar terpuji adalah apa yang dinilai terpuji oleh syariah dan apa yang benar-benar tercela adalah apa yang dinilai tercela oleh syariah.*⁵

Dengan demikian, *al-hâkim* atas perbuatan dan sesuatu hanyalah syariah. Artinya, yang berhak menetapkan hukum atas perbuatan dan sesuatu hanyalah syariah, bukan akal. Inilah perbedaan dan kontradiksi paling mendasar antara Islam dan demokrasi.

Wallâhu a'lam. []

Catatan kaki:

1. KH. Hasyim Asy'ari, *Adabul 'Alim Wal Muta'allim* (Jombang: Maktabah at-Turats al-Islamy, t.th), h. 12.
2. Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Syakhsiyyah al-Islâmiyyah*, Cet. III., vol. 3 (Beirut: Dâr al-Ummah, 2005), h. 14.
3. Muhammad bin 'Ali As-Syaukani, *Irsyâd Al-Fuhûl Ilâ Tahqîq al-Haqqî Min 'Ilm al-Ushûl*, Cet. I. (Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arabi, 1999), Juz 1, h. 28.
4. Imâm al-Haramain Abu al-Ma'âli Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, *Al-Burhân Fî Ushûl al-Fiqh*, Pentahkik. Shalah bin Muhammad bin Uwaidhah, Cet. I. (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), Juz 1, h. 8.
5. Imam as-Sarakhsi, *Ushûl As-Sarakhsi* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), Juz 2, h. 65.

MILITER KUAT, BEBAS DARI OLIGARKI DAN PENGARUH BARAT

Hanif Kristianto (Analisis Politik dan Media)

Peran militer dalam negara begitu penting. Militer berperan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, melindungi keamanan nasional, alat pertahanan terhadap invasi asing, diplomasi untuk daya tawar internasional dan menjaga martabat bangsa. Kuat dan tidak suatu negara sering dilihat dari kekuatan militernya. Bahkan untuk mendukung kekuatan militer, anggaran negara pun digelontorkan begitu besar.

Militer dipengaruhi oleh ideologi, politik, ekonomi dan hukum yang diterapkan negara. Jika negara mengadopsi demokrasi dalam politiknya, maka militer menjaga sepenuh jiwa penerapannya. Tanpa mempedulikan baik dan buruknya. Baru ketika dalam situasi genting, militer menjadi penjaga utama dengan mengambil pemerintahan sipil sementara. Khususnya keamanan dan ketertiban dalam darurat militer.

Struktur dan unsur pembentukan militer suatu negara sering tak lepas dari pengaruh asing. Apalgi pengaruh penjajah Barat di negeri-negeri Islam sangat signifikan. Kondisi ini terwujud setelah Perang Dunia I dan 2, juga setelah keruntuhan kedigdayaan militer Khilafah Turki Utsmani. Demi menghegemoni wilayah bekas jajahannya, penjajah Barat

menancapkan ideologi jahatnya (Kapitalisme) untuk diadopsi dan diwariskan. Alhasil, militer pun diintervensi dan dalam kendalinya.

Pengaruh Asing di Tubuh Militer

Ketika Khilafah Islamiyah runtuh, Barat segera menyusun strategi untuk menyiapkan sistem dan orang yang akan menjadi penjaganya. Orang-orang yang dipilih dididik dan didukung sebagai kepanjangan tangan Barat di negerinya. Melalui militer, asing menanamkan pengaruhnya:

1) Doktrin dan Strategi Militer.

Penanaman doktrin dan strategi dilakukan secara sistemis di pusat pendidikan militer Barat seperti: The US Military Academy (1802), West Point, New York; Royal Military Academy Sandhurst (1741), Camberley, UK; Voroshilov General Staff Academy (1936) Rusia; PLA National Defense University (1985), Beijing, China; École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (1802), Brittany, Perancis; Helmut Schmidt University–Bundeswehr University Hamburg (1973), Jerman.

Pendirian King Abdulaziz Military Academy (1955), Arab Saudi, menjadi pelatihan perwira Angkatan Darat Arab Saudi dengan



pengaruh besar dari akademi militer Barat seperti Sandhurst (Inggris) dan West Point (AS).

2) *Campur Tangan Politik dalam Militer.*

Sejak Perjanjian Camp David (1979), AS telah memberikan bantuan militer tahunan kepada Mesir untuk pertahanan dan perang melawan 'terorisme'. Mesir menerima USD1,3 miliar pada tahun 2024. AS memiliki pengaruh besar dalam politik Mesir dengan dukungannya pada kudeta militer yang menggulingkan Presiden Muhammad Morsi tahun 2013. Jenderal Abdel-Fattah El-Sisi kemudian naik menjadi presiden atas restu AS.

Adapun Indonesia, AS tidak langsung memberikan bantuan dana militer, namun lebih pada kerja sama mitra strategis dan latihan bersama. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan sejumlah pejabat AS lainnya di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut membahas kemitraan dialog strategis antar kedua negara dari mulai soal kesehatan hingga perdagangan.¹

TNI Angkatan Darat (AD) menggelar latihan bersama dengan US Army di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AD di Martapura, Batu Raja, Sumatera Selatan (Sumsel). Latihan bertajuk Garuda Shield ke-15 berlangsung 1-14 Agustus 2021. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dan Commanding General USARPAC General Charles A. Flynn hadir pada upacara pembukaan. General Flynn mengatakan latihan ini merupakan simbol dari tujuan yang lebih besar dari kerja sama militer Indonesia dan Amerika di masa depan.

3) *Keberadaan Pangkalan Militer.*

Pangkalan militer berdiri tegak di Timur Tengah. Pangkalan udara terbesar AS di Al-Udeid Air Base, Qatar, digunakan untuk operasi militer di Irak, Suriah dan Afganistan.

Pangkalan di Arab Saudi sejak Perang Teluk tahun 1991. Markas utama armada ke-5 Angkatan Laut AS di Naval Support Activity, Bahrain, mengontrol jalur perdagangan minyak di selat Hormuz.

Dampak keberadaan pangkalan ini, negara di Timur Tengah tidak bersikap independen dalam kebijakan luar negeri AS, terutama terkait Palestina dan Iran. AS pun memiliki akses langsung mengintervensi konflik di Dunia Islam kapan pun diperlukan.

4) *Ketergantungan pada Alutsista dan Teknologi Barat.*

Negara-negara Teluk dan Mesir menyumbang lebih dari 25% penjualan senjata global dalam empat tahun terakhir, menurut sebuah laporan yang dirilis Senin. Laporan empat tahunan The Stockholm International Peace Research Institute's (SIPRI) tentang transfer senjata internasional merinci impor dan ekspor senjata di seluruh dunia antara tahun 2019 dan 2023.

Arab Saudi merupakan importir senjata terbesar kedua di dunia dari tahun 2019 hingga 2023, dengan pangsa pasar sebesar 8,4%. Qatar berada di posisi ketiga dengan pangsa pasar sebesar 7,6%. Menurut data SIPRI, India merupakan importir terbesar dengan pangsa pasar global sebesar 9,8%.²

Ketergantungan ini mengikat kebijakan luar negeri negara pemasok serta ketersediaan suku cadang dan pemeliharaan yang dikendalikan oleh negara produsen. Alhasil, penentuan strategi pertahanan dengan senjata teknologi asing membutuhkan pelatihan dan doktrin sesuai standar negara produsen.

Ketika pengaruh asing semakin kuat di militer, maka penjajah Barat hakikatnya ingin terus mencengkram Dunia Islam yang telah kehilangan pelindungnya.

Motif Barat Mengendalikan Militer

Barat memahami bahwa dengan mengontrol militer, berarti tidak lagi harus



capek-capek berkorban dalam peperangan fisik yang melelahkan dan mengeluarkan banyak uang. Di sisi lain, Barat memahami cara yang efektif dan efisien. Di antaranya:

Pertama, menjaga dominasi global untuk memastikan tidak ada kekuatan lain yang mampu menandingi dan menantang dominasinya.

Kedua, mencegah kebangkitan kekuasaan Islam. Barat menyadari kekuatan militer Dunia Islam jika dilandasi aqidah Islam untuk mengusir penjajahan. Militer dipandang sebagai kekuatan perlawanan dominasi Barat di negeri-negeri Muslim pada masa penjajahan maupun sesudahnya.

Ketiga, mengamankan ketersediaan sumber daya alam. Mayoritas dunia Islam kaya SDA. Barat ingin masuk melalui Multi National Company-nya. Demi menjaga keamanan dan eksistensi kepentingan eksplorasi SDA, keamanan menjadi isu sentral. Upaya mulus mengontrol militer berarti akses langsung terhadap SDA.

Keempat, menjaga rezim yang pro-Barat. Dunia sudah memahami bahwa pemimpin Dunia Islam masih menaruh harapan dan loyalitas kepada Barat. Bahkan mereka tak segan bergandengan tangan dengan negara yang telah menjajah Dunia Islam. Tak pelak, pemimpin itu menjadi kaki tangan dan pemimpin boneka atas restu dan kendali Barat. Karena itu, melalui anteknya, Barat dengan mudah memasuki setiap lini Dunia Islam dengan tujuan hegemoni atas penjajahan baik fisik maupun non-fisik.

Langkah Strategis Melepas Cengkeraman

Oligarki dalam tubuh militer mengacu pada sekelompok kecil elit, baik dari kalangan penguasa, pengusaha maupun pihak asing, yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan militer suatu negara. Di banyak negara Islam, oligarki ini sering didukung oleh kepentingan Barat untuk memastikan

militer tetap tunduk pada kepentingan mereka. Upaya mendidik sejak taruna disiapkan untuk menanamkan ideologinya. Pengkaderan secara sistemis bahkan memberikan dukungan untuk naik jabatan. Karena itu militer kerap berpihak pada kepentingan oligarki dan asing daripada membela kepentingan rakyat.

Langkah melepaskan kendali dari asing dan oligarki dalam militer bisa ditempuh sebagai berikut:

Pertama, penguatan ideologi yang shahih (Islam). Barat dan oligarki dengan ideologi kapitalismenya begitu merusak struktur berpikir dan bertindak militer di Dunia Islam. Penguatan ideologi Islam menjadi *bargaining position* yang lebih kuat. Keyakinan terhadap ideologi Islam ditanamkan untuk menguatkan daya berpikir kritis dan bertindak sejalan dengan Islam.

Kedua, membangun loyalitas pada Islam dengan pembinaan intensif, mulai dari aqidah, syariah, *siyaasah*, fiqih dan dakwah. Penetrasi *tsaqaafah* Islam akan menguatkan militer untuk mempersembahkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan kepada asing maupun oligarki. Dedikasinya tinggi karena puncak dari semua adalah ridha Allah.

Ketiga, menghadirkan ulama untuk mengajarkan Islam dan kisah-kisah heroisme pejuang. Tujuannya menumbuhkan ketakwaan dan *ghiiirah* untuk berjihad di jalan Allah.

Keempat, membangun kekuatan militer yang mandiri, baik sarana maupun prasarana. Kemandirian ini sejalan dengan ideologi Islam untuk membangun industri militer yang kuat demi menjaga negara dan menyebarkan Islam ke seluruh alam.

Kelima, memanggil generasi terbaik dari umat untuk penelitian alutsista dan teknologi militer modern. Tujuannya adalah untuk menanggulangi embargo dan hegemoni teknologi. Di sisi lain, kemampuan mengimbangi kekuatan militer musuh dan membuatnya gentar.



Keenam, negara dengan sumber dananya menyediakan segala kebutuhan sarana dan prasarana militer. Termasuk menanggung semua kebutuhan pasukan dalam nafkah, keluarga dan segala urusannya. Biaya penelitian untuk menjamin peneliti menghasilkan inovasi teknologi militer terkini.

Langkah ini juga perlu diimbangi dengan mengembalikan fungsi militer yang sesuai tugasnya. Militer tetap harus dalam kendali pemimpin yang shahih. Tujuannya untuk mengontrol dan mengaturnya sesuai kepentingan negara. Tidak boleh militer terjun melindungi kepentingan bisnis oligarki dan elit politik. Posisinya jelas sebagai penjaga negara, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Perlu juga meniadakan perbedaan kelas antara militer dengan rakyat sipil. Sebabnya, militer adalah mitra masyarakat, penjaga keamanan dan segala macam perlindungan untuk masyarakat.

Fungsi militer dalam menjaga kondisi dalam negeri di antaranya:

- 1) Melindungi pengemban dakwah dan menjaga penerapan syariah Islam *kāffah* oleh negara. Hal inilah yang menguatkan negara dalam satu ikatan yang sama secara pemikiran, perasaan dan aturan.
- 2) Menjaga kedaulatan dan keamanan. Khususnya mencegah pemberontakan dan separatisme. Juga menjaga perbatasan negara dari infiltrasi asing.
- 3) Menjaga ketertiban bersama kepolisian untuk stabilitas yang kondusif serta menjaga stabilitas politik dari ancaman intervensi asing.
- 4) Melindungi masyarakat dari ragam upaya kezaliman penguasa, hadir dalam kedaruratan bencana, serta memberikan rasa aman dan bagi rakyat dari musuh-musuh Islam.

Adapun untuk kepentingan luar negeri militer berperan:

- 1) Menjaga kedaulatan Islam dari ancaman eksternal berupa serangan musuh, baik berbentuk kekuatan militer asing maupun operasi intelijen yang merusak stabilitas umat. Hal ini juga menjaga agar tidak dikuasai oleh asing.
- 2) Jihad untuk menyebarkan dan membe-la Islam. Ekspedisi perluasan dakwah ini dilindungi oleh pasukan terpilih dan menjadikan Islam rahmatan lil 'alamin, juga sebagai upaya melindungi kaum muslim dari kezaliman penguasa yang menindas.
- 3) Menjadi garda terdepan dalam memimpin dunia. Kekuatan militer dalam Islam berfungsi untuk melindungi umat Islam dan membebaskan mereka dari penjajahan, serta menjadi contoh dalam menegakkan keadilan; bukan sebagai alat penjajahan atau eksploitasi sebagaimana penjajah Barat.

Khatimah

Mewujudkan militer yang independen, profesionalitas dan kuat bisa terwujud jika segaris dengan ideologi Islam. Hal ini karena Islam membebaskan penghambaan dari manusia hanya kepada Allah. Dengan itu militer memiliki loyalitas bukan asal bos senang atau malah menjadi kaki tangan asing. Khilafahlah yang akan mewujudkan militer digdaya dan menjadi penjaga syariah yang utama. Militer kuat, bebas dari cengkraman oligarki dan penjajah Barat, bukanlah isapan jempol.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

- 1 "Indonesia-AS Makin Mesra: Bantuan Triliunan Hingga Latihan Bersama" <https://news.detik.com/berita/d-5671541/indonesia-as-makin-mesra-bantuan-triliunan-hingga-latihan-bersama?page=1>
- 2 Saudi Arabia, Qatar, Egypt among world's top arms importers: SIPRI <https://www.al-monitor.com/originals/2024/03/saudi-arabia-qatar-egypt-among-worlds-top-arms-importers-sipri>



SIARAN PERS AMERIKA MENGELUARKAN PERINGATAN TENTANG KEMUNCULAN KEMBALI KHILAFAH

Setiap kali umat Islam melangkah maju menuju pembebasan dari beban kolonialisme yang menindih dada mereka, juga berusaha membebaskan diri dari hegemoni Barat, kekuatan-kekuatan Barat mengeluarkan peringatan. Mereka khawatir bahwa usaha-usaha dari para pejuang yang tulus dari umat ini akan berujung pada pendirian Khilafah Rasyidah *'alâ Minhâj an-Nubuwwah* sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah saw. Oleh karena itu, Amerika dan aliansi Salibnya mengerahkan kekuatan mereka setelah pelarian tiran Suriah, Bashar al-Assad, dan masuknya para revolusioner ke Damaskus. Mereka mengirim utusan demi utusan, baik senior maupun junior, yang mewakili pemerintah mereka, untuk mengatasi peristiwa yang dianggap penting oleh

Amerika dan aliansi Salibisnya. Jika keadaan tidak terkendali, akibatnya tidak akan baik bagi kaum kafir.

Di sisi timur Dunia Islam, di Bangladesh, Amerika dan agennya, India, telah memantau situasi di sana dengan sangat cemas, setelah pelarian tiran Hasina. Mereka khawatir keadaan di sana akan berbalik mendukung Islam dan para pengikutnya. Mereka tahu bahwa Islam adalah satu-satunya pilihan yang akan dipilih oleh hati umat Islam di seluruh dunia, termasuk Bangladesh, jika mereka dibiarkan tanpa campur tangan para penguasa Muslim, yang merupakan agen-agennya Barat. Oleh karena itu, Amerika mengirim orangnya, Muhammad Yunus, dari pengasingan untuk menahan pemberontakan mahasiswa yang memaksa tentara Bangladesh untuk meng-

gulingkan tiran Hasina, dan menyelundupkan dia ke India.

Dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi India NDTV, Tulsi Gabbard, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, mengklaim bahwa penganiayaan dan pembunuhan terhadap minoritas agama di Bangladesh serta “ancaman teroris islamis” di negara itu “berakar pada ideologi dan tujuan yang sama, yaitu untuk memerintah atau mengatur dengan Khilafah Islam.”

Pernyataan ini muncul setelah Hizbut Tahrir Wilayah Bangladesh mengadakan “Khilafah March” pada hari Jumat, 7 Maret 2025, untuk mengingatkan orang-orang tentang kehancuran Khilafah, dan menyeru mereka untuk bekerja menuju pendirian Khilafah Rasyidah ‘alâ Minhâj an-Nubuwwah. Aksi tersebut merupakan surat terbuka kepada masyarakat negara itu, khususnya para pemegang kekuasaan dan perlindungan, untuk memberikan *nushrah* kepada Hizb dalam upaya mendirikan Khilafah (Khilafah), pada peringatan kehancurannya. Meskipun pemerintah sementara menindas aksi tersebut dengan brutal, hal itu tidak membantu orang yang didukung Amerika, presiden sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, seorang penerima Hadiah Nobel Perdamaian, dan teman setia mantan Presiden AS Bill Clinton selama empat puluh tahun. Pemerintah sementara Yunus mendapat berkah dari pemerintah AS, setelah bertemu dengan mantan Presiden AS Joe Biden di New York.

Agen-agen para penjajah berusaha memenuhi harapan tuan mereka. Oleh karena itu, respon dari pemerintah sementara Bangladesh terhadap pernyataan Tulsi Gabbard melampaui harapan, dengan menyatakan bahwa pernyataan tersebut “sangat merusak dan merusak citra serta reputasi Bangladesh, sebuah negara yang praktik Islam tradisionalnya terkenal inklusif dan damai serta

Meskipun Amerika sering berbicara secara tertutup dengan penguasa, dan jarang mengungkapkannya secara terbuka, mereka menganggap dakwah untuk menghidupkan kembali kehidupan Islam di Bangladesh dan negara-negara Muslim lainnya secara serius, bukan sebagai lelucon.

telah membuat kemajuan luar biasa dalam perjuangannya melawan ekstremisme dan terorisme.”

Pemerintah sementara Bangladesh dan negara dalam negara (*deep state*) mereka sepenuhnya berkomitmen untuk perang melawan Islam, dan untuk mencegah kembalinya Khilafah (Khilafah) di negara itu. Komitmen ini bukan hal baru. Komitmen ini sudah tertanam dalam ranah politik Bangladesh, yang tidak berubah dengan pelarian tiran Hasina. Sebaliknya, negara dalam negara telah mempertahankan kesetiaannya yang lama kepada Barat, berhubungan dengan kedutaan-kedutaan Barat dan kekuatan-kekuatan kolonialis, serta menerima petunjuk dari mereka, sebagaimana yang dilakukan pada masa Hasina. Oleh karena itu, respon mereka merupakan bantahan terhadap pernyataan Gabbard, yang secara tersirat menuduh mereka lalai. Padahal mereka sedang melakukan segala daya untuk memerangi Islam dan menekan Dakwah untuk Khilafah (Khilafah).

Apa yang gagal dipahami oleh para penguasa Muslim, termasuk di Bangladesh dan negara dalam negara mereka, adalah bahwa Amerika sangat ketakutan dengan sekadar menyebutkan Islam di negara-negara Muslim. Meskipun Amerika sering berbicara secara tertutup dengan penguasa, dan jarang mengungkapkannya secara terbuka, mereka menganggap dakwah untuk menghidupkan kembali kehidupan Islam di Bangladesh dan negara-negara Muslim lainnya secara serius, bukan sebagai lelucon. Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat dan negaranya sangat paham bahwa Islam adalah alternatif yang mulia dan beradab untuk peradaban Barat mereka yang serakah dan korup. Jika para pendukung Khilafah (Khilafah) dibiarkan bersama dengan umat Islam lainnya, mereka akan menerima dakwah tersebut, memilih pemerintahan Islam, dan memberikan baiat kepada Khalifah (Pemimpin Khilafah) mereka untuk memerintah sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Oleh karena itu, kebijakan Amerika dan aliansi Salibisnya adalah kebijakan yang bersifat pencegahan. Ini berdasarkan permintaan agar agen-agen dan pengikut mereka di negara-negara Muslim semakin mengisolasi dakwah umat Islam melalui larangan, penganiayaan, penahanan dan penindasan dengan segala kekuatan mereka. Demikian seperti yang dilakukan oleh Quraisy terhadap junjungan umat manusia, Muhammad saw., ketika mereka memboikot beliau dan para Sahabat beliau, menyiksa mereka, melarang mereka, dan menyebarkan kebohongan di kalangan suku-suku tentang as-Sadiq al-Amin (yang terpercaya dan jujur) dan tentang dakwah Rasulullah saw. Namun, Allah SWT telah berjanji akan membuat Islam menang atas semua agama. Hal yang sama akan segera terjadi, insya Allah meskipun Amerika

dan kepala intelijennya membencinya. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, sementara Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak suka* (QS at-Taubah [9]: 31).

Perlu dipertimbangkan bahwa rakyat kami di Bangladesh, dan yang tulus dalam Tentara Bangladesh, sedang menjadi sasaran kekuatan-kekuatan kafir Barat. Kekuatan-kekuatan ini tidak menginginkan kebaikan bagi mereka, yang terwujud dalam kembalinya Islam dan pemerintahan dengan semua yang telah Allah wahyukan. Oleh karena itu, mereka berusaha mencegah kedekatan para *ahlul quwwah*, para tentara dengan para pengemban dakwah untuk mendirikan Khilafah. Oleh karena itu, mereka harus memahami benang-benang dari konspirasi ini, dan berusaha menggagalkannya dengan bekerja serius bersama Hizb ut Tahrir. Demikian pula, umat Islam yang tulus dalam Tentara Bangladesh harus segera memberikan *nushrah* kepada Hizb sebelum Amerika berhasil memberdayakan agen-agen mereka di Bangladesh, dan mungkin bahkan mengembalikan tiran Hasina ke kekuasaan, sekali lagi. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Orang-orang yang kafir dari kalangan Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan kebaikan dari Tuhanmu diturunkan kepada kamu. Namun, secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah adalah Pemilik karunia yang besar* (QS al-Baqarah [2]: 105). [Kantor Media Pusat Hizb ut Tahrir]

ISLAMISASI KARAWANG RAYA

(Dari Syaikh Qura Hingga Kesultanan Islam) (Selesai)

Ahmad Abdurrahman al-Khaddami

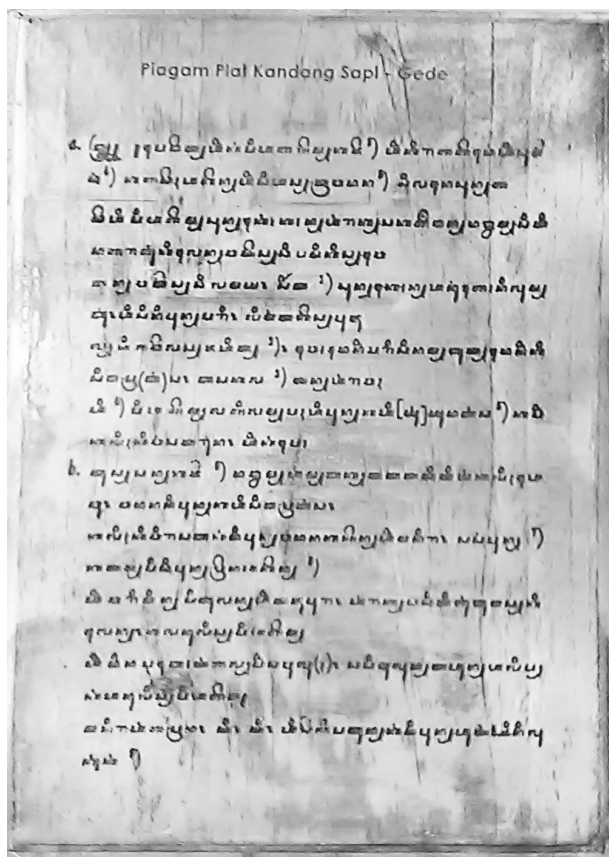
Susuhunan Agung mengutus kembali Wiraperbangsa dari Galuh dengan membawa 1000 prajurit dan keluarganya menuju Karawang. Tujuannya adalah membebaskan Karawang dari pengaruh Banten dan mempersiapkan logistik untuk penyerangan kembali kafir Belanda di Batavia. Ini sebagaimana tugas yang diberikan kepada Aria Wirasaba yang telah dianggap gagal. Tugas yang diberikan kepada Wiraperbangsa dapat dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan kepada Susuhunan Agung. Wiraperbangsa dianugerahi jabatan *wedana* (setingkat bupati) di Karawang Raya dan diberi gelar Adipati Kertabumi III. Dia pun diberi hadiah sebilah keris *Karosinjang*. Kemudian Wiraperbangsa wafat dan digantikan sang putra, Raden Singaperbangsa, yang bergelar Adipati Kertabumi IV. Tugas pokoknya ialah mengusir kafir Belanda dengan mendapat tambahan prajurit 2000 dan keluarganya, serta membangun pesawahan untuk mendukung logistik kebutuhan perang. Selanjutnya peran Aria Wirasaba juga dilaporkan kepada Mataram.

Atas jasa keduanya dibuatkan sebuah piagam yang dikenal sebagai *Piagem Kuningan Kandangsapi*. Berikut ini isi dari piagam yang dimaksud:

"Panget ingkang piagem Kangjeng ing Ki Rangga Gede ing Sumedang kagadaha-ken ing si Astrawadana, milane sun gadehi piagem sun kongkon angraksa kagengan Dalem Siti Nagara Agung, kilen wates Cipamingkis, wetan wates Cilamaya, sir-ta sun kon anunggoni lumbung isinipun pari limang takes punjul tigawelas jait. Wondening pari sinambut dening Ki Singaperbangsa. Basa kala tan angrawahi piagem, lagi lampahipun Kiai Judabangsa kaping kalih Ki Wangsaturuna. Inggang putusan Kangjeng Dalem Ambakta tata titi ang kalih ewu, wedanasipun Ki Singaperbangsa kalih Ki Wirasaba kang dipunawadanaken ing manira. Sasang-pun katampi dipun prenahaken ing Wa-ringinpitu lan ing Tanjungpura. Angraksa Siti gung Bungas kilen kala nulis piagem ing dina Rebo tanggal ping sapuluh sasih Mulud taun Alip, kang anulis piagem ma-nira Anggaprana Ti Ti". (Diperingatkan

tentang piagem dari Kangjeng [Susuhunan Agung] kepada Ki Rangga Gede Sumedang, yang dititipkan kepada si Astrawadana. Oleh karena dia (Astrawadana) membawa tugas memelihara (memeriksa) tanah kekuasaan Ratu Nagara Agung Keprabon itu sebelah barat dibatasi oleh Cipamingkis dengan sebelah timur oleh Cilamaya. Selanjutnya Astrawedana harus menunggu lumbung padi yang berisi lima takes 13 jahit. Padi tersebut kemudian harus diangkut oleh Ki Singaperbangsa jika surat perintahnya sudah diterima. Surat itu kemudian akan disampaikan oleh Kyai Judabangsa dan Ki Wangsataruna yang sekarang sedang dalam perjalanan membawa dua ribu orang. Kedua ribu orang tersebut akan diserahkan di bawah Ki Singaperbangsa dan Ki Wirasaba sebagai wedana. Keduanya telah diangkat oleh Ratu. Bila surat pengangkatannya itu sudah datang, mereka harus ditempatkan di Waringinpitu dan di Tanjungpura. Tugasnya adalah menjaga Nagara Agung dari sebelah barat. Piagem ini ditulis pada hari Rebo tanggal 10 Mulud tahun Alip. Penulisnya Anggaprana Ti Ti).

Dari *piagem* tersebut dapat dipahami bahwa akan datang Kyai Judabangsa dan Ki Wangsataruna membawa sebanyak dua ribu orang rakyat. Rangga Gede Sumedang diperintahkan melantik Ki Adipati Singaperbangsa dan Aria Wirasaba masing-masing sebagai



Wadana (Bupati) Negara Agung (Karawang). Batas-batasnya sebelah barat dibatasi Cipamingkis dan sebelah timur dibatasi Cilamaya, dengan pembagian wilayah Tanjungpura dan Waringinpitu. Sebagaimana disebutkan dalam nukilan *angraksa kagengan Dalem Siti Nagara Agung*, peranan Karawang Raya sangat penting sebagai batas wilayah Priangan - Mataram, serta untuk logistik mujahidin, *anunggoni lumbung isinipun pari*. Jejak paling jelas ialah proyek lumbung padi yang hingga kini masih terlihat dengan betapa luasnya bentangan persawahan di Karawang Raya. Penataan sawah berpetak jelas berbeda dengan *ngahuma* yang menjadi budaya urang Sunda.

Pada era berikutnya terjadi banyak dinamika antara Banten, Sumedang, Cirebon dan Mataram. Setelah Mataram gagal kedua kalinya mengalahkan kafir Belanda di Batavia, terjadi “konflik internal” antara Adipati Ukur dan Mataram dan pendukungnya. Selanjutnya, penguasa Banten dan Mataram mendapat gelar Sultan dari Khalifah Utsmaniyah melalui Syarif Makkah. Kemudian pasca wafatnya Sultan Abu al-Mafakhir dan Sultan Agung Hanyakrakusuma, terjadi upaya pembebasan Tatar Sunda dan Tlatah Jawi dari pengaruh kafir Penjajah Belanda. Upaya tersebut merupakan kerjasama antara Wakil Khalifah Sultan Ageung Tirtayasa dari Banten, Aria Tangerang Imam Wangsakara, Panembahan Maduretna Trunajaya, Sultan Sepuh Cirebon, Bupati Ukur Wiraangunangun dan Bupati Sukapura Wiradadaha serta Cili Widara Bali. Disayangkan, posisi Karawang Raya saat itu menjadi “pusaran konflik” karena Bupati Karawang lebih memilih setia dengan penguasa Mataram Amangku Rat I, sekutu kafir Penjajah Belanda. Pada akhirnya, upaya jihad semesta tersebut belum berhasil mengusir kafir Belanda namun cukup menunjukkan betapa perjuangan Islam begitu kuat di Tatar Sunda, sekaligus membuktikan sikap khianat dan berpecah-belah menjadi “kekuatan utama” bagi kafir Belanda menjajah Bilad al-Jawi.

Khatimah

Demikianlah lintasan sejarah Islam yang dilalui Karawang Raya sejak era Syekh Qura hingga masa Kesultanan. Pada intinya, Karawang Raya merupakan negeri para pejuang Islam! Peristiwa Rengasdengklok hanyalah bagian kecil dari sejarah Karawang

Raya. Selanjutnya, islamisasi Karawang Raya diemban oleh para menak Sunda trah Aria Wangsagoparana dan ulama alumni al-Haramain, Ashab al-Jawiyyah. Di antara tokohnya semisal Bupati Karawang Dalem Solawat Rd. H. Muhammad Siraj Suriawinata dan Penghulu Karawang Syekh Baing Rd. H. Muhammad Yusuf serta Mama Sempur Plered Syaikh Tubagus Ahmad Bakri dan para muridnya di Karawang, Bekasi, Subang dan Purwakarta.

Wallâhu a'lam. [Tamat]

Referensi Utama

1. *Sunan Gunung Jati (Antara Fiksi dan Fakta)*, karya Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.
2. *Menyusuri Jejak Kesultanan Banten*, karya Prof. Dr. Titik Pudjiastuti
3. *Menuju Keemasan Banyumas*, karya Prof. Dr. Sugeng Priyadi
4. *Aria Wangsakara Tangerang*, karya Mufti Ali, Ph.D.
5. *Sajarah Sukapura*, karya Dr. Emuch Herman-soemantri

Lampiran Daftar Tokoh

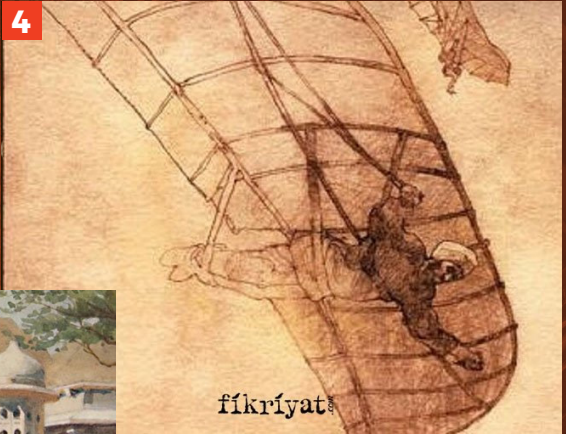
1. Syaikh al-Qurra` atau Syekh Qura Maulana Hasanuddin, Tanjungpura
2. Syekh Bentong putra Syekh Qura, Tanjungpura
3. Nyai Subanglarang santri Syekh Qura, Tanjungpura
4. Pangeran Senapati Mangkubumi atau Banyak Belanak, Udug - Udug
5. Aria Wirasaba Surengrana, Waringinpitu
6. Adipati Kertabumi III Wiraperbansa, Tanjungpura
7. Adipati Kertabumi IV Singaperbanga, Tanjungpura

Ilmuwan Muslim dan Penemuan yang Mereka Berikan Kepada Dunia (Bagian 2)

Orang pertama dalam sejarah yang membangun mesin terbang pertama dan melakukan upaya nyata untuk terbang adalah Abbas ibn Firnas dari Cordoba, yang hidup pada abad ke-9. Firnas, yang memiliki karakter ingin tahu dan suka menyelidiki, menarik perhatian orang-orang sezamannya dengan banyak penemuannya dan diberi gelar "Hakim-ül Andülüs" oleh penguasa saat itu.

4

4



5

IBNU YUNUS - JAM BANDULUM (ASTRONOMI)

5 Astronom besar Ibnu Yunus, yang tumbuh di Mesir, dikenal di Eropa sebagai Aben Jenis. Ibnu Yunus, yang ayahnya merupakan salah seorang ulama hadis dan sejarawan terkenal saat itu, memulai pendidikannya di usia muda. Ulama yang sangat menguasai ilmu astronomi ini mengupas tuntas subjek-subjek standar astronomi Islam dalam az-Zij al-Hakimi, salah satu tabel astronomi terlengkap yang pernah disusun di dunia Islam.

Ibn Yunus menghabiskan sebagian besar hidupnya mempelajari bintang-bintang dan terutama planet-planet. Ia menemukan nilai koordinat delapan belas bintang pada bola langit. Dia fokus pada gerakan dan aktivitas mereka. Ia menemukan bandul, alat yang digunakan untuk mengamati bintang dan membantu menentukan periode kemunculan dan menghidupkannya bintang.



6

6 Meskipun orang Barat menghubungkan hal ini dengan ilmuwan Italia terkenal Galileo, penelitian menunjukkan bahwa Ibn Yunus menemukan bandul tujuh abad sebelum Galileo. Ibnu Yunus jugalah yang menggunakan bandul pada jam.

Ibnu Yunus juga menitikberatkan pada masalah pengukuran waktu dan penentuan azimuth matahari dengan metode proyeksi dari ketinggian matahari, dan ia pun membuat tabulasi penguk-

ukuran ketinggian matahari yang dilakukan untuk arah kiblat dan azimuth tertentu, dan ia pun merangkum solusi geometris yang dibawa oleh para astronom muslim lainnya terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan penentuan arah kiblat. Teorinya tentang jam matahari juga ahli dan rumit.

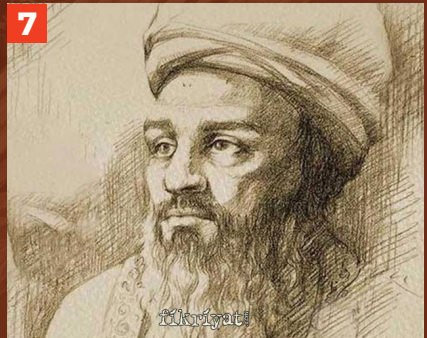
Dari teori ini juga dipahami bahwa ia bekerja pada jam horizontal dan vertikal. Zicin 77-81. bagian tentang astrologi.

Ilmuwan Muslim dan Penemuan yang Mereka Berikan Kepada Dunia (Bagian 2)

JABIR BİN HAYYAN- PEMBAGIAN ATOM (KIMIA)

Jabir Hayyan, ahli kimia terbesar dunia Islam, hidup antara tahun 721-805. Berasal dari Turki, Jabir bin Hayyan tinggal di istana Khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid. Meskipun karya Jabir mencakup bidang kedokteran, astronomi, matematika, filsafat, dan bidang ilmiah lain pada masanya, ia terutama adalah seorang ahli kimia. Jabir Hayyan, yang mengembangkan metode khusus dalam penelitian ilmiah, meletakkan dasar-dasar kimia modern.

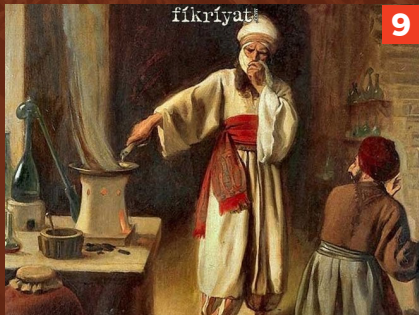
Bekerja terus-menerus di laboratorium, Jâbir mengembangkan dan menyempurnakan proses seperti sublimasi, pencairan, kristalisasi, distilasi, pemurnian, pencampuran dengan merkuri, oksidasi, penguapan, dan penyaringan. Cendekiawan Islam seperti Razi dan Ibnu Sina menyebutnya sebagai 'guru segala guru'.



Jabir Hayyan, bapak kimia modern, membuat penentuan yang menunjukkan struktur atom dan mengatakan bahwa jumlah tertentu bereaksi dengan jumlah tertentu dalam reaksi kimia.

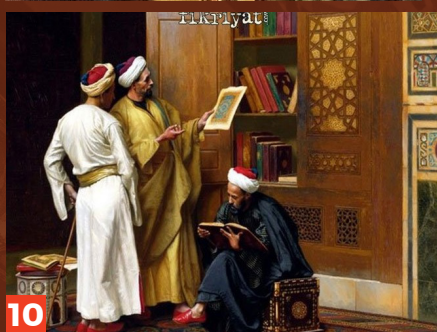
"Ada energi yang sangat kuat dalam partikel materi terkecil, atom. Tidak dapat dikatakan bahwa atom tidak dapat dibagi, seperti yang diklaim oleh para ilmuwan Yunani. Atom juga dapat dibagi. Ketika atom dibagi, terciptalah kekuatan yang dapat membalikkan Baghdad. Ini adalah tanda kekuasaan Allah."

Bom atom yang dibuat berabad-abad setelah kata-kata ini menghancurkan kota-kota tempat bom itu dijatuhkan.



IBNUL BAYTAR-BUKU FARMASI (BOTANI)

Ibnul Baytar menulis ensiklopedia penggunaan narkoba terbesar yang masih ada hingga saat ini. Ibn Baytar, yang menerima pendidikan dasar dari ayahnya, beralih ke botani setelah mempelajari ilmu-ilmu agama dan tradisional. Ia mempelajari tanaman obat yang tumbuh di wilayah Andalusia, khasiatnya, tempat tumbuhnya, serta nama ilmiah dan lokalnya. Ia melakukan penelitian dengan gurunya di wilayah Seville dan melakukan perjalanan ke berbagai bagian Andalusia, mengumpulkan sampel tanaman dan mengambil pelajaran dari apoteker terkenal. Setelah bepergian dari Afrika Utara ke kota-kota Fars, Tunisia, Aljazair, dan Tripoli, ia tiba di Anatolia dan mengunjungi daerah-daerah di bawah kekuasaan Seljuk dan Bizantium, tempat ia bertemu dengan para sarjana kedokteran, farmasi, dan botani.



Ibnu al-Baytâr merupakan salah satu penulis langka yang berkelana ke tiga benua untuk menambah ilmu, pengalaman, dan pengetahuannya di Timur dan Barat serta untuk mengumpulkan materi bagi karya-karya yang akan ditulisnya. Ia memperkenalkan bahan-bahan tersebut, yang terdiri dari spesies tanaman dan bahan makanan yang digunakan dalam pengobatan, dengan semua khasiatnya, dan menulis nama-nama mereka dalam bahasa Arab, Berber, Latin, Yunani dan Persia, dan menggunakan titik vokal untuk menghindari kebingungan.

Ibnu al-Baytâr, yang membandingkan satu obat dengan obat lain dan meneliti sifat-sifat kimia obat, memberikan kontribusi besar bagi ilmu botani dan kedokteran setelahnya dengan mengklasifikasikan obat-obatan secara terpisah dari informasi yang diverifikasi yang tidak dapat diverifikasi dalam eksperimen.

Sekembalinya dari perjalanan itu, Ibn al-Baytâr, yang kini dianggap sebagai ahli botani terhebat pada masanya, pergi ke Alexandria dengan koleksi tanamannya yang kaya. Di sini ia sangat dihormati dan menerima gelar kepala ahli botani Mesir (reîsülaşşâbîn).